

**STUDI PANDANGAN PRAKTISI DAN AKADEMISI
HUKUM ISLAM TENTANG SANKSI NIKAH SIRI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

**MUNAWIR
NIM. 1302110406**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1439 H / 2017 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL : STUDI PANDANGAN PRAKTISI DAN AKADEMISI
HUKUM ISLAM TENTANG SANKSI NIKAH SIRI**

NAMA : MUNAWIR

NIM : 130 211 0406

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 25 Oktober 2017

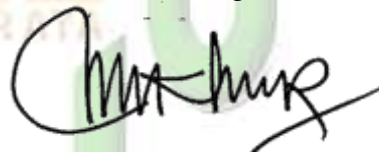
Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. SADIANI, MH
NIP. 19650101 199803 1 003

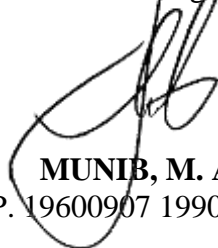
Pembimbing II,



ABDUL KHAIR, SH, MH
NIP. 19681201 200003 1 003

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



MUNIB, M. Ag
NIP. 19600907 199003 1 002

Ketua Jurusan Syariah,



Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 19650516 199402 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Munawir

Palangka Raya, 18 Oktober 2017

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya

di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **MUNAWIR**

NIM : **130 211 0406**

Judul : **STUDI PANDANGAN PRAKTISI DAN AKADEMISI**

HUKUM ISLAM TENTANG SANKSI NIKAH SIRI

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

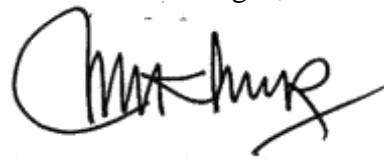
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. SADIANI, MH
NIP. 19650101 199803 1 003

Pembimbing II,



ABDUL KHAIR, SH, MH
NIP. 19681201 200003 1 003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**STUDI PANDANGAN PRAKTISI DAN AKADEMISI HUKUM ISLAM TENTANG SANKSI NIKAH SIRI**”, Oleh **MUNAWIR, NIM 130 211 0406** telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Rabu


Tanggal : 25 Oktober 2017

Palangka Raya, 25 Oktober 2017

Tim Penguji:

1. **MUNIB, M.Ag**
Ketua Sidang/Penguji (.....)
2. **Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag**
Penguji I (.....)
3. **Dr. SADIANI, MH**
Penguji II (.....)
4. **ABDUL KHAIR, SH, MH**
Sekretaris Sidang/Penguji (.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,


H. SYAIKHU, MHI
NIP.19711107 199903 1 005

STUDI PANDANGAN PRAKTISI DAN AKADEMISI HUKUM ISLAM TENTANG SANKSI NIKAH SIRI

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ketentuan Allah SWT yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Sesuai dengan fitrahnya manusia tidak dapat hidup menyendiri karena ia tergolong makhluk sosial yang memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam digariskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun masih ada masyarakat yang melakukan nikah siri atau tidak mencatatkan perkawinannya sehingga perlu adanya ketegasan tentang sanksi bagi pelaku nikah siri.

Fokus penelitian ini adalah latar belakang terjadinya nikah siri menurut praktisi dan akademisi hukum Islam, pelaksanaan nikah siri di masyarakat menurut praktisi dan akademisi hukum Islam dan sanksi nikah siri menurut praktisi dan akademisi hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala atau pegawai Kantor Urusan Agama Se-Kota Palangka Raya, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dan dosen Universitas Muhammadiyah Palangka Raya dan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu latar belakang terjadinya nikah siri adalah karena tidak memiliki akta cerai/talak bawah tangan dan ingin menikah lagi, pasangan tidak direstui orang tua/wali, hamil di luar nikah, ingin cepat menikah tanpa berurusan ke KUA, tidak mendapat persetujuan istri untuk menikah lagi, nikah belum cukup usia, takut hartanya terbagi jika menikah secara resmi dan karena perselingkuhan. Pelaksanaan nikah siri sama seperti peristiwa pernikahan pada umumnya, tetapi tidak dicatat oleh pencatat nikah, pernikahannya di rumah calon pengantin dan yang menikahkan adalah tokoh agama. Para praktisi hukum Islam sepakat jika nikah siri diberikan sanksi karena mengacaukan administrasi negara dan menimbulkan dampak yang negatif bagi keluarga. Sedangkan para akademisi hukum Islam ada yang setuju dan ada yang tidak setuju jika nikah siri diberikan sanksi.

Kata kunci: Praktisi, akademisi, hukum Islam dan nikah siri.

STUDY ON PERCEPTION OF PRACTITIONERS AND ACADEMICS ISLAMIC LAW ABOUT SANCTION OF SIRI MARRIAGE

ABSTRACT

Marriage is a general provision of Allah and applies to all His creatures. In accordance with the nature of human beings can not live alone because he belongs to social beings that have the nature of dependence and mutual need between one another. In Article 2 of Law Number 1 Year 1974 and Article 5 Compilation of Islamic Law stipulated that every marriage should be registered by the Registrar Officer, but there are still people who do siri marriage or not registering marriage so that there is need of firmness about sanctions for the perpetrators of siri marriage.

This study focused on the background of siri marriage according to practitioners and academics of Islamic law and the implementation of siri marriage in the community according to practitioners and academics of Islamic law. Type of this research was law sociology research. This study used empirical juridical approach. Subjects of the study were the Head or employees of the Office of Islamic Affairs of Palangka Raya, Religious Court Judges of Palangka Raya, and lecturers of Muhammadiyah University of Palangka Raya and State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya. Data collection techniques were through interview and documentation.

The results showed on the background that the occurrence of siri marriage because they did not have divorce certificate under the hand and wanted to marry again, the couple not sanctioned by parents, pregnant outside marriage, eager to get married without dealing to KUA, married again, young marriage, fearing his property was divided if married, and infidelity. Implementation of siri marriage is similar to marriage in general, but not registered by marriage registrar, marriage at bride's home and legalized by religious figure. Islamic law practitioners agree that siri marriage is given sanctions for disrupting state administration and causing negative impact on the family. While the academics of Islamic law, there are those who agree and there is not agreeable if siri marriage given sanctions.

Keywords: Practitioners, academics, Islamic law and siri marriage.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah peneliti haturkan kepada Allah SWT, bahwa atas rida dan inayah-Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, seluruh keluarga, kerabat, sahabat, pengikut hingga umat beliau sampai akhir zaman. *Āmīn*.

Skripsi ini berjudul: “STUDI PANDANGAN PRAKTISI DAN AKADEMISI HUKUM ISLAM TENTANG SANKSI NIKAH SIRI”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Ngatiyono dan Ibunda Sayati yang selalu mendoakan, memberikan motivasi serta mendidik dari kecil hingga besar sampai bisa mencapai gelar sarjana, serta kakak-kakak tersayang Siti

Norjanah, Siti Rofi'ah dan Siti Mardiah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada mereka semua. *Āmīn*.

2. Yth. Bapak Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
3. Yth. Bapak H. Syaikh, SHI, MHI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di bawah naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pegiat ilmu kesyariahan.
4. Yth. Bapak Dr. Sadiani, MH dan Abdul Khair, MH selaku Pembimbing I dan II. Terima kasih peneliti haturkan atas segala bimbingan, arahan dan motivasi yang diberikan. Semoga Bapak beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan serta keberkahan dalam menjalani kehidupan. *Āmīn*.
5. Para Kepala/pegawai Kantor Urusan Agama Se-Kota Palangka Raya, hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dan dosen Universitas Muhammadiyah Palangka Raya dan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang mau meluangkan waktu untuk memberikan informasi demi menunjang dalam penyusunan dan membantu melengkapi data yang diperlukan dalam skripsi ini.

6. Yth. Bapak Munib, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan kepada Bapak atas semua bimbingan, arahan, saran dan motivasi yang diberikan.
7. Seluruh Staf dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah membantu, mendidik, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan melipat gandakan amal kebaikan kepada mereka semua. *Āmīn*.
8. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah, dan khususnya mahasiswa prodi AHS angkatan 2013 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada peneliti.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah peneliti berserah diri. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya. *Āmīn*.

Palangka Raya, 25 Oktober 2017

Peneliti,



MUNAWIR

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**STUDI PANDANGAN PRAKTISI DAN AKADEMISI HUKUM ISLAM TENTANG SANKSI NIKAH SIRI**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 25 Oktober 2017

Yang membuat pernyataan,



MUNAWIR

NIM. 130 211 0406

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ^ص

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya),
dan ulil amri di antara kamu. (Q.S. an-Nisā [4]: 59)

PERSEMBAHAN

Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. **Ayahanda Ngatiyono dan Ibunda Sayati** tercinta yang tak pernah lelah untuk bersabar dan berdo'a demi kesuksesan anaknya.
2. **Kakak-kakak tersayang Siti Norjanah, Siti Rofi'ah dan Siti Mardiah** yang selalu menghibur, memberikan motivasi dan dukungan serta semangat yang luar biasa untuk peneliti.
3. Seluruh Dosen Fakultas Syariah khususnya dosen pembimbing akademik, **Bapak Munib, M.Ag** dan Dosen pembimbing skripsi, **Bapak Dr. Sadiani, MH** dan **Bapak Abdul Khair, SH, MH** yang selalu memberikan bimbingan serta arahan dalam studi serta ilmu yang telah diberikan selama peneliti menjalani perkuliahan hingga sampai pada tugas akhir, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan dapat peneliti amalkan.
4. Dosen-dosen IAIN Palangka Raya yang telah memberikan ilmu dan intelektualitas kepada peneliti sehingga peneliti mendapatkan wawasan yang luas.
5. Sahabat-sahabat AHS angkatan tahun 2013 semuanya yang selalu menemani, memberikan semangat, bantuan, dorongan dan motivasi serta do'a yang telah diberikan selama ini, sehingga peneliti semangat untuk belajar dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua mahasiswa AHS angkatan tahun 2013 kelak menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat.
6. Almamaterku IAIN Palangka Raya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTO.....	xi
PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teori.....	15

1. Teori Maslahat	15
2. Teori Kepastian Hukum	16
3. Teori Sanksi	18
C. Konsep Penelitian.....	21
1. Pengertian Praktisi dan Akademisi Hukum Islam	21
2. Pengertian Sanksi dan Ruang Lingkupnya	22
3. Pengertian Nikah Siri	24
4. Bentuk-Bentuk Nikah Siri.....	31
D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian	32
1. Kerangka Pikir	32
2. Denah Penelitian	33
3. Pertanyaan Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Waktu dan Tempat Penelitian	36
1. Waktu Penelitian	36
2. Tempat Penelitian.....	36
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Pendekatan Penelitian	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
1. Wawancara.....	40
2. Dokumentasi	41
E. Pengabsahan Data	41

F. Teknik Analisis Data	43
G. Sistematika Penulisan.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
1. Sejarah Palangka Raya	46
2. Gambaran Umum Kota Palangka Raya	51
3. Letak Geografis	51
B. Hasil Wawancara dengan Pegawai Kantor Urusan Agama, Hakim Pengadilan Agama dan Akademisi Hukum Islam.....	54
1. Pegawai Kantor Urusan Agama Se-Kota Palangka Raya	54
2. Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya.....	87
3. Akademisi Hukum Islam.....	102
C. Hasil Analisis	131
1. Latar Belakang Terjadinya Nikah Siri Menurut Praktisi dan Akademisi Hukum Islam.....	131
2. Pelaksanaan Nikah Siri di Masyarakat Menurut Praktisi dan Akademisi Hukum Islam.....	155
3. Sanksi Nikah Siri Menurut Praktisi dan Akademisi Hukum Islam.....	159
BAB V PENUTUP.....	179
A. Kesimpulan.....	179
B. Saran.....	180

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	13
Tabel 4.1	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk (per Km ²) Kota Palangka Raya Tahun 2016	53
Tabel 4.2	Ringkasan Hasil Wawancara dengan Pegawai KUA Se-Kota Palangka Raya	125
Tabel 4.3	Ringkasan Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya	127
Tabel 4.4	Ringkasan Hasil Wawancara dengan Akademisi Hukum Islam.....	129

DAFTAR BAGAN

Tabel 2.1 Kerangka Pikir	33
--------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AURI	: Angkatan Udara Republik Indonesia
Bimas	: Bimbingan Masyarakat
BP4	: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Catin	: Calon Pengantin
Cet.	: Cetakan
dkk	: dan kawan-kawan
DNA	: <i>Deoxyribo Nucleic Acid</i>
DPRGR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
dsb	: dan sebagainya
DUKCAPIL	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
h.	: Halaman
HKI	: Hukum Keluarga Islam
HR.	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Kec.	: Kecamatan
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KK	: Kartu Keluarga
Km	: Kilometer
Km ²	: Kilometer Persegi
KMA	: Keputusan Menteri Agama

KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUA	: Kantor Urusan Agama
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
No.	: Nomor
NTCR	: Nikah Talak Cerai Rujuk
P3N	: Petugas Pembantu Pencatat Nikah
PA	: Pengadilan Agama
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PMA	: Peraturan Menteri Agama
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
PPN	: Pegawai Pencatat Nikah
PSK	: Pekerja Seks Komersial
QS.	: Quran Surat
RT	: Rukun Tetangga
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SAW	: <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
SKBN	: Surat Keterangan Belum Nikah
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
SUSCATIN	: Kursus Calon Pengantin
SWT	: <i>Subḥānahū wa ta'ālā</i>
t.d.	: Tidak diterbitkan

TNI : Tentara Nasional Indonesia
UMP : Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
UU : Undang-Undang

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	l	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	em
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	<i>muta'addid</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ketentuan Allah SWT yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia sebagai makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Sesuai dengan fitrahnya manusia tidak dapat hidup menyendiri karena ia tergolong makhluk sosial yang memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, demikian halnya antara laki-laki dengan perempuan. Keinginan yang luhur dan mulia dari suatu perkawinan sebagai salah satu pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT dapat terwujud apabila suami istri dapat memahami dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang dan penuh keikhlasan. Hal itu diperlukan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana perkawinan merupakan

¹Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 9.

ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam ikatan yang sah menurut hukum.²

Perkawinan sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia baik untuk individu maupun kelompok, melalui perkawinan yang sah maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terjamin secara terhormat sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang mulia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1-2) menggariskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1-2) menggariskan, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁴

Adapun perkawinan yang tidak dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah dan tidak memiliki asas legalitas di mata hukum sehingga hak-hak suami dan istri serta anak-anak yang dilahirkan tidak memiliki kepastian hukum. Di sinilah perlunya pencatatan nikah agar semua orang yang telah melakukan perkawinan tidak hanya memiliki keabsahan secara agama Islam tetapi juga memiliki legalitas formal yang dilindungi oleh Undang-Undang.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

⁴Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) Pasal 5 ayat (1) dan (2).

Oleh karena itu pencatatan pernikahan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keabsahan suatu perkawinan.

Agama Islam merupakan agama yang universal dan sempurna dalam mengatur segala bidang kehidupan, khususnya yang menyangkut hubungan sesama manusia, sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT:

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ... ⁵ 

Artinya: ... Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi ...⁶

Ayat di atas, memberikan gambaran tentang perintah menikah, sehingga perkawinan yang disyariatkan Allah mesti dilaksanakan sesuai prosedur, baik yang ditentukan dalam hukum Islam atau kitab-kitab fikih, yang di Indonesia dirumuskan dalam aturan-aturan Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai prosedur menjadikannya sebagai ikatan yang sah, dalam Kompilasi Hukum Islam apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Demikian pula dengan orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Selain itu setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Dengan demikian perkawinan tersebut dinyatakan sah dan dapat diakui di mata hukum.

Kemudian pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah

⁵QS. an-Nisā [3]: 3.

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005, h. 99.

⁷Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus itu. Lihat skripsi Taupik Rahman, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Nikah Sirri di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya*, (Skripsi), Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2014, h. 1, t.d.

pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian perkawinan secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah untuk memperkuat ikatan dalam sebuah perkawinan.

Akad nikah yang tidak dicatatkan disebut dengan nikah siri,⁸ yaitu pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan petugas pencatat nikah dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama akibatnya perkawinan dari akad nikah siri atau akad nikah yang tidak dicatatkan secara hukum, maka perkawinannya tidak dapat diakui secara hukum. Akhirnya perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan berdampak negatif bagi pelakunya. Akad nikah siri merupakan fenomena yang sering terjadi di tengah masyarakat. Kenyataan seperti ini tidak hanya terjadi pada kalangan masyarakat tradisional pedesaan⁹, tetapi juga terjadi pada

⁸Nikah siri tidak hanya dikenal pada zaman sekarang ini saja, tetapi juga telah ada pada zaman sahabat. Istilah itu berasal dari ucapan Umar bin Khattab, pada saat beliau diberitahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Beliau berkata: *"Ini nikah siri, saya tidak membolehkannya dan sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam"*. Seharusnya pernikahan itu dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki, sebagai rukun nikah. Hal ini berarti rukun nikah itu belum sempurna. Kemudian jika diperhatikan ucapan Umar bin Khattab *"pasti saya rajam"*, maka seolah-olah perbuatan itu sama dengan perbuatan zina jika kedua suami istri bercampur. Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat, bahwa nikah siri itu tidak boleh dan jika terjadi harus di fasakh (dibatalkan) oleh pengadilan agama. Pendapat tersebut diperkuat oleh hadis Rasulullah: *"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Pelacur adalah wanita yang mengawinkan dirinya tanpa tanda bukti"*. (HR. Tirmidzi). http://ilmukita-imam.blogspot.com/2012/04/nikah-siri-dalam-perspektif-hukum_24.html (diakses 12 Mei 2016). Sedangkan menurut ulama kontemporer konsep nikah siri dan sesuai dengan kenyataan masa kini adalah jenis pernikahan: a. Tidak tercatat secara resmi di badan yang berwenang, b. Kesaksian para saksi yang dirahasiakan (baik pernikahan tersebut dicatat secara resmi maupun tidak, c. Pernikahan tanpa saksi, d. Pernikahan tanpa saksi dan wali. Lihat M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi R, *Nikah Sirri (Mem bahas Tuntas Definisi Awal, Asal Usul Hukum, serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf)*, Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010, h. 41-42.

⁹Peneliti mendengar secara langsung dari masyarakat tentang terjadinya nikah siri pada saat peneliti sedang KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.

masyarakat perkotaan¹⁰ yang mungkin tingkat pola pikirnya lebih maju di samping tercukupinya segala informasi dan pengetahuan.

Sejak tahun 2007,¹¹ di Indonesia sebenarnya sudah ada Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur tentang nikah siri. Dalam RUU tersebut pada Pasal 143 yang hanya diperuntukkan bagi pemeluk Islam menggariskan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari 6 (enam) bulan hingga 3 (tiga) tahun dan denda mulai dari Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) hingga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).¹² Namun RUU yang di dalamnya terdapat aturan tentang nikah siri itu sampai sekarang belum disahkan karena adanya pendapat yang pro dan kontra terhadap RUU tersebut.

Selain uraian di atas, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat 1-2 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat 1-2 tidak memiliki sanksi yang tegas bagi serangkaian pelaku pelaksanaan nikah siri untuk dikenakan pidana, denda ataupun kurungan, sebab kedua pasal dalam Undang-Undang tersebut masih laksana pasal karet yang membuka ruang kepada para pihak yang berkepentingan untuk dapat melaksanakan nikah siri. Selain itu praktik isbat nikah di Pengadilan Agama

¹⁰Hal itu dapat dilihat dari berita-berita yang ada di surat kabar maupun di televisi.

¹¹Endah Sri Lestari, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri*, <https://endahsrilestari16.wordpress.com/2014/04/17/sanksi-pidana-bagi-pelaku-nikah-siri/> (diakses 10 Oktober 2016).

¹²<http://m.voa-islam.com/news/indonesia/2012/12/06/22169/ruu-nikah-siri-ramerame-mempidanakan-ulama-menolak> (diakses 12 Mei 2016).

termasuk wahana membolehkan pelaksanaan nikah siri di masyarakat yang tanpa batas.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penelitian ini menjadi penting mengingat pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat berdampak negatif bagi diri mereka sendiri dan juga bagi anak yang dilahirkan. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk mengkajinya secara mendalam yang dituangkan pada penelitian skripsi yang berjudul: **“STUDI PANDANGAN PRAKTISI DAN AKADEMISI HUKUM ISLAM TENTANG SANKSI NIKAH SIRI”**.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang yang peneliti uraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya nikah siri menurut praktisi dan akademisi hukum Islam?
2. Bagaimana pelaksanaan nikah siri di masyarakat menurut praktisi dan akademisi hukum Islam?
3. Bagaimana sanksi nikah siri menurut praktisi dan akademisi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan latar belakang terjadinya nikah siri menurut praktisi dan akademisi hukum Islam.

2. Mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan nikah siri di masyarakat menurut praktisi dan akademisi hukum Islam.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan sanksi nikah siri menurut praktisi dan akademisi hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk menyelesaikan salah satu tugas akhir menjadi sarjana hukum di IAIN Palangka Raya.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam mencegah terjadinya nikah siri di kalangan masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Iis Lindawati tahun 2002, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan judul **Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus pada Pasangan Suami Isteri di Kelurahan Menteng dan Pahandut Kota Palangka Raya)**. Penelitian ini terfokus pada pendeskripsian latar belakang terjadinya pernikahan di bawah tangan, proses pelaksanaan pernikahan di bawah tangan, dan dampak pernikahan di bawah tangan di Kelurahan Menteng dan Pahandut Kota Palangka Raya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Latar belakang mereka melakukan nikah di bawah tangan bervariasi, yakni kesulitan dalam mengurus administrasi, situasi yang tidak memungkinkan (berbeda etnis) dan faktor hamil sebelum nikah, selain itu kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. Pernikahan di bawah tangan dilangsungkan setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, dengan berwalikan Bapak kandung dan pelimpahan ayah kandung pihak wanita kepada penghulu yang menikahkan. Sedangkan pernikahan bertempat di rumah wanita, kemudian pernikahan tersebut dihadiri oleh dua sampai tiga orang saksi yang diangkat oleh orang yang menikahkan dan berasal dari pihak keluarga wanita serta teman dekatnya yang hadir saat akad nikah tersebut. Meskipun dalam pelaksanaan nikah di

bawah tangan syarat menurut syariat agama telah mereka penuhi akan tetapi persyaratan dan tata cara menurut Undang-Undang diabaikan, sehingga pasangan yang nikah di bawah tangan tidak memiliki akta nikah.²⁵

2. Miftahurrohman tahun 2010, Fakultas Agama Islam, Jurusan Syariah, Program Studi Ahwal Asy-Syakhsyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul **Nikah Siri dan Akibat Hukumnya (Studi Pendapat Mahasiswa FAI UNISSULA Semarang Angkatan 2006-2009)**. Fokus penelitian ini mengkaji pendapat dan landasan hukum yang digunakan mahasiswa FAI UNISSULA Semarang tentang nikah siri dan akibat hukum dari praktik nikah siri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Mayoritas mahasiswa FAI UNISSULA Semarang (75% responden) berpendapat bahwa nikah siri sah hukumnya, akan tetapi jika dikaitkan dengan hukum negara maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Pendapat sebagian mahasiswa FAI UNISSULA yang lain (25% responden) bahwa nikah siri tidak sah sebab tidak memiliki kekuatan hukum. Adapun akibat dari nikah siri adalah: a) Pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum, maka ketika suatu hari terjadi masalah dalam keluarga tidak dapat dituntut secara hukum yang berlaku. b) Status anak dianggap anak luar nikah dengan ayahnya, akta kelahiran tidak tercantum nama ayahnya, serta tidak mendapatkan warisan dari padanya. c) Pernikahan siri dinilai masyarakat sebagai pernikahan yang terkadang dicurigai sebagai pasangan kumpul kebo atau dicurigai sebagai istri simpanan.²⁶

²⁵Iis Lindawati, *Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri di Kelurahan Menteng dan Pahandut Kota Palangka Raya)*, (skripsi), Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2002, t.d. (Perpustakaan IAIN Palangka Raya).

²⁶Miftahurrohman, *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya (Studi Pendapat Mahasiswa FAI UNISSULA Semarang Angkatan 2006-2009)*, (skripsi), Semarang: UNISSULA Semarang, 2010, t.d. <https://www.scribd.com/doc/86982380/Skripsi-Nikah-Siri-Dan-Akibat-Hukumnya-Miftahurrohman-SHI> (diakses 12 Oktober 2016).

3. Mujiati tahun 2011, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang dengan judul **Nikah Siri dan Implikasinya dalam Kehidupan Sosial di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus**. Penelitian ini terfokus pada latar belakang terjadinya nikah siri, dampak nikah siri bagi para pihak dan anaknya serta pandangan masyarakat terhadap nikah siri di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Latar belakang seseorang untuk nikah siri adalah karena ingin berpoligami, keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan, kondisi sosial budaya atau adat istiadat, dan yang terakhir karena ingin menghindari dari perbuatan zina. Dampak perkawinan di bawah tangan ini sangat merugikan bagi pihak istri dan anak, bagi kedua belah pihak adalah mendapatkan gunjingan dari masyarakat sekitar atau malu bersosialisasi dengan masyarakat, bagi anak dapat berdampak pada psikologi dan kehidupan sosial sang anak. Bagi sang istri dapat ditinggalkan suaminya begitu saja tanpa diceraikan karena sang suami tahu si istri tidak dapat menuntut di hadapan hukum karena tidak mempunyai bukti yang autentik tentang kejelasan perkawinan tersebut. Pandangan masyarakat di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus ini berbeda-beda, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, yang setuju dengan alasan dari pada terjerumus ke dalam perbuatan zina lebih baik nikah siri saja. Pengungkapan lain yang tidak setuju dengan alasan bahwa nikah siri ini membawa dampak negatif bagi perempuan dan anaknya kelak.²⁷

4. Rita Rochayati tahun 2012, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Pendidikan Sejarah, Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul **Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Siri di Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik**

²⁷Mujiati, *Nikah Siri dan Implikasinya dalam Kehidupan Sosial di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus*, (skripsi), Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011, t.d. <http://lib.unnes.ac.id/6817/1/7882.pdf> (diakses 12 Oktober 2016).

Kabupaten Pandeglang Banten. Penelitian ini terfokus pada bagaimana pelaksanaan pernikahan siri, faktor-faktor pendorong pernikahan siri, dan dampak dari pernikahan siri di Kampung Barengkok, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Ada tiga kesimpulan pokok. *Pertama*, bahwa pelaksanaan pernikahan siri tidak jauh berbeda dengan pernikahan resmi, dalam pernikahan siri tidak ada pencatatan seperti pernikahan yang dilakukan secara resmi. *Kedua*, faktor-faktor yang mendorong pernikahan siri di Kampung Barengkok, antara lain keadaan ekonomi yang lemah, faktor usia yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan, rendahnya tingkat pendidikan, dan dorongan dari keluarga dan masyarakat setempat serta keinginan poligami. *Ketiga*, dampak dari pernikahan siri bagi pelaku perempuan diantaranya, dapat memelihara kehormatannya terutama yang terkendala dengan usia dan ekonomi, muncul persoalan penetapan status istri saat terjadi perceraian, dan ketidaknyamanan. Dampak bagi pelaku laki-laki yaitu kemudahan dalam pernikahan, lebih bebas untuk menikah lagi, dan tidak dipusingkan dengan harta gono gini atau warisan jika terjadi sesuatu pada pernikahannya. Dampak pernikahan siri bagi masyarakat diantaranya kemudahan dalam melangsungkan pernikahan, kesulitan mendapatkan akta kelahiran anak, mudah terjadi perceraian, adanya pemalsuan dokumen, dan adanya konflik.²⁸

5. Yuyanti Lalata tahun 2013, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dengan judul **Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Perspektif Hukum Islam.** Penelitian ini terfokus pada bagaimana kedudukan hukum nikah siri dilihat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam serta akibat hukum nikah siri terhadap kedudukan

²⁸Rita Rochayati, *Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Siri di Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten*, (skripsi), Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, t.d. <http://eprints.uny.ac.id/22541/1/Rita%20Rochayati-08413241019.pdf> (diakses 12 Oktober 2016).

anak ditinjau menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya dan tidak dapat mengurus akta kelahiran, tidak mendapatkan hak waris dari ayah. Sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi anak dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hukum Islam nikah siri dinyatakan sah apabila dilaksanakan berdasarkan rukun dan syaratnya.²⁹

6. Taupik Rahman tahun 2014, Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Nikah Siri di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya**. Penelitian ini terfokus pada bagaimana praktik pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri yang melakukan nikah siri, praktik pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah siri, dan konsep pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak oleh pemerintah atau pemangku kepentingan akibat nikah siri di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

(1) Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang melakukan nikah siri dengan jalan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dengan jalan isbat nikah ke Pengadilan Agama akan banyak memberikan kontribusi baik terhadap pasangan suami istri maupun terhadap anak. (2) Dengan adanya isbat nikah, maka hak-

²⁹Yuyanti Lalata, *Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi), Gorontalo: Universitas Ichsan Gorontalo, 2013, t.d. <http://yuyantilalata.blogspot.com/2013/02/akibat-hukum-nikah-siri-terhadap.html> (diakses 12 Oktober 2016).

hak anak dapat terlindungi bahkan berhak mendapatkan akta kelahiran. Suami istri yang sudah mendapatkan putusan pengesahan nikah siri dari Pengadilan Agama dapat mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat untuk mendapatkan buku nikah. Dengan adanya buku nikah, pasangan suami istri dapat mendaftarkan identitas anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (3) Konsep dari pemerintah atau pemangku kepentingan untuk melindungi hak-hak dari nikah siri dengan adanya isbat nikah ke Pengadilan Agama, adanya pencatatan nikah dari Kantor Urusan Agama, adanya penerbitan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu juga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, adanya Konvensi tentang hak anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*.³⁰

Berdasarkan dari enam penelitian terdahulu yang telah peneliti sebutkan di atas, masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun persamaan dan perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Iis Lindawati, Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus pada Pasangan Suami Isteri di Kelurahan Menteng dan Pahandut Kota	Nikah siri/ nikah di bawah tangan	Perbedaannya dapat dilihat pada fokus penelitian, yakni Iis Lindawati adalah studi kasus pada pasangan suami istri yang melakukan nikah siri/nikah di bawah

³⁰Taupik Rahman, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Nikah Sirri di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya*, (Skripsi), Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2014, t.d. (Perpustakaan IAIN Palangka Raya).

	Palangka Raya), 2002, kajian lapangan.		tangan. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam tentang sanksi nikah siri.
2.	Miftahurrohman, Nikah Siri dan Akibat Hukumnya (Studi Pendapat Mahasiswa FAI UNISSULA Semarang Angkatan 2006-2009), 2010, kajian lapangan.	Nikah siri	Perbedaannya fokus penelitian Miftahurrohman adalah pendapat mahasiswa FAI UNISSULA tentang nikah siri dan akibat hukumnya. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam tentang sanksi nikah siri.
3.	Mujiati, Nikah Siri dan Implikasinya dalam Kehidupan Sosial di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, 2011, kajian lapangan.	Nikah siri	Perbedaannya fokus penelitian Mujiati adalah studi kasus tentang implikasi nikah siri. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam tentang sanksi nikah siri.
4.	Rita Rochayati, Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Siri di Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten, 2012, kajian lapangan.	Nikah siri	Perbedaannya fokus penelitian Rita Rochayati adalah studi kasus tentang faktor pendorong nikah siri. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam tentang sanksi nikah siri.
5.	Yuyanti Lalata, Akibat Hukum	Nikah siri	Perbedaannya fokus penelitian Yuyanti

	Nikah Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Perspektif Hukum Islam, 2013, kajian pustaka.		Lalata adalah akibat hukum nikah siri terhadap kedudukan anak. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam tentang sanksi nikah siri.
6.	Taupik Rahman, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Nikah Sirri di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, 2014, kajian lapangan.	Nikah siri	Perbedaannya fokus penelitian Taupik Rahman adalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak hasil nikah siri. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam tentang sanksi nikah siri.

B. Kajian Teori

Ada beberapa teori yang peneliti jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni:

1. Teori Maslahat

Maslahat adalah manfaat yang ditetapkan syar'i untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu di antaranya.³¹ Dalam pandangan at-Tufi, maslahat adalah sarana yang menyebabkan adanya maslahat dan manfaat. Misalnya, perdagangan adalah sarana untuk mencapai keuntungan. Pengertian maslahat berdasarkan syariat adalah

³¹Alwi, *Maslahat*, [Http://alwi-ushulfiqih.blogspot.co.id/2010/04/maslahat.html](http://alwi-ushulfiqih.blogspot.co.id/2010/04/maslahat.html) (diakses 17 Oktober 2016).

sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud syar'i, baik berupa ibadah maupun adat. Kemudian, masalah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang memang merupakan kehendak syar'i, yakni ibadah dan apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti adat istiadat.³²

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan di kalangan masyarakat umum. Kepastian hukum kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh.³³ Menurut Apeldoorn yang dikutip Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu:³⁴

- a. Soal dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi *predictability* (kemungkinan meramalkan). Demikian juga menurut Algra et. al, aspek penting dari kepastian hukum ialah bahwa putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu.

³²Yusdani, *Teori Maslahat*, [Http://makalahlaporanterbaru1.blogspot.co.id/2012/05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html](http://makalahlaporanterbaru1.blogspot.co.id/2012/05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html) (diakses 17 Oktober 2016).

³³Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 140.

³⁴*Ibid.*, h. 141.

- b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya.³⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁶ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang

³⁵*Ibid.*

³⁶<http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/> (diakses 17 Oktober 2016).

cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁷ Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat akan tercapai.³⁸ Melalui teori ini maka perlu ditetapkan aturan larangan nikah siri dan sanksi bagi pelaku serangkaian nikah siri agar adanya kepastian hukum sehingga aturannya jelas dan dapat ditaati oleh masyarakat.

3. Teori Sanksi

Kata “sanksi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang.³⁹ Adapun jenis-jenis sanksi adalah sebagai berikut:

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun

³⁷Krishna, *Teori Kepastian Hukum*, [Http://skripsifakhukum.blogspot.co.id/2015/01/teori-kepastian-hukum.html](http://skripsifakhukum.blogspot.co.id/2015/01/teori-kepastian-hukum.html) (diakses 17 Oktober 2016).

³⁸Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, h. 227.

³⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 996.

adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana.

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan Undang-Undang.⁴⁰

b. Sanksi Perdata

Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Bentuk putusan yang dijatuhkan hakim dapat berupa:

- 1) Putusan *Constitutif* yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan hukum baru, contohnya adalah

⁴⁰[Http://erepo.unud.ac.id/11020/3/51c4414c873f2ff89728e66ae524e9c4.pdf](http://erepo.unud.ac.id/11020/3/51c4414c873f2ff89728e66ae524e9c4.pdf) (diakses 21 Agustus 2017).

putusan perceraian suatu ikatan perkawinan;

- 2) Putusan *Condemnatoir* yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya, contohnya adalah putusan hukum untuk wajib membayar kerugian pihak tertentu;
- 3) Putusan *Declaratoir* yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, contohnya adalah putusan sengketa tanah atas penggugat atas kepemilikan yang sah.⁴¹

c. Sanksi Administratif

Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang memberikan landasan tersebut dinamakan hukum administrasi negara.

Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

⁴¹*Ibid.*

- 1) Sanksi *reparatoir*, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang, dwangsom*;
- 2) Sanksi *punitif*, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;
- 3) Sanksi *regresif*, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.⁴²

C. Konsep Penelitian

1. Pengertian Praktisi dan Akademisi Hukum Islam

Kata “praktisi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pelaksana.⁴³ Adapun “hukum” adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; Undang-Undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), vonis.⁴⁴ Dan “Islam” adalah agama yang

⁴²*Ibid.*

⁴³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 892.

diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berpedoman pada kitab suci Alquran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.⁴⁵

Berdasarkan pengertian di atas maka praktisi hukum Islam dapat diartikan sebagai orang yang melaksanakan tugas untuk menjalankan aturan-aturan (syariat) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara Islami. Contohnya yaitu para Hakim Pengadilan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama.

Adapun kata “akademisi” berarti orang yang berpendidikan tinggi; anggota akademi.⁴⁶ Jadi, pengertian akademisi hukum Islam adalah orang yang berpendidikan tinggi yang memiliki ilmu dan memahami hukum Islam secara mendalam. Contohnya adalah para Megister dan Doktor yang mengetahui tentang hukum Islam.

2. Pengertian Sanksi dan Ruang Lingkupnya

Kata “sanksi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang (anggaran dasar, perkumpulan dsb); tindakan (mengenai perekonomian dsb) sebagai hukuman kepada suatu negara; imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.⁴⁷ Sanksi dibagi menjadi dua, yaitu:

⁴⁴*Ibid.*, h. 410.

⁴⁵*Ibid.*, h. 444.

⁴⁶*Ibid.*, h. 18.

⁴⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 996-997.

a. Sanksi Sosial

Sanksi adalah akibat (hukuman) yang dikaitkan dengan ketaatan pada kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, baik itu kaidah sosial ataupun kaidah hukum. Berlainan dengan anggapan umum bahwa hanya hukum yang ada sanksinya, mungkin karena sanksi itu juga sering diterjemahkan dengan perkataan penghukuman, perlu dikatakan bahwa anggapan demikian tidak benar. Kaidah-kaidah sosial bukan hukum juga ada sanksinya. Orang yang melanggar kaidah kepatutan misalnya, bisa dikucilkan dari masyarakat. Dalam masyarakat-masyarakat tertentu, pengucilan dari masyarakat ini bisa merupakan hukuman yang lebih berat daripada sanksi hukum.⁴⁸

Perbedaan sanksi kaidah sosial dan sanksi hukum adalah bahwa kaidah sosial itu sanksinya tidak diatur oleh Undang-Undang, melainkan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tidak ada ketentuan Undang-Undang atau ketentuan tertulis tentang hal ini. Semuanya terserah kepada keputusan musyawarah adat atau masyarakat pada umumnya. Adapun sanksi hukum diatur oleh hukum, sering berupa Undang-Undang atau ketentuan perundangan lainnya. Sanksi hukum diatur baik mengenai cara atau prosedur penegakannya, pihak-pihak yang menegakkannya (penegak hukum) dan bobot atau berat sanksinya. Pelanggaran

⁴⁸Mochta Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: PT Alumni, 2000, h. 27-28.

hukum pidana misalnya diatur sanksinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 10). Sedangkan cara (prosedur) menetapkan hukuman diatur di dalam Hukum Acara Pidana.⁴⁹

b. Sanksi Hukum

Sanksi hukum dalam arti sempit adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Sanksi hukum adalah bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. Bentuk perwujudannya yang paling jelas dari sanksi hukum tampak dalam hukum pidana.⁵⁰

Karena penerapan atau dijatuhkannya sanksi bisa mengakibatkan perampasan kebebasan (hukuman penjara), harta benda (penyitaan), kehormatan bahkan jiwa seseorang (hukuman mati), maka dalam suatu negara hukum penerapan sanksi hukum itu dilaksanakan menurut tata cara (proses) yang dituangkan dalam hukum acara pidana yang dimaksudkan agar negara dalam melaksanakan haknya untuk memaksakan ditaatinya hukum tetap memperhatikan hak si tertuduh sebagai warganegara dan martabatnya sebagai manusia.⁵¹

⁴⁹*Ibid.*, h. 28-29.

⁵⁰*Ibid.*, h. 43-44.

⁵¹*Ibid.*, h. 44-45.

3. Pengertian Nikah Siri

Nikah siri berasal dari dua kata, yakni “nikah” dan “siri”. Kata nikah berasal dari bahasa Arab نَكَحَ - يَنْكُحُ - نِكَاحًا. ⁵² Sinonimnya تَزَوَّجَ kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia. ⁵³ Perkawinan menurut hukum Islam surah ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ⁵⁴

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. ⁵⁵

Nikah secara syariat adalah akad yang membolehkan hubungan intim dengan menggunakan kata “menikahkan”, “mengawinkan” atau terjemah keduanya. Masyarakat Arab menggunakan kata “nikah” untuk merujuk makna “akad” dan “hubungan intim” sekaligus. ⁵⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “nikah” berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan

⁵²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h. 1461.

⁵³Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 11.

⁵⁴Ar-Rūm [30]: 21.

⁵⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 572.

⁵⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqihiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 2*, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010, h. 449.

hukum dan ajaran agama.⁵⁷ Nikah juga diartikan sebagai akad atau bersetubuh. Al-Fara' berkata "*an-Nukh*" adalah sebutan untuk kemaluan, dan disebut sebagai akad adalah karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri.⁵⁸ Di dalam Alquran kata "nikah" digunakan sebanyak 23 kali yang mempunyai arti "berhimpun". Alquran juga menggunakan kata *zawwaja* atau *zawj* yang memiliki makna sepadan dengan kata nikah sebanyak 80 kali. Secara umum Alquran hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah.⁵⁹

Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafazh) "nikah" atau *tazwij*.⁶⁰ Adapun tentang makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- 2) Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal "nikah" atau *zawj* yang menyimpan

⁵⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 782.

⁵⁸Labib MZ, *Risalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006, h. 9.

⁵⁹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996, h. 191.

⁶⁰Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 12.

arti memiliki wati. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

- 3) Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.⁶¹

Menurut Mohd. Idris Ramulyo yang dikutip Sadiani, nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi (mathaporic)* atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁶²

Menurut Hazairin dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Nasional* yang dikutip oleh Mohd. Idris Ramulyo mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Dia mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual suami istri, maka tidak perlu ada

⁶¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I...*, h. 10-11.

⁶² Sadiani, *Nikah Via Telepon: Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: Intimedia dan STAIN Palangka Raya, 2008, h. 13.

tenggang waktu menunggu (idah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.⁶³

Setelah dijelaskan beberapa pengertian nikah tersebut di atas maka dapat dikemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syarak untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT.

Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁴ Kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶⁵ Dengan kata lain, pernikahan dapat pula diartikan sebagai bentuk suatu ikatan perjanjian antara pasangan suami-istri yang harus saling bekerja sama dan bertanggung

⁶³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996, h. 2.

⁶⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

⁶⁵Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) Pasal 2.

jawab terhadap segala urusan rumah tangganya agar bisa terbangun sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, *warahmah*.

Adapun kata “siri” secara etimologi berasal dari bahasa Arab سِرٌّ - يَسِرُّ - سِرًّا yang memiliki arti rahasia.⁶⁶ Kata ini juga mengacu pada pengertian “tersembunyi”.⁶⁷ Jika demikian, makna “tersembunyi” atau “rahasia” dari istilah nikah siri tidak mengacu kepada pihak lain, kecuali pihak pemerintah. Di samping merahasiakan pernikahan tersebut dari mata pemerintah, boleh jadi merahasiakan pernikahan tersebut dari penglihatan banyak orang. Namun demikian, tidak bisa disebut sebagai nikah siri manakala hanya menyembunyikan nikah tersebut dari penglihatan banyak orang, tetapi pernikahan yang telah dicatat di catatan sipil atau Kantor Urusan Agama. Sebaliknya, pernikahan akan tetap disebut nikah siri karena tidak ada bukti hitam di atas putih yang ada di catatan sipil atau Kantor Urusan Agama, walaupun banyak orang telah menyaksikan pernikahan tersebut.⁶⁸ Oleh karena itu istilah nikah siri adalah istilah yang dimunculkan dalam konteks pemerintahan untuk menandai suatu jenis pernikahan yang tidak ada bekas-bekas catatannya di catatan sipil atau Kantor Urusan Agama.

Wildan Suyuti Mustofa yang dikutip H. M. Anshary menjelaskan bahwa dari pengamatan di lapangan, nikah siri dapat dibedakan kepada

⁶⁶Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir...*, h. 625.

⁶⁷Taufiqurrahman Al-Azizy, *Jangan Sirri-Kan Nikahmu*, Jakarta Selatan: Himmah Media, 2010, h. 5.

⁶⁸*Ibid*, h, 40.

dua jenis. *Pertama*, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan. Dalam pernikahan bentuk pertama ini akad nikah hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Padahal guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah, karena ia tidak termasuk dalam prioritas wali nikah. *Kedua*, adalah akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu pernikahan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.⁶⁹

Abdul Gani Abdullah yang dikutip M. Anshary mengatakan, bahwa untuk mengetahui apakah pada suatu perkawinan itu terdapat unsur siri atau tidak, dapat dilihat dari tiga indikator yang harus selalu menyertai suatu pernikahan legal. Apabila salah satu faktor saja tidak terpenuhi, pernikahan itu dapat diidentifikasi sebagai pernikahan siri. Tiga indikator itu adalah, *Pertama*, subjek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon istri, dan wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali, dan dua orang saksi. *Kedua*, kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan; dan *Ketiga*, *walimah al-'arusy*, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada

⁶⁹H. M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 25.

masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami istri tadi telah resmi menjadi suami istri.⁷⁰

Berdasarkan dari pengertian di atas maka dapat dipahami dalam konteks zaman sekarang khususnya di negara Indonesia, bahwa nikah siri adalah pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi secara agama, namun dilakukan secara rahasia dan umumnya tanpa dicatat oleh badan pencatatan yang berwenang di suatu negara.

4. Bentuk-Bentuk Nikah Siri

Adapun bentuk-bentuk daripada nikah siri sebagai berikut:⁷¹

- 1) Pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi yang tidak tercatat secara resmi, namun pernikahan ini disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang adil dan berdasarkan persetujuan serta kehadiran wali namun para saksi diminta untuk merahasiakan kesaksian mereka.
- 2) Pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi yang dicatat secara resmi pada badan berwenang di suatu negara berikut para saksi dan persetujuan wali namun para saksi diminta untuk merahasiakan kesaksiannya.
- 3) Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi namun disetujui oleh wali tanpa ada saksi.
- 4) Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di badan yang berwenang dan tanpa diketahui wali serta tanpa ada saksi.

⁷⁰*Ibid.*, h. 26.

⁷¹M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi R, *Nikah sirri...*, h. 49-50.

Dari keempat bentuk nikah siri tersebut di atas, yang menjadi bahan perdebatan berkepanjangan, terutama di kalangan ulama kontemporer adalah bentuk pertama dan bentuk kedua, meskipun bentuk kedua lebih ringan mudaratnya dibandingkan bentuk pertama. Adapun bentuk ketiga adalah akad nikah yang batil, sehingga hubungan suami istri dianggap melanggar syariat. Sementara bentuk yang keempat adalah akad nikah yang batil dari segala sisi, sehingga dapat disebut sebagai '*ainuz zina* (bentuk perzinahan sesungguhnya).⁷²

D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir

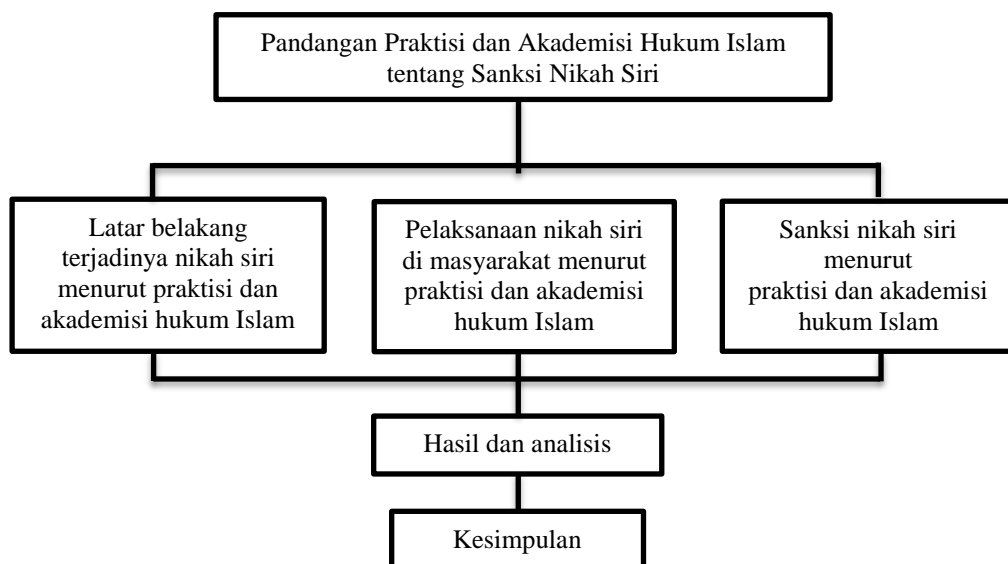
Nikah siri merupakan pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi secara agama namun dilakukan tanpa dicatat oleh badan pencatatan yang berwenang yang ditugaskan oleh negara, untuk pernikahan orang yang beragama Islam di Indonesia tugasnya ada di KUA agar ada bukti tertulis yang membuktikan adanya kepastian hukum dalam pernikahan dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkannya kelak sehingga dapat menjaga kewibawaan perkawinan dalam Islam sebagai ikatan yang suci. Oleh karena itu tidak ada keuntungan dalam pernikahan siri, bahkan lebih banyak merugikan anak-anak dan kaum perempuan, jika laki-laki melepaskan diri dari pernikahannya di kemudian hari dan mantan istri serta anaknya tidak dapat menuntut tanggung jawab dari mantan suaminya. Sebaliknya jika dalam perkawinan dilaksanakan

⁷²*Ibid.*, h. 50.

secara sah menurut agama dan Undang-Undang maka istri dan anaknya dapat menggugat secara hukum mantan suami yang bertindak sewenang-wenang terhadap keluarga.

2. Denah Penelitian

Bagan 2.1
Kerangka Pikir



3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut.

a. Pertanyaan penelitian untuk praktisi

- 1) Latar belakang terjadinya nikah siri menurut praktisi dan akademisi hukum Islam:

- a) Apa penyebab yang memicu terjadinya nikah siri?

- b) Bagaimana dasar hukum yang melarang ataupun yang membolehkan terjadinya nikah siri?
- 2) Pelaksanaan nikah siri di masyarakat menurut praktisi dan akademisi hukum Islam:
 - a) Apakah Bapak/Ibu pernah mengetahui praktik nikah siri di masyarakat?
 - b) Bagaimana kebiasaannya pelaksanaan dari nikah siri tersebut?
 - c) Menurut Bapak/Ibu adakah dasar orang yang nikah siri itu?
- 3) Sanksi nikah siri menurut praktisi dan akademisi hukum Islam:
 - a) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang hukum nikah siri?
 - b) Bagaimana dampak dari nikah siri?
 - c) Bagaimana seharusnya ketentuan hukum yang berdampak pada efek jera bagi para pelaku serangkaian nikah siri?
 - d) Apakah selama ini pernah diambil tindakan terhadap pelaku nikah siri dan penghulu yang menikahkannya? (Pertanyaan ini hanya untuk pegawai KUA)
 - e) Apakah selama ini pernah diberikan penyuluhan hukum tentang larangan nikah siri?
 - f) Apakah Bapak/Ibu secara pribadi dapat merekomendasikan pelaksanaan nikah siri tersebut atau tidak?
- b. Pertanyaan penelitian untuk akademisi
 - 1) Latar belakang terjadinya nikah siri menurut praktisi dan akademisi hukum Islam:

- a) Apa penyebab yang memicu terjadinya nikah siri?
 - b) Bagaimana dasar hukum yang melarang ataupun yang membolehkan terjadinya nikah siri?
- 2) Pelaksanaan nikah siri di masyarakat menurut praktisi dan akademisi hukum Islam:
- a) Apakah Bapak/Ibu sering mengetahui terjadinya nikah siri?
 - b) Dimana tempat pelaksanaan nikah siri?
 - c) Siapa biasanya yang menikahkan orang yang nikah siri?
 - d) Siapa yang mencatat terjadinya peristiwa nikah siri?
 - e) Bagaimana bentuk redaksi dalam surat pernikahan siri?
- 3) Sanksi nikah siri menurut praktisi dan akademisi hukum Islam:
- a) Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait sanksi nikah siri?
 - b) Bagaimana akibat hukum dari nikah siri?
 - c) Bagaimana seharusnya ketentuan hukum yang berdampak pada efek jera bagi para pelaku serangkaian nikah siri?
 - d) Apakah Bapak/Ibu secara pribadi dapat merekomendasikan pelaksanaan nikah siri tersebut atau tidak?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian tentang studi pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam selama 11 (sebelas) bulan setelah penyelenggaraan seminar dan mendapat izin dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, yaitu dari bulan November tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2017.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palangka Raya dengan pertimbangan data digali dari subjek yang ada di Kota Palangka Raya, jika subjek berada di luar Kota Palangka Raya maka peneliti tidak meneliti subjek yang berada di luar Kota tersebut.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum yang mengkaji “*law as it is in society*”, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empirik.¹²¹ Sumber data dalam penelitian ini adalah

¹²¹Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 3.

data primer. Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.¹²² Senada dengan ungkapan tersebut, Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹²³ Sumber data yang dimaksud dalam penelitian hukum ini sebagaimana disebutkan oleh Abdulkadir Muhammad yaitu:

- a. Lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Oleh karena itu, data primer sering disebut dengan data lapangan.
- b. Peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian.
- c. Responden yang memberikan informasi kepada peneliti.

Bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik interaksi masyarakat, oleh karena itu penelitian ini dianalisis secara kualitatif.¹²⁴ Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moeleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif* mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Definisi serupa juga disebutkan oleh Kirk dan Miller yang menjelaskan

¹²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 170.

¹²³H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 106.

¹²⁴Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 382.

bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung terhadap pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahwasanya dan dalam peristilahannya.¹²⁵ Peneliti menggunakan jenis penelitian sosiologi hukum karena penelitian ini mengkaji suatu masalah yang berkaitan dengan perilaku sosial, yakni pernikahan yang tidak dicatat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹²⁶

Penelitian ini berbentuk deskriptif, yakni memberikan data yang seteliti mungkin untuk mempertegas hipotesa-hipotesa dan dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala

¹²⁵Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 18, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, h. 3.

¹²⁶H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 105.

lainnya.¹²⁷ Adapun tujuan pokok penelitian hukum adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum yaitu masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.¹²⁸ Penelitian ini penting artinya karena masing-masing pengertian pokok/dasar tersebut mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum, misalnya pengertian pokok/dasar "peristiwa hukum" yang mempunyai arti penting dalam kehidupan hukum, mencakup keadaan (*omstandigheden*), kejadian (*gebeurtenissen*), dan perilaku atau sikap tindak (*gedragingen*).¹²⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris karena mengkaji suatu masalah yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya masyarakat mencatatkan pernikahannya kepada badan yang berwenang namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan), yaitu dengan menentukan subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini telah ditentukan informan kunci (*key informan*) yang

¹²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, h. 10.

¹²⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 93.

¹²⁹*Ibid.*

sesuai dengan fokus penelitian. Oleh karena itu peneliti memilih sampel secara sengaja (*purposive sampling*).¹³⁰ Subjek dalam penelitian ini adalah para praktisi hukum Islam, yakni Kepala atau pegawai Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Palangka Raya sebanyak 5 orang, dan hakim Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak 3 orang, serta akademisi hukum Islam yaitu dosen yang mengetahui tentang hukum Islam khususnya berkaitan dengan penelitian ini yang berada di Kota Palangka Raya sebanyak 4 orang (2 orang dosen Universitas Muhammadiyah Palangka Raya dan 2 orang dosen Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya). Adapun objek dalam penelitian ini adalah pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam tentang sanksi nikah siri.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.¹³¹ Melalui teknik wawancara ini, peneliti berkomunikasi secara langsung dengan responden yaitu para praktisi hukum Islam (Kepala atau pegawai Kantor Urusan Agama di Kota Palangka Raya dan hakim Pengadilan

¹³⁰Burhan Bungin, *Analaisis Data Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 53.

¹³¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 108.

Agama Palangka Raya) serta akademisi hukum Islam (dosen yang mengetahui tentang hukum Islam yang ada di Kota Palangka Raya). Data dalam penelitian ini digali dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan mengacu pada rumusan masalah secara terfokus.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.¹³² Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk gambar (foto) saat wawancara dengan responden, yakni dengan Kepala atau pegawai Kantor Urusan Agama Kota Palangka Raya dan Pengadilan Agama Palangka Raya serta dosen hukum Islam yang ada di Kota Palangka Raya.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi¹³³ yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.¹³⁴ Triangulasi berarti

¹³²*Ibid*, h. 82.

¹³³Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif...*, h. 110.

¹³⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 83.

melakukan pengecekan ulang dan atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.¹³⁵

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.¹³⁶ Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

(1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan, (5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹³⁷

Teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek atau responden, yakni membandingkan data hasil wawancara antara Kepala atau Pegawai Kantor Urusan Agama Kota Palangka Raya, hakim Pengadilan

¹³⁵Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum...*, h. 387.

¹³⁶Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 177.

¹³⁷*Ibid.*, h. 178.

Agama Palangka Raya dan dosen hukum Islam yang ada di Kota Palangka Raya.

F. Teknik Analisis Data

Ada beberapa langkah yang ditempuh dalam menganalisis data pada penelitian ini, yaitu:

1. *Data Collection* (pengumpulan data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari beberapa sumber mengenai studi pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam tentang sanksi nikah siri.
2. *Data Reduction* (pengurangan data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang studi pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam tentang sanksi nikah siri setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
3. *Data Display* (penyajian data), yaitu data yang dihasilkan dari penelitian tentang studi pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam tentang sanksi nikah siri dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.
4. *Data Conclusion Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat

dari studi pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam tentang sanksi nikah siri tidak menyimpang dari data yang dianalisis.¹³⁸

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.
- BAB II : Kajian Teori dan Konsep Penelitian, meliputi penelitian terdahulu, kajian teori: teori maslahat, teori kepastian hukum dan teori sanksi; konsep penelitian: pengertian praktisi hukum Islam, pengertian akademisi hukum Islam, pengertian sanksi dan ruang lingkupnya, pengertian perintah dan larangan, pengertian pelanggaran, pengertian pernikahan dan ruang lingkupnya; kerangka pikir dan pertanyaan penelitian: kerangka pikir, denah penelitian dan pertanyaan penelitian.
- BAB III : Metode Penelitian, meliputi waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, hasil wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama, hakim Pengadilan Agama dan akademisi hukum Islam

¹³⁸Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992, h. 23.

tentang latar belakang terjadinya nikah siri, pelaksanaan nikah siri di masyarakat dan sanksi nikah siri. Hasil Analisis tentang latar belakang terjadinya nikah siri menurut praktisi dan akademisi hukum Islam, pelaksanaan nikah siri di masyarakat menurut praktisi dan akademisi hukum Islam dan sanksi nikah siri menurut praktisi dan akademisi hukum Islam.

BAB V : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Palangka Raya

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian Monumen/Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna:

- a. Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- b. Tugu Api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun.
- c. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang.
- d. Segi Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1958 Ibu Kota Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama dengan Palangka Raya.¹⁵⁷

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.¹⁵⁸

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan

¹⁵⁷<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (diakses 04 Mei 2017).

¹⁵⁸*Ibid.*

Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.¹⁵⁹

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.¹⁶⁰

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.¹⁶¹

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut.
- b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
- c. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

¹⁵⁹*Ibid.*

¹⁶⁰*Ibid.*

¹⁶¹*Ibid.*

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut.
- b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya.

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputy Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya.¹⁶²

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik

¹⁶²*Ibid.*

Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.¹⁶³

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung

¹⁶³*Ibid.*

papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.¹⁶⁴

2. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2,687 Km².¹⁶⁵

3. Letak Geografis

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30`- 114°07` Bujur Timur dan 1°35`- 2°24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

¹⁶⁴*Ibid.*

¹⁶⁵<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> (diakses 04 Mei 2017).

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.¹⁶⁶ Yang mana 5 (lima) kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu :

- a. Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sabangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
- e. Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang,

¹⁶⁶<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> (diakses 04 Mei 2017).

Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.¹⁶⁷

Adapun mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Palangka Raya yang terbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
(per Km²) Kota Palangka Raya Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Pahandut	119,41	93 894	786
2.	Sabangau	641,47	17 398	27
3.	Jekan Raya	387,53	139 312	359
4.	Bukit Batu	603,16	13 749	23
5.	Rakumpit	1 101,95	3 404	3
Palangka Raya		2 853,52	267 757	61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2017

Pada setiap Kecamatan di Kota Palangka Raya terdapat Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut beralamat di Jalan Wahidin Sudiro Husudo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya di Jalan Rinjani Bukit Hindu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau di Jalan Mahir Mahar Km. 17 Kalampangan, Kantor Urusan

¹⁶⁷Stanley Adrian, *Profil Kota Palangkaraya*,
[Http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html](http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html)
(diakses 04 Mei 2017).

Agama Kecamatan Bukit Batu di Jalan Tjilik Riwut Km. 33 Tangkiling, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit di Jalan Tumbang Talaken Km. 52,5 Petuk Bukit.

Kemudian di Kota Palangka Raya terdapat satu Pengadilan Agama yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 2, dan di Kota Palangka Raya terdapat dua Perguruan Tinggi Islam, yakni Universitas Muhammadiyah Palangka Raya yang beralamat di Jalan RTA Milono Km. 1,5 dan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang beralamat di Jalan G. Obos Komplek Islamic Center.

B. Hasil Wawancara dengan Pegawai Kantor Urusan Agama, Hakim Pengadilan Agama dan Akademisi Hukum Islam

1. Pegawai Kantor Urusan Agama Se-Kota Palangka Raya

Hasil wawancara tentang studi pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam tentang sanksi nikah siri dimaksud diuraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan (terlampir), sebagai berikut:

a. Responden Pertama

Nama : HH

Tempat, Tanggal Lahir : Hulu Sungai Tengah, 06 Januari 1973

Pendidikan Terakhir : S-1

Pekerjaan : Kepala KUA Kec. Pahandut

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 06 Desember 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut pada

pukul 15.00 WIB sampai dengan 15.21 WIB. Fokus permasalahan tentang pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam mengenai sanksi nikah siri diuraikan sebagai berikut:

a) Apa penyebab yang memicu terjadinya nikah siri?

HH menjelaskan:

Menurut pengamatan saya pribadi di lapangan yang memicu terjadinya pernikahan siri, nikah siri itu artinya nikah yang secara diam-diam atau tidak tercatat menurut hukum negara kan kalau menurut hukum agama itu siri artinya diam-diam tersembunyi, tapi menurut hukum negara tidak tercatat. Artinya nikahnya secara hukum negara itu tidak resmi karena tidak ada bukti. Yang memicu masalah terjadinya nikah siri karena ada sesuatu hal yang mereka sendiri tidak bisa menyikapi itu. Halnya misalnya suaminya belum putus dengan istri yang pertama, belum putus secara hukum negara, mungkin secara hukum agama sudah cerai sudah ditalaknya bininya tapi secara hukum negara belum ada akta cerai jadi pihak Kantor Urusan Agama manapun gak berani menikahkan pasti satu-satunya jalan mereka nikah siri atau mungkin perempuannya ada sesuatu hal, misalnya walinya kada setuju atau keluarganya dan lain sebagainya, nah itu yang memicu penyebab kebanyakan orang itu nikah siri tapi kalau inya mulus jejak dengan perawan jarang ada yang nikah siri kecuali terdesak. Terdesak tu artinya sudah harus dinikahkan berkasnya belum lengkap, umurnya di bawah umur, KTPnya belum ada, tapi karena sesuatu hal mungkin mohon maaf sudah hamil, nah mau kada mau dinikahkan secara agama. Mereka secara agama sah mungkin nikahnya secara agama itu kalau memang syarat dan rukunnya terpenuhi, sahlah secara agama kan gitu. Jadi penyebabnya itu memang banya di lapangan itu penyebabnya salah satunya itu tadi karena ada sesuatu hal yang mereka sendiri tidak bisa menyikapi atau menyelesaikan masalah itu, itu ja yang masalahnya entah itu status, atau pihak keluarga dan lain sebagainya.¹⁶⁸

¹⁶⁸Wawancara dengan HH (Kepala KUA Kec. Pahandut) di KUA Kec. Pahandut Kota Palangka Raya pada tanggal 06 Desember 2016.

- b) Bagaimana dasar hukum yang melarang ataupun yang membolehkan terjadinya nikah siri?

HH menjelaskan:

Memang dalam mun kada salah hadis, nikah itu harus di apa diumumkan kan gitu kan hadisnya saya lupa harus diumumkan kan gitu dasarnya kan jangan disembunyikan supaya apa supaya orang tau bahwa si A dan si B sudah berkeluarga efeknya tu banya efeknya kalau si A ni berkeluarga sudah yang jelas kalau memang perempuan cantik kan kadada yang ganggu lagi, kalau perempuan gagah gini gini kan gitu efeknya salah satunya kan, kalau sudah tau tapi kalau kada tau kalau diam-diam jangan-jangan dikira orang bujang dikira orang masih perawan kan gitu kan, na itu efek salah satunya.¹⁶⁹

- c) Apakah Bapak pernah mengetahui praktik nikah siri di masyarakat?

HH menjelaskan:

Sebenarnya nikah siri itu Undang-Undang tidak mengakui bahwa itu nikah secara hukum agama kan kalau rukun dan syaratnya terpenuhi, lengkaplah sahlah nikahnya secara agama kan ga ada harus tercatat memang dalam hadis pun setiap sesuatu yang penting itu harus dicatat sebenarnya dasar hukumnya kan sama nikah itu kan penting harus dicatat sebenarnya kan, sebenarnya kan disitu tapi masalah nikah ni asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi secara hukum agama sah, tapi Undang-Undang kada ngakui karena kada tercatat kadada pembuktian bahwa si A dengan si B ni sebagai suami istri, ga ada legalitas lah.¹⁷⁰

- d) Bagaimana kebiasaannya pelaksanaan dari nikah siri tersebut?

HH menjelaskan:

Untuk sementara belum, dan saya kalau diundang pun gak berani. Hadir pun gak berani menghadiri, karena terjadi

¹⁶⁹*Ibid.*

¹⁷⁰*Ibid.*

sesuatu hal nanti kita dikira dikira membolehkan atau mensetujui lah kasarnya kan gitu kan iya kesannya kan, wah ada orang KUA disitu, Owh nikah siri bisa aja dilaksanakan kan gitu walaupun kawan kah siapa kah yang melaksanakan itu kalaupun kita diundang ya dengan mohon maaf ai kita gak bisa hadir kan gitu kan karena terkait dengan dinas kita, sebenarnya kalau masyarakat biasa gak jadi masalah.¹⁷¹

- e) Menurut Bapak adakah dasar orang yang nikah siri itu?

HH menjelaskan:

Ya dasarnya mereka itu kan agama, kalau rukun dan syaratnya terpenuhi sahlah mereka secara hukum agama kumpulnya sebagai suami istri kan gitu kan, karena kadang-kadang kita tu karena yang terlalu panatik itu ngapain kita ngurus hukum negara katanya kan, kan gitu kan taati hukum agama katanya, padahal kita hidup ni kada bisa terlewatkan dari hukum negara karena kita hidup di Indonesia di dalam negara hukum. Contohnya kita berkendara kada pakai SIM, kada usah pakai SIM kalau kada mau ngikuti hukum negara kan, kada usah pakai KTP kita kalau kada mau mengikuti hukum negara gitu kan, tapi kadang-kadang ya itu mencari yang ringan-ringannya mencari alasan-alasan supaya memperkuat dalihnya supaya bisa kan gitu.¹⁷²

- f) Bagaimana seharusnya ketentuan hukum yang berdampak pada efek jera bagi para pelaku serangkaian nikah siri?

HH menjelaskan:

Memang ada aturan dalam Undang-Undang bagi yang tidak berwenang menikahkan kalau ada tuntutan 6 bulan penjara. Artinya kan kada berwenang, nikah siri itu dia kadada berwenang menikahkan orang sebenarnya walaupun tokoh masyarakat, kada berwenang sebenarnya ada tapi sekarang kan kita kan Indonesia ni secara kekeluargaan secara anunya kan kuat secara tidak merugikan kita gak ada yang melapor, sebenarnya itu

¹⁷¹*Ibid.*

¹⁷²*Ibid.*

kalau ada yang melapor itu bisa diproses yang jelas, yang menikahkan gitu kan. Tapi kalau efek jeranya yang menikahkan juga ada juga, gini masalahnya kadang-kadang, si A sama si B nikah di bawah tangan si C yang menikahkan terjadi sesuatu hal si A dan si B ini otomatis dia pasti komplain kami nikah di sini si C yang nikahkan. Sebenarnya secara sosial ada efeknya, efek jeranya untuk yang menikahkan itu apalagi kalau kadang datang kesini kan kesini mau mengawini ini konsultasi yang nikahkan siapa si A si B misalnya kenapa sampai gini gini kan kadang dia terjadi sesuatu hal misalnya untuk mengurus akta kelahiran anak dia gak bisa karena tidak ada akta nikah kan gitukan mengurus akta kelahiran tidak bisa jelas sebenarnya bisa juga kalau mengurus akta apa kartu keluarga itu sebenarnya harus sesuai dengan identitas yang bersangkutan seharusnya tapi kan gak mengacu kesitu sebenarnya kalau pihak pemerintah kita memang sama-sama mau berbuat untuk menghapuskan nikah siri itu begitu mereka mau mengolah kartu keluarga liat identitasnya apakah memang benar suami istri kalau suami istri mana buktinya jangan langsung olahkan si A suami si B istri si C anak bukti identiknya gak ada sebenarnya itu kalau pemerintah mau bersatu sebenarnya bisa dan merasa efek jeranya bagi yang bersangkutan itu pasti banya, yang jelas legalitas mereka sebagai suami istri tidak ada. Kalau digrebek warga pun, semalam ada kejadian satu di G.Obos, hampir kaya gini masyarakat itu digrebek masyarakat dia katanya sudah nikah, nikah siri di Jawa, jadi tokoh masyarakat datang ke sini jar kita buktikan dia nikah di Jawa tu, buktinya ada gak, semua orang kalau pengakuan itu bisa aja ngaku-ngaku ini A B C bisa ngaku berataan bisa ngaku, tapi buktinya ada lah? Kadang-kadang nikah siri itu ada buktinya mereka, ada diberikan oleh yang menikahkan catatan kertas selambar gitu tapi itu pun secara hukum kada kuat, kadada kekuatan hukum itu.¹⁷³

g) Bagaimana pendapat Bapak tentang hukum nikah siri?

HH menjelaskan:

Ini mohon maaf sekali, kalau menurut aku hukum nikah siri kebanyakan tidak sah, tapi bukan semuanya lah, kebanyakan tidak sah karena rukun dan syaratnya ada yang

¹⁷³*Ibid.*

dilewati atau ada yang tertinggal rukun dan syarat, misalnya walinya, walinya ada di Palangka Raya, dipadah akan abahnya meninggal karena abahnya kada setuju, itu tadi abahnya kada setuju dia nikah siri yang menikahkan ni kalau ada abahnya mungkin gak berani jua menikahkan, dipadah akan abahnya sudah meninggal lah atau abahnya ada di Banjar, Sampit dimana padahal abahnya ada di Palangka Raya, nah itu secara hukum agama kan nikahnya kada sah, abahnya ada, dekat lagi. Itu dinikahkan secara lain walinya gitu kan berarti menyalahi wali kan gitu kan. Jadi nikahnya itu kalau rukun dan syaratnya terpenuhi sahlah nikahnya, tapi yang nikah di bawah tangan atau nikah siri ini kalau menurut aku 80% tidak sah menurut hukum agama.¹⁷⁴

h) Bagaimana dampak dari nikah siri?

HH menjelaskan:

Ya dampaknya yang jelas anak status anak, dua masalah waris mawaris kalau bermasalah, kalau terjadi musibah untuk dapat hak asuransi misal terjadi tabrakan, untuk mendapatkan asuransi susah ngurusnya. Itu antara lain yang jelas yang nampak, belum lagi di masyarakat nanti, di masyarakat yang di apa kaya ada sanksi sosialnya kan, di masyarakat pun pasti ada sanksi sosial karena si A nikah di bawah tangan pasti ada ceberan-ceberan dari masyarakat itu pasti ada ya kan sanksi sosialnya.¹⁷⁵

i) Apakah selama ini pernah diambil tindakan terhadap pelaku nikah siri dan penghulu yang menikahkannya?

HH menjelaskan:

Kalau penghulu dulu pernah kami mengambil tindakan, pernah yang menikahkannya dipanggil penghulunya dulu dan berjanji kan ini bukan penghulu tapi tokoh masyarakat bukan penghulu resmi bukan, dulu kan ada penghulu resmi sekarang penghulu resmi yang P3N sudah di hapus karena ada penghulu fungsional sudah, jadi penghulu fungsional yang berwenang sekarang, penghulu yang anu

¹⁷⁴*Ibid.*

¹⁷⁵*Ibid.*

gak berwenang lagi, paling bisa dia menguruskan berkas membantu dalam pengurusan berkas, dulu ada salah satu tokoh masyarakat yang berani menikahkan itu dipanggil dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, teguran aja secara kekeluargaan aja kan bukan secara surat.¹⁷⁶

- j) Apakah selama ini pernah diberikan penyuluhan hukum tentang nikah siri?

HH menjelaskan:

Kalau penyuluhan secara terprogram memang ada, jadi secara terprogram itu setiap kami melaksanakan akad nikah baik itu di kantor atau di rumah itu pasti kami selipkan masalah nikah siri, dampak dan keburukan dari nikah siri tadi, kemudian kebaikannya apa kan gitu, setiap akad nikah kami selipkan di situ dihimbau kepada masyarakat, keluarganya, tetangganya kalau mau nikah, nikahlah secara resmi karena nikah siri ini banya mudaratnya dari manfaatnya apalagi kalau ada masalah dan kalau ada masalah pun kita konsultasikan ke KUA kami bilang kan, apa masalahnya kalau bisa kita bijaksanai, maka kita bijaksanai kecuali masalah hukum yang kada bisa dibijaksanai mau kada mau kami pun gak berani menikahkannya. Hampir setiap akad nikah pasti. Memang secara yang kaya pembinaan itu dananya gak ada yang secara langsung mengumpulkan orang 30 puluh orang mengumpulkan masyarakat kan gak ada program begitu dananya gak ada gitu palingan kalaunya pun ada palingan dari pihak Kementerian Agama Kota Bimas Islam.¹⁷⁷

- k) Apakah Bapak secara pribadi dapat merekomendasikan pelaksanaan nikah siri tersebut atau tidak?

HH menjelaskan:

Memang secara Undang-Undang kami tidak diperbolehkan melaksanakan, apalagi mehadiri, apalagi memberi rekomendasi nikah siri kan sama saja melegalkan mereka nikah siri kan gitu kan. Mehadiri pun kami tidak

¹⁷⁶*Ibid.*

¹⁷⁷*Ibid.*

dibenarkan apalagi merekomendasikan. Tapi kalau mereka nikah siri kami tutup mata aja gak, terserah mereka kan kalau misalnya mereka melapor ke sini mau nikah, tapi ada halangan nikah secara hukum agama dan Undang-Undang, kami patokannya kan dua Undang-Undang dan Hukum Agama, dua patokan ini, kalau salah satu patokan ada yang tidak bisa dibijaksanai mau kada mau kami tolak nikahnya, nah kami tolak nikahnya ini mereka dengan sendirinya pun pasti dia mencari orang yang berani menikahkan dia, karena apalagi kalau misalnya sudah di masyarakat sudah tersebar bahwa si A sama B mau nikah gak mungkin mereka kan, nah masalah itu kan kita gak bisa melarang tidak bisa memberikan rekomendasi tadi kan. Jangankan itu, kadang-kadang ada yang seseorang yang sudah nikah minta surat keterangan bahwa si A sama B ni mau nikah, jelas kami gak berani sama ja itu melegalkan mereka nikah di bawah tangan yang dulunya kan kalau kami memberikan surat pernyataan kami bilang kalau mau itu cari aja yang bisa karena kadang-kadang mengurus rumah, kredit rumah, mengambil rumah BTN diperlukan orang kan buku nikah, ngutang di Bank diperlukan buku nikah, kredit kendaraan atau mobil atau apa kalau memang suami istri kan dicari orang buku nikahnya, jadi untuk menganukan itu mereka asalkan ada status bahwa nikah sudah nikah gitu kan kalau kami itu merekomendasikan kalau dia memang mau isbat lah ke Pengadilan, kalau sudah terlanjur nikah siri ada keperluan untuk mendapatkan buku nikah isbat ke Pengadilan, nanti Pengadilan itu kalau memang dulunya nikahnya sesuai dengan hukum agama, pasti diisbatkannya, diisbatkannya, nanti kalau sudah putusan, putusannya dibawa ke sini, kami keluarkan buku nikah, itu salah satunya kalau memang sudah terlanjur nikah di bawah tangan.¹⁷⁸

b. Responden Kedua

Nama : AN

Tempat, Tanggal Lahir : Kampung Petani, 15 September 1964

Pendidikan Terakhir : S-1

¹⁷⁸*Ibid.*

Pekerjaan : Penghulu Fungsional KUA Kec. Jekan Raya

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 13 Desember 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya pada pukul 14.30 WIB sampai dengan 15.03 WIB. Fokus permasalahan tentang pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam mengenai sanksi nikah siri diuraikan sebagai berikut:

a) Apa penyebab yang memicu terjadinya nikah siri?

AN menjelaskan:

Penyebabnya itu ada bermacam-macam, yang pertama biasanya kalau masyarakat yang mampu mereka punya uang mampu mereka tidak mau repot berurusan ke kantor kesana kemari, ingin cari enakanya saja, lantas ya mereka melakukan nikah siri, yang *kedua* nikah siri terjadi ini kadang-kadang akibat ulah calo-calo yang mana rupanya di masyarakat calo-calo ini kalau ada yang mau menikah kesempatan bagi mereka, sering mendengar kalau mereka katakan biaya nikah itu di KUA katanya 3 juta setengah. Padahal kalau masyarakat nikah di Kantor Urusan Agama di kecamatan di manapun se Indonesia ini gratis, satu rupiah pun tidak boleh dipungut. Cuma itu tingkah laku calo. Mereka katakan sampai 3 juta setengah atau tiga juta agar mereka dapat uang, itulah yang tersebar di masyarakat sehingga kadang-kadang masyarakat yang kurang mampu mereka takut melaksanakan nikah resmi, takut tidak punya uang 3 juta setengah, sedangkan gaji mereka perhari kan ada yang 50 ribu rupiah berapa puluh hari baru mereka terkumpul sebanya 3 juta setengah. Itu yang penyebabnya juga. Kemudian yang *ketiga* terjadinya nikah siri kadang-kadang itu ada yang takut juga berurusan ke kantor karena juga itu termasuk info yang disampaikan oleh para calo.kadang-kadang calo, Kadang-kadang calonya itu RT juga, nanti kamu kalau berurusan kesana, yang itulah, yang inilah macam-macam nanti yang disuruh diminta macam. Padahal tidak kalau di kantor KUA, kalau mereka datang kesini baru di pintu silahkan masuk ada yang bisa kami bantu? Oh rencana mau

menikah, kalau mau nikah kami tanya bisa baca gak? gak, bisa nulis gak “sini berkasnya” berkasnya kami ambil, semuanya kami ambil cara mengisinya begini, owh tidak bisa nulis? Kami tuliskan sampai berkasnya coba, kami tuliskan. Itu makanya kami tanya bisa baca atau tidak? Kami bantu sepenuhnya. Jadi para Catin (para calon pengantin) tadi hanya tinggal minta tanda tangan RT dan tanda tangan lurah. Itu yang sering disampaikan oleh para calo tadi, biar orang takut berurusan dengan KUA itu banya tu seperti di sini kalau di daerah tu, di jalan Riau, Murjani, Pelabuhan Rambang, di jalan Sulawesi, kalau di Jekan Raya seperti di Mendawai, itu banya setelah mereka tahu sebagian, loh maka gak pake biaya nikah, maka 3 juta setengah katanya. Jadi itulah yang menjadi penyebabnya mereka takut berurusan katanya kalau berurusan yang urusannya terlalu berbelit-belit padahal tidak. Sebenarnya kan kalau persyaratan sudah diisi blangkonya dan kami serahkan dan gratis mapnya pun gratis kalau tidak bisa tadi kami isikan, mereka hanya tinggal minta tanda tangan RT dan Lurah, selesai. Kalau sudah kami lihat perlengkapannya lengkap ya diterima. Kemudian yang ke *empat* juga yang sering banya terjadi nikah siri ini ataupun nikah diam-diam (tersembunyi) itu kadang-kadang karena alasan apa alasan repot, makanya kalau saya istirahat sehari berapa biaya saya, di samping ia repot banya kerja dan banya perhitungannya mereka memang kurang juga berurusan dengan kantor hingga malas dan takutlah sehingga mereka melakukan nikah siri. Padahal nikah siri itu saya ketahui dan yang saya dengar itu ada yang 3 juta setengah padahal tidak punya buku nikah andai mereka nikah di kantor mana sudah kami bantu, mana sudah gratis, dapat buku nikah. Padahal kami aparat dari KUA kami ketahui tapi kadang-kadang apa daya kami. Kadang-kadang tetangga itu, bisa terjadi juga kadang-kadang nikah siri ini seorang suami masih punya istri mau beristri dua, kalau dia mau nikah secara resmi itu sudah tidak bisa kan karena Undang-Undang. Nah sanksi penjara atau sanksi kurungan. Nah itu kalau ingin beristri dua barangkali. Ada juga kadang-kadang bisa terjadi juga nikah siri ini mereka memang sudah pisah lama setahun, dua tahun, tiga tahun, tapi mereka tidak punya akta cerai, akta cerai itu apa? Surat cerai! Sedangkan mereka mau cepat nikah dengan calon yang baru. Kalau menurut Undang-Undang memang wajib ada surat cerai, baru bisa diterima berkasnya dan

dinikahkan. Itu mungkin antara lain, sebenarnya masih banya.¹⁷⁹

- b) Bagaimana dasar hukum yang melarang ataupun yang membolehkan terjadinya nikah siri?

AN menjelaskan:

Ya sebenarnya yang pertama mengenai nikah siri ini sebenarnya sih dalam agama Islam boleh-boleh saja, boleh-boleh saja, karena tidak ada Alquran atau hadis yang melarang, akan tetapi apabila kita lihat dari segi manfaat dan mudaratnya, maka akhirnya sebagian kecil ulama mengatakan nikah siri haram. Ada, kenapa? Ya mudaratnya untuk si anak dan si istri tadi. Tidak sedikit terjadi si suami semena-mena meninggalkan istri. Si istri mau minta pertanggungjawaban mana buktinya dia suamimu? Dan kadang-kadang juga si anak-anak ya ga bisa membuktikan, mana Bapakmu kepada si anak, semaunya, akibatnya terjadinya nikah siri ini seorang istri ini bisa terlantar, si anak terlantar, pendidikannya terlantar, nafkahnya terlantar, itu makannya sebagian ulama ada yang mengatakan haram yang diakibatkan mudaratnya. Tapi sebenarnya menurut agama. Kalau menurut Undang-Undang itu sudah nyata bagi orang yang tidak punya buku nikah apabila anaknya lahir maka dianggap tidak sah. Iya berarti keturunan siapa nanti? Tidak bisa membikin akta kelahiran, untuk apa, pertanggungjawabannya secara Undang-Undang maka akan susah. Demikian.¹⁸⁰

- c) Apakah Bapak pernah mengetahui praktik nikah siri di masyarakat?

AN menjelaskan:

Praktik nikah siri secara langsung, saya lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri, ok memang yang paling dekat ada memang pernah ya satu RT dengan saya disampaikan oleh tetangga, disampaikan oleh keluarganya. Tapi setelah mereka melakukan nikah siri saya ketahui,

¹⁷⁹Wawancara dengan AN (Penghulu Fungsional KUA Kec. Jekan Raya) di KUA Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya pada tanggal 13 Desember 2016.

¹⁸⁰*Ibid.*

saya panggil orang tua si perempuan. Betapa ruginya dunia akhirat bagi putri Bapak nanti bila melaksanakan nikah siri. Tapi ini karena sudah terlanjur nikah siri mohon nanti dilaksanakan, diresmikan pernikahannya yang tadi oleh KUA. Sekarang kalau terlalu repot nanti saya bawa berkas persyaratannya dan tinggal ngisi dibawa ke RT dan kelurah diresmikan oleh KUA, tapi ya kadang-kadang karena ketidak mengertian, karena keacuhan dan tidak mau tau dengan Undang-Undang berlaku, tidak tahu menahu akibat yang akan terjadi nanti, mereka kadang-kadang tetep tidak mau. Sudah diberi fasilitas, sudah di cap namun tetep tidak mau.¹⁸¹

d) Bagaimana kebiasaannya pelaksanaan dari nikah siri tersebut?

AN menjelaskan:

Kebiasaan pelaksanaan nikah siri ini memang itu biasanya mereka mencari tokoh-tokoh agama. Tapi karena sekarang tokoh agama sudah banya yang paham dan mengerti dan kebanyakan sekarang tokoh agama tu kan tidak mau. Jadi kadang-kadang akhirnya sekarang mereka lari kepada ustaz-ustaz yang sebagiannya kurang paham tentang pernikahan. Itu makanya sekarangpun pernikahan yang nikah-nikah siri itu, sangat banya yang diragukan, banya yang diragukan keabsahannya menurut agama. Menurut agama saja sudah diragukan keabsahannya apalagi menurut Undang-Undang sudah nyata tidak sah ya. Kalau dulu memang hampir umumnya tokoh agama tu kiyai-kyai, guru-guru agama mau, kalau sekarang kebanyakan tidak mau. Karena sering terjadi yang seharusnya walinya itu wali hakim. Karena kadang-kadang contohnya si wanita itu non muslim, sedangkan keluarganya tidak ada yang muslim. Berarti satu-satunya walinya yang boleh kalau dia mau menikah hanyalah Kepala Kantor Urusan Agama itu wali hakim. Wali hakim itu adalah Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan mana dia berada, tapi bagi orang guru-guru kadang-kadang tokoh yang tidak mengerti tetap dia laksanakan. Jelas nyata tidak sah menurut agama dan Undang-Undang. Tapi ya sekarang masih ada juga kadang-kadang tokoh-tokoh agama yang mau, tapi kebanyakan sekarang sudah paham, karena sebenarnya kalau memang ada yang mengadu ke pemerintah, ada yang mengadu kepada yang berhak bahwa

¹⁸¹*Ibid.*

dia menikahkan orang dan ada buktinya itu akan kena hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman yang lain-lain banya. Sehingga Sekarang tokoh agama sudah takut, cuma itu sekarang yang maksimal ia ada sebagian kecil karena tergiur kadang-kadang disodorkan orang 3 juta, 4 juta. Demikian kira-kira.¹⁸²

e) Menurut Bapak adakah dasar orang yang nikah siri itu?

AN menjelaskan:

Bagi orang-orang yang nikah siri itu tidak ada pegangan atau selemba kertas perjanjian ataupun yang ditandatangani. Apabila itu ada. Apalagi memakai materai lagi. Disitu ada suami ada istri yang menikahkan berarti menurut Undang-Undang mereka tersebut bisa dituntut karena melaksanakan yang bukan tugasnya, itu menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia kan itu mereka bisa dituntut. Jadi dasar pegangan untuk mereka kalau ada ya bisa menuntut, berarti kan tidak ada dasar pegangan mereka, itu makanya, umpamanya si istri ditelantarkan oleh suami lantas mengadu ke kantor polisi lantas loh kenapa kok menuntut dia kenapa? Itu suami saya atau kadang-kadang umpamanya si suaminya nikah lagi dengan orang lain, dia menuntut balik kepada suaminya anak saya 6 ni, mana buktinya itu suaminya? Kan gak ada. Lantas dia keluarkan catatan-catatan perjanjian-perjanjian mereka kan yang tidak resmi tadi kan ditandatangani oleh suami ditandatangani oleh istri tanda tangani oleh wali, tanda tangani yang menikahkan, berarti itu yang tidak haknya akhirnya mereka dan bisa itulah yang menyeret mereka ke Pengadilan dan ke kantor polisi, karena melaksanakan yang bukan tugasnya. Akhirnya dengan demikian mereka terjerat hukum jadi sebenarnya tidak boleh ada bukti kalau bukti yaitu mereka memberatkan mereka dan akan menjerat mereka ke hukum. Ya demikian.

Ya memang kebanyakan praktik terjadinya nikah siri ini memang tidak ada nya di dalam Alquran dan di dalam hadis. Tidak ada dasarnya. Dan memang hanya sebagian kecil tadi memang dasar hukum Islam itu kan ada quran, hadis, ijma', qiyas, kemudian ya macam-macam, sampai itu 13 macam sampai dengan masalah mursal, sebenarnya kalau kita lihat dari masalah mursalnya kena itu sebenarnya. Mursalnya kan akhirnya kan

¹⁸²*Ibid.*

terlantar istri dan si anak kalau dilihat dari situ sudah bisa tu. Umumnya ditelantarkan. Memang kalau secara tegas dalam Alquran dan hadis memang tidak ada.¹⁸³

- f) Bagaimana seharusnya ketentuan hukum yang berdampak pada efek jera bagi para pelaku serangkaian nikah siri?

AN menjelaskan:

Bagi orang yang melaksanakan ya, yang dinikahkan dan yang menikahkan secara siri menurut Undang-Undang yang berlaku di negara republik Indonesia itu sudah nyata-nyata bertentangan, ya itu sebenarnya itu harus kena hukuman kurungan. Akan tetapi itu sudah ada Undang-Undangnya akan tetapi penerapan Undang-Undang dan hukuman tersebut memang kayanya masih belum terlaksana di Indonesia. Bukan hanya kita di Palangka Raya saja di daerah lain pun demikian. Sebenarnya itu bagi seseorang yang menikahkan yang bukan hak dia, bukan tugas dia ya kena hukuman kurungan, hukuman penjara atau umpamanya kan Kepala KUA dia bukan Kepala KUA, seorang polisi tapi dia bukan seorang polisi melakukan tugasnya itu kena hukuman kurungan. Jadi baik yang dinikahkan maupun yang menikahkan cuman penerapannya sementara dari pemerintahan ya mana sangat lemah. Sebenarnya jika itu diterapkan ya nikah siri ini semakin lama akan semakin hilang. Ya demikian kira-kira.¹⁸⁴

- g) Bagaimana pendapat Bapak tentang hukum nikah siri?

AN menjelaskan:

Nikah siri ini itu hukumnya sah dan boleh saja apabila telah cukup syarat dan rukunnya. Ya dan tidak ada yang menghalangi tentang pernikahan mereka tersebut. Itu sah saja. Akan tetapi ya itu seperti yang saya katakan tadi ada sebagian kecil ulama yang mengatakan walaupun sudah cukup syarat dan rukunnya menurut agama akan tetapi dilihat dari segi mudaratnya maka sebagian kecil ulama mengatakan haram. Karena kata mereka betapa banya

¹⁸³*Ibid.*

¹⁸⁴*Ibid.*

seorang istri kadang-kadang ditinggal oleh suami punya anak 5 punya anak 6 si suami gak bertanggung jawab karena si istri tadi tidak bisa nuntut karena tidak ada buku nikah. Ya yang si anak yang tidak sekolah jadi anak terlantar istri terlantar itulah alasan sebagian kecil ulama di Indonesia yang mengatakan walaupun telah cukup syarat dan rukunnya menurut hukum agama tetap sebagian kecil ulama mengatakan itu tetap mengatakan haram. Dan sebagainya memang harus dilarang karena akibatnya tadi.¹⁸⁵

h) Bagaimana dampak dari nikah siri?

AN menjelaskan:

Dampak dari nikah siri ini sangat jelek sekali. Yang *pertama* itu yang dirugikan adalah istri. Seperti yang tadi katakan tidak jarang istri ditelantarkan sekehegakannya oleh suami. Yang *kedua* anak terlantar, sering ditelantarkan oleh suami yang tidak bertanggung jawab. Yang *ketiga* akhirnya dengan orang-orang yang melakukan nikah siri akhirnya Undang-Undang tentang pernikahan ini seperti diabaikan kaya dilecehkan karena ada Undang-Undang tetapi tidak ditaati, tidak diikuti. Dan kemudian termasuk juga tadi dasar hukum Islam tadi, dari masalah darurat dan mudarat kebanyakan nikah siri lebih banya mudaratnya. Berarti mengabaikan itu juga. Ya itu aja sudah.¹⁸⁶

i) Apakah selama ini pernah diambil tindakan terhadap pelaku nikah siri dan penghulu yang menikahkannya?

AN menjelaskan:

Jadi tentang orang-orang yang melaksanakan nikah siri memang selama ini yang kami tegur langsung belum pernah. Karena memang belum ada juklaknya belum ada Undang-Undangnya untuk kami menerapkan hal tersebut. Sebenarnya ada tapi ya itu tidak terlaksana, sehingga dari semua jenjang yang berkompeten tidak berani. Sebenarnya ada.¹⁸⁷

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ *Ibid.*

- j) Apakah selama ini pernah diberikan penyuluhan hukum tentang nikah siri?

AN menjelaskan:

Jadi tentang nikah siri ini kalau secara resmi memang yang kerja sama dengan pemerintah memang belum pernah. Cuma kami disetiap pernikahan umumnya kami sampaikan. Ada pernikahan, setelah selesai kadang-kadang apabila kami ada pengajian-pengajian atau ceramah itu ada kami sampaikan. Jadi bagaimana akibatnya bagi orang-orang yang melakukan nikah siri? Sehingga kami sampaikan, bagi orang yang menikahkan dan dinikahkan nah itu kena hukuman kurungan, dan ataupun penjara. Itu kami sampaikan juga apa jeleknya, nanti tidak punya buku nikah, anak mau bikin akta kelahiran tidak bisa, mau masuk TK gak bisa, pernah lagi yang saya temui anaknya pintar banar, masuk ke ABRI, sudah lulus, tapi yang lulus cuman, tapi kembali dicek yang terakhir dicek berkasnya, dilihat tidak ada akta nikah atau buku nikah orang tuanya. Sedangkan si Bapakya tadi sudah jual kebun, karena di tengkiling jual kebun jual tanah untuk anaknya, sudah lulus. Akhirnya dengan sebab tidak adanya buku nikah ataupun akta nikah orang tuanya akhirnya tidak lulus, ahirnya si Bapak tadi gila. Yang saya ketahui gila si orangtua gara-gara buku nikah ia gak ada hanya anaknya gagal. Yang satu lagi yang saya ketahui anaknya sudah lulus jadi dokter, dari semua yang terakhir lagi dilihat tidak ada akta kelahiran dan buku nikah orang tuanya. Sedangkan uang sudah habis, anaknya sudah pintar dan bagus, sudah yain, akhirnya Bapakya gila. Dua kali yang saya ketahui.¹⁸⁸

- k) Apakah Bapak secara pribadi dapat merekomendasikan pelaksanaan nikah siri tersebut atau tidak?

AN menjelaskan:

Masalah nikah siri ini memang kalau saya pribadi dan kami dari kantor urusan agama dan juga dari Kementerian Agama se Indonesia sangat, sangat, sangat melarang dan tidak menganjurkan dan sangat tidak menyetujui apabila

¹⁸⁸ *Ibid.*

ada terjadi nikah siri. Karena ya sangat tidak sangat-sangat kami setuju terjadinya pelaksanaan nikah siri. Karena ya akibatnya, untuk akhirnya pun ada dampaknya. Kadang-kadang dia mau naik haji karena buku nikah gak ada susah, sekarang kan apalagi kalau dia mau naik haji suami istri gak ada buku nikah, susah.¹⁸⁹

Selanjutnya peneliti bertanya dengan AN, Apakah Bapak setuju apabila sanksi tentang nikah siri ini diterapkan?

AN menjelaskan:

Mengenai bagi orang yang pelaksanaan nikah siri yaitu ditetapkan sanksi maka kami sangat-sangat menyetujui. Karena yang pertama itu akan mengacaukan administrasi dan mempersulit urusan baik bagi pemerintah maupun bagi mereka yang bersangkutan itu akan kacau dan susah. Sehingga kadang-kadang dalam urusan kami di kantor pun akan repot kadang-kadang sampai berkali-kali minta dibikinkan buku nikah ya kan tidak bisa. Kadang-kadang lagi anaknya mau sekolah mau haji, mau bikin itu. Dan kadang-kadang juga mau kredit mobil buku nikahnya gak ada sehingga kadang-kadang mereka datanglah ke kantor KUA mau minta dikeluarkan buku nikah dan kadang-kadang marah, bahkan kami rugi juga, ya bagaimana kami mau mengeluarkan buku nikah kapan dia nikah kan, kapan? buktinya gak ada, kadang-kadang kami sampaikan mereka boleh aja melaksanakan kalau saat ini matajidun nikah atau isbat nikah. Penetapan nikah disampaikan ke Pengadilan Agama tapi kadang-kadang karena sudah kepepet mana kadang-kadang jangka waktunya mereka mau beli mobil jangka waktunya mereka mau beli tanah, jangka waktunya mereka mau beli toko, kadang-kadang sekarang serba pakai buku nikah. Sudah mepet kadang-kadang mereka hamuk di sini, “Bapak tau gak waktu saya cuman dua hari katanya kan, tolong keluarkan buku nikah saya kasih 6 juta katanya.” Seratus juta pun Bapak kasih kami ini terkait dengan Undang-Undang. Satu rupiah pun kami tidak boleh memungut biaya. Tetapi kalau Bapak sudah memenuhi prosedur, apabila telah lengkap ya jangankan jam kantor, Bapak minta jam 3 malam pun kami layani saya bilang dan kami sampaikan.¹⁹⁰

¹⁸⁹*Ibid.*

¹⁹⁰*Ibid.*

c. Responden Ketiga

Nama : LH
 Tempat, Tanggal Lahir : Handel Baru, 12 Maret 1966
 Pendidikan Terakhir : S-1
 Pekerjaan : Kepala KUA Kec. Sabangau

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 14 Desember 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau pada pukul 10.10 WIB sampai dengan 10.32 WIB. Fokus permasalahan tentang pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam mengenai sanksi nikah siri diuraikan sebagai berikut:

a) Apa penyebab yang memicu terjadinya nikah siri?

LH menjelaskan:

Salah satu di antaranya karena persayaratan mereka tidak lengkap, tata administrasi mereka segala KTP itu dan ini, status mereka bagaimana, ya semua lah. Itu diantaranya. Nah yang kedua mereka ingin cepat-cepat menikah melalui jalan pintas. Tidak mau berurusan kesana kemari akhirnya ngambil itu, tidak mau repot. Ya di antaranya.¹⁹¹

b) Bagaimana dasar hukum yang melarang ataupun yang membolehkan terjadinya nikah siri?

LH menjelaskan:

Kalau dari Islamnya itu kan. Tapi Islam itu sebenarnya ya sudah menjelaskan sesuatu apa itu kan *faktubū*, tulis, catat, nah Islam itu sudah melarang sebenarnya sudah disitu. Itu harus jelas, kita ini kan status suami istri harus jelas.

¹⁹¹Wawancara dengan LH (Kepala KUA Kec. Sebangau) di KUA Kec. Sebangau Kota Palangka Raya pada tanggal 14 Desember 2016.

“Aṭī‘ullaha wa aṭī‘urrasūla wa uli al-amri minkum” itu dasar hukumnya. Kalau saya berpandangan nikah siri itu gak ada, gak boleh, gak bisa. Harus dicatat, wajib dicatat. Jangan coba-coba melayani nikah siri. Kalau kita melayani nikah siri memberi beban terhadap orang. Beban kehidupan terhadap orang yang memberikan solusi yang tidak baik ketika ada kejelasan. Sedangkan kita ini kan mengayomi, melayani, mengarahkan masyarakat itu kaya apa supaya nyaman hidup di dunia dan akhirat. Menengahi kita, bujur aja pang satu sisi nyaman, tapi sisi lain, ketika dia memerlukan sebuah ketentuan hukum apa yang terjadi, tidak bisa. Nih sakit nih, tidak beisi duit, hagak berobat, kada bisa kalau, harus bayar nih, tapi kalau dia punya BPJS, BPJS itu kan syaratnya buku nikah. Artinya kalau orang melaksanakan nikah siri itu carikan jalan solusi yang bukan, penetapan yang gak bagus dong, menjadi beban terhadap orang, banya mudaratnya dari pada manfaatnya. Manfaatnya ya menikah enak aja sementara, tapi begitu nanti berhadapan dengan hukum semuanya kebablasan lo, sekarang orang punya rumah, harus ada status lo. Orang tu lah mau pinjam rumah, tapi anda belum punya istri. Mau mengkredit rumah, anda harus minta ke KUA minta keterangan, bawa surat anda belum pernah nikah (SKBN). Itu belum pernah nikah, kalau tidak, tidak mau mencairkan dananya. Kalau memang status suami istri, kami suami istri Pak ai ada kartu keluarga suami istri Pak ai. Ternyata catatan sipil bisa mengeluarkan nih status suami istri, KTP nikah, status suami istri, ni nama suami, nama istri, nama anaknya ini, tapi ketika berhadapan dengan itu Bank tidak percaya dengan administrasi kependudukan, tapi dia percaya dengan akta nikah seperti suami istri. Artinya harus tu, dicatat tu.¹⁹²

- c) Apakah Bapak pernah mengetahui praktik nikah siri di masyarakat?

LH menjelaskan:

Kalau praktiknya saya tidak mengetahui, cuma saya tau banyak yang melakukan nikah siri itu karena dari beberapa perkara isbat nikah yang diajukan tadi.¹⁹³

¹⁹²*Ibid.*

¹⁹³*Ibid.*

- d) Bagaimana kebiasaannya pelaksanaan dari nikah siri tersebut?

LH menjelaskan:

Saya tidak tau kebiasaannya, yang pasti mereka nikah tidak di KUA dan tidak tercatat.¹⁹⁴

- e) Menurut Bapak adakah dasar orang yang nikah siri itu?

LH menjelaskan:

Yang penting mereka itu mau jalan pintas, gak peduli dengan Undang-Undang perkawinan. Yang penting mereka ya sudah secara Islam sah sudah, ada aturan ya kalau masalah itu kan urusan mereka masing-masing aja. Ketika mereka dihadapkan dengan itu akhirnya ya mau kada mau jua isbat nikah. Jadi itu sekali lagi kalau itu secara Islam rukun dan syaratnya terpenuhi maka sah secara Islam dan tetapi sah secara Islam belum tentu secara Undang-Undang pernikahan, mereka tidak tercatat dan itu akan memberi sebagian akibat kepada mereka tidak memenuhi aturan hukum. Banya kemudaran, banya kekurangan terhadap mereka. Mereka mau bepergian bemalam aja belum tentu tulak itu. Atau ke kampung bisa berkurang karena tidak bisa membuktikan. Itu loh, banya sekali tu. Karena itu bukti diri, identitas diri yang disahkan oleh negara. Itukan, akta nikah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak bisa diganggu gugat disahkan oleh negara Undang-Undang perkawinan.¹⁹⁵

- f) Bagaimana seharusnya ketentuan hukum yang berdampak pada efek jera bagi para pelaku serangkaian nikah siri?

LH menjelaskan:

Harus jelas lah, itu kan yang berwenang nanti itu adalah wakil rakyat. Harus ada tigak-tigak itu tergantung sih, tergantung pemerintah, apakah itu PP ataukah itu memang KMA, atau memang harus Undang-Undang. Kan Undang-Undang sebenarnya harus diperjelas Undang-Undang

¹⁹⁴*Ibid.*

¹⁹⁵*Ibid.*

lebih jelas lagi pasal 1 ayat dua bagian apa, bagian apa harus jelas. Sementara kita kan hanya asumsi-asumsi ini. Ya harus jelas lah. Itu lah kekurangan Undang-Undang kita ini masih banya, jadi ada, cuman pendapat saya harus ada aturannya lebih jelas dan detil yang menjelaskan sanksi kepada pelaksana nikah siri. Baik siapa saja yang terlibat di dalamnya lah, seluruh yang terlibat di dalamnya.¹⁹⁶

g) Bagaimana pendapat Bapak tentang hukum nikah siri?

LH menjelaskan:

Secara Islam yang penting sah tidaknya sebuah posisi pernikahan itu kan ada dua, pandangan secara agama dan pandangan secara Undang-Undang. Yang anda tanya pandangan Undang-Undang atau secara agama? Secara hukum Islam sudah jelas sah ya rukun dan syaratnya asalkan ni, saya tidak bisa mengatakan, Muhammad dan Siti Zainab itu sah atau tidak sah karena saya tidak menyasikan. Tapi itu kalau secara Islam memenuhi syarat, maka sah nikahnya. Tetapi secara Undang-Undang status mereka belum sah, tidak diakui secara Undang-Undang. Makanya itu sebagai awal yang saya jelaskan.¹⁹⁷

h) Bagaimana dampak dari nikah siri?

LH menjelaskan:

Dampaknya antara lain misalnya istri begitu mau melahirkan inya kada bisa meolah BPJS. Mau melahirkan, anaknya melahirkan mau operasi, operasi hanya tidak bisa di Palangka Raya, operasinya harus di Banjarmasin, duit kadada. Kada dioperasi ini anak taruhannya nyawa kan. Maka operasi ae, tapi berhutang. Berapa? 25 juta bayar operasi. Coba umpamanya kalau statusnya adalah nikah yang dicatat. Nikah di kantor gratis, nikah di luar kantor 600. Apa sih 600 katakan aja, 600 bayar di luar jam kantor di luar jam dinas. PP No. 48 tahun 2014 mengatakan itu, maka berapa sih kerugian 600. Maka katakanlah mengurus ini dan itu habishlah sejuta atau 2 juta lah lawan beselamatannya nih, lawan memberi saksi nih, berurusan tanda tangan ini dan itu di Kecamatan, di Kelurahan dan di

¹⁹⁶*Ibid.*

¹⁹⁷*Ibid.*

RT kan. Sudah sempurna, habis nukar baju, habislah 2 juta. Akan tetapi apa, hukum yang menyatakan inya status suami istri yang sah. Makanya BPJS 25 juta itu apa sih. Jawabannya tetap. Itu dari data yang terjadi, makanya mudaratnya itu banya harus jelaskan disitu. Itu kasus lo, terjadi kepastian hukum itu harus dilihat. Belum lagi menikahkan satu sesi satu jam ini sekarang sudah berlaku bagi mereka yang tidak punya akta kelahiran anak maka sekolah akan menolak. Anda harus tahu itu. Saya ini kan merasakan secara langsung karena orang KUA. Karena tampak orang lucu menanyaan itu, pak solusinya apa pak, saya mau naik haji, mau umrah. “pian nikah tahun berapa?” ada lah buku nikah? Kadada.¹⁹⁸

- i) Apakah selama ini pernah diambil tindakan terhadap pelaku nikah siri dan penghulu yang menikahkannya?

LH menjelaskan:

Kalau mengambil tindakan sih enggak ya, tapi memberikan penjelasan memberikan arahan, bimbingan kepada mereka, kita memberikan arahan bimbingan itu kan disaatnya penasihatannya pra nikah bisa. Betapa pentingnya itu kan. Dan kemudian di prosesi pernikahan betapa pentingnya prosesi pernikahan itu dilaksanakan, kemudian juga bisa menyampaikan lewat khutbah jumat bahkan kami ada acara-acara misalnya maulidan, ada ceramahan, itu sering juga, sering disampaikan tentang status betapa wajibnya buku nikah itu. Nah itu tausiahnya ya. Bahkan setiap ada acara misalnya ya kemarin ada acara yang isbat itu, mereka kan sudah status hukum insya Allah jelas nanti. Bagi mereka yang belum, bahkan pengumuman itu tetap ditempel di dinding lo, perundang-undangan yang isbat nikah, itukan pengumuman isbat nikah arahnya kepada yang nikah siri tu, nah itu tetap ada ditempel di dinding. Artinya itu kan memberikan penjelasan, memberikan keterangan. Lah itu lah jawabannya.¹⁹⁹

¹⁹⁸*Ibid.*

¹⁹⁹*Ibid.*

- j) Apakah selama ini pernah diberikan penyuluhan hukum tentang nikah siri?

LH menjelaskan:

Program penyuluhan itu kan setiap kali perkawinan aja, prosesi pernikahan kami sampaikan, itu kan program, artinya apabila nikah kan kita sampaikan, walau tidak yang diprogramkan secara khusus dan misalnya penyuluhan hukum. Gak ada itu, nanti selalu berkesinambungan aja lah.²⁰⁰

- k) Apakah Bapak secara pribadi dapat merekomendasikan pelaksanaan nikah siri tersebut atau tidak?

LH menjelaskan:

Merekomendasikan, secara pribadi. Karena saya ini kan disumpah, dan kami kan KUA. Bukan mentang-mentang disumpah, mentang-mentang ditugaskan kepada Kepala KUA lalu pandangannya kaya itu dari murni pandangannya. Jawabannya tidak. Tidak merekomendasikan. Kalau saya mau menikahkan, semua pernikahan saya laksanakan apa kah nikah siri apakah nikah yang dicatat, nikahkan ke kantor semuanya, ayo berbondong-bondong datang. Tanyaan aja, pernahkan merekomendasikan itu. Tidak pernah, dan saya selalu menolak. Karena saya memikirkan anak dan cucunya sendiri, banya loh kekuatannya yang kurang sekali. Makanya itu, dengan pemikiran itulah maka hukum meletakkan sesuatu agar sesuatu itu jelas.²⁰¹

d. Responden Keempat

Nama : WN

Tempat, Tanggal Lahir : Kota Baru, 15 Oktober 1972

Pendidikan Terakhir : S-1

²⁰⁰*Ibid.*

²⁰¹*Ibid.*

Pekerjaan : Kepala KUA Kec. Rakumpit

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 19 Desember 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit pada pukul 11.00 WIB sampai dengan 11.30 WIB. Fokus permasalahan tentang pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam mengenai sanksi nikah siri diuraikan sebagai berikut:

a) Apa penyebab yang memicu terjadinya nikah siri?

WN menjelaskan:

Penyebabnya karena berbelit-belit, karena kalau nikah di kantor KUA ada persyaratan, katanya yang pertama ada KTP, KK, kemudian, yaitu yang harus ada setatus catin, perjaka atau perawan, duda atau janda, ada foto, itu kan biasanya gak mau susah itu, kalau mau nikah siri itu kan biasanya tidak ada persyaratan ia kan, biasanya nikah di tuan guru langsung dan juga biasanya walinya pun bisa gak benar itu, adaja walinya orang tua. Cuma dia gak mau susah sehingga nikah di tuan guru, walinya langsung tuan guru walinya, padahal itu tidak benar, tu yang pertama lah, dan juga terjadi nikah siri ini biasanya, itu sudah punya bini mau nikah lagi nah dan itu sering terjadi bini yang pertama dia tau dia nikah, padahal jelas statusnya kan dari KUA itu harus jelas, tidak bisa nikah tidak ada izin dari istri perama. Harus ada izin, izinnya pun harus dari Pengadilan, yang menyatakan bahwa istrinya membolehkan dinikah dan ada syarat-syaratnya juga di Pengadilan dan harus ada rekomendasi dari Pengadilan juga. Dan itu juga mereka yang gak mau yang laki-lakinya biasanya kan. Sehingga melakukan nikah siri.²⁰²

b) Bagaimana dasar hukum yang melarang ataupun yang membolehkan terjadinya nikah siri?

WN menjelaskan:

²⁰²Wawancara dengan WN (Kepala KUA Kec. Rakumpit) di KUA Kec. Rakumpit Kota Palangka Raya pada tanggal 19 Desember 2016.

Namun nikah siri inikan nikah secara agama dikatakan nikah siri ini sah secara agama ja bukan secara pemerintahan. Dan juga biasanya nikah siri ni kan biasanya memang dia ada juga syaratnya yang susah secara agama itu kan ada mempelai ada laki-laki calon suami istri, walinya ada, saksinya juga ada, dalam rukun Islam dibolehkan memang tapi kalau secara pemerintahan gak boleh itu, karena kalau terjadi nikah siri itu mengakibatkan ya misalnya dia tidak ada buku nikah dan kalau tidak berbuku nikah otomatis kalau nanti anak yang dilahirkannya anak itu dianggap tidak punya Bapak ya, kalau di catatan sipil kalau gak ada buku nikah, nikah secara siri ja itu anak itu tidak ada ditulis nama Bapaknya, nama ibunya ja biasanya, status anaknya juga tidak pasti jelas.

Ini yang melarang secara hukum negara ja pang ya, kalau yang membolehkan secara hukum Islam ini boleh ja. Tidak ada masalah gimana itulah yang terjadi nanti anak yang dilahirkan status istri itu juga tidak jelas kan. Bukan istri yang memenuhi akta autentiknya ga ada gitu lah kalau ada masalah jadi sulit ya dipertanggungjawabkan apa dia suami istri atau tidak.²⁰³

- c) Apakah Bapak pernah mengetahui praktik nikah siri di masyarakat?

WN menjelaskan:

Dengar-dengar ja biasa pang, kami bila ada nikah siri tidak boleh menghadiri dari pihak KUA itu tidak boleh karena sama aja membolehkan kan padahal gak boleh itu, jadi terserah aja dia mau nikah siri asalkan jangan melibatkan KUA, nah itu aja. Masalahnya kan nanti dia juga kan, kan ngalih masalahnya di masyarakat, kalau dilarang ya sulit, jadi anggaplah kami tutup mata kalau terjadi nikah siri. Dan dia juga yang menanggung akibatnya. Kami ga ada urusan dengan yang nikah siri dia ja. Nah itu masalahnya dia gak mau repot gitu nah gitu ja sebenarnya. Biasanya kan orang yang nikah siri tidak ada KTP dan statusnya juga gak jelas juga kadang dia cerai dan cerainya tidak di Pengadilan, padahal dia nikah di KUA harusnya kan kalau nikah di KUA cerainya harus di Pengadilan. Nah jadi jelas statusnya janda atau duda, tapi kalau tidak ada akta cerai

²⁰³ *Ibid.*

di Pengadilan maka dia tidak bisa nikah di KUA karena itu salah satu persyaratan di KUA harus ada itu kejelasan statusnya, sebagai janda atau duda atau jejak atau perawan. Jelas, nikah di KUA harus jelas. Karena kami tidak melayani nikah kalau tidak jelas harus ada persyaratan-persyaratan yang dilengkapi. Mengakibatkan itu sering gak mau nikah di KUA yang penting asal lengkap berkasnya kami nikahkan, kalau gak lengkap maka kami yang akan jadi susah ya kan kalau dia ada apa-apa misalnya dia janda nikah di KUA bepadah perawan kalau-kalau nanti suaminya datang ya kan belum diceraikan ya kan. Memang sudah diceraikan suaminya tapi gak ada akta cerai dari Pengadilan, ya itu masih bisa dia mengatakan kalau itu suaminya atau istrinya ya kan apa lagi dia sudah cerai secara agama sudah cerai tapi kalau di PA belum memutuskan lagi itu statusnya masih dikatakan masih suami ataupun istri ya.²⁰⁴

- d) Bagaimana kebiasaannya pelaksanaan dari nikah siri tersebut?

WN menjelaskan:

Karena cuma dengar-dengar ja, jadi kada tahu kebiasaan pelaksanaan nikah siri itu. Mungkin dilakukan sesuai rukun dan syarat yang ditentukan oleh agama Islam, mungkin jua kada.²⁰⁵

- e) Menurut Bapak adakah dasar orang yang nikah siri itu?

WN menjelaskan:

Kalau dasarnya tu kadada pang yang membolehkan nikah secara diam-diam atau nikah siri ni. Jadi kadada dasarnya mereka itu. Mungkin karena itu, tidak mau repot berurusan ke KUA mereka itu.²⁰⁶

- f) Bagaimana seharusnya ketentuan hukum yang berdampak pada efek jera bagi para pelaku serangkaian nikah siri?

WN menjelaskan:

²⁰⁴*Ibid.*

²⁰⁵*Ibid.*

²⁰⁶*Ibid.*

Ya ini selama ini tidak ada aturan hukum yang jelas, untuk khususnya di Indonesia masalah nikah siri, itu kalau penghulu ni kan ga ada penghulu kampung, penghulu PPN, namun kalau efek jera kan biasanya penghulu kan dia nikah kan ini dipanggil oleh PA sebagai saksi atau apa, untuk ketentuan hukum efek jera itu gak ada cuman yang itu kan didenda dan sebagainya.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada WN, bagaimana jika Rancangan Undang-Undang tentang denda nikah siri diterapkan?

WN menjelaskan:

Setuju ja karena untuk menertibkan administrasi. Itu pang lemahnya kalau terjadi nikah siri itu. Dari segi agama membolehkan, dari segi pemerintahan dilarang, itu menjadi pemerintah kan gak ada Undang-Undang yang mengatur nikah siri.²⁰⁷

g) Bagaimana pendapat Bapak tentang hukum nikah siri?

WN menjelaskan:

Ni kan hukumnya menurut secara agama Islam itu boleh ja, gak ada cuman semua itu kan lengkap segala syarat rukun nikah itu, itu ada saksinya, ada walinya, ada pengantin, ada saksi dan dua ada wali, jadi nikah itu sudah sah menurut agama. Yang mlarang tidak ada. Sah apalagi walinya yang menikahkan itu syarat rukun nikah kan itu kan kalau sudah lengkap itu sudah sah nikahnya. Namun secara hukum negara itu tidak sah karena tidak tercatat di KUA dampaknya tidak ada kekuatan hukum yang mengatakan dia suami istri secara hukum, di samping dia sah secara agama namun ini ada buktinya. Kalau saksi itu kan gak ada bukti autentik gitu nah. Walaupun secara kalau di nikah siri itu yang mengesahkan bisa ada RTnya itu kan gak kuat juga gak bisa dijadikan kekuatan hukum. Yang dipakai itu yang sah di KUA melalui buku nikah.²⁰⁸

h) Bagaimana dampak dari nikah siri?

²⁰⁷*Ibid.*

²⁰⁸*Ibid.*

WN menjelaskan:

Dampaknya ni kan terutama dia kan tidak ada buku nikah, kalau dia ada buku nikah tidak dikatakan suami istri berdasarkan negara, dan kalau dia punya anak, anaknya pun tidak dikatakan anak dia kan secara negara, kalau secara agama dikatakan anak dia ya anak biologis, tapi tidak bisa dikatakan anak dia oleh negara. Kalau mau bikin akta kelahiran biasanya gak ada nama orang tuanya, kan pernah terjadi dia mau bikin akta kelahiran nama Bapaknya tidak ada, jadi nama ibunya ja, kalau dia mau membuat akta kelahiran itu kan sudah jelas apanya kemudian yang ditanggung oleh anak dia tidak punya Bapak dampaknya disitu ya. Ya waris juga tidak bisa, jelas kalau masalah waris, dia hanya dari ibunya, dari Bapaknya tidak mendapatkan waris, tidak ada Bapaknya secara negara sudah. Namun secara negara tidak bisa. Namun kalau secara agama dia dapat ja. Namun kalau secara negara kalau ke Pengadilan, suaminya menuntut ke Pengadilan anaknya bisa gak dapat warisan.²⁰⁹

- i) Apakah selama ini pernah diambil tindakan terhadap pelaku nikah siri dan penghulu yang menikahkannya?

WN menjelaskan:

Kalau kami di sini gak ada penghulunya masalahnya kan, kalau di sini. Kalau di kota kan ada yang penghulu profesional. Penghulu PPPNnya tuh nah pembantu penghulu namanya. Ini biasanya kalau di kota memang ditegur kan memang dapat teguran. Kalau di KUA Rakumpit belum ada, di Bukit Batu pun gak ada penghulunya, yang menikahkan kepala KUANYA langsung. Ni kan masih wilayah Rakumpit kalau, kami gak ada. Kalau di kota memang ada.²¹⁰

- j) Apakah selama ini pernah diberikan penyuluhan hukum tentang nikah siri?

WN menjelaskan:

²⁰⁹*Ibid.*

²¹⁰*Ibid.*

Kalau penyuluhan sering ja, dampak-dampaknya, kerugian atau dampak negatifnya ni kami sampaikan. Cuma ya tu inya. Seperti pada saat ada akad nikah.²¹¹

- k) Apakah Bapak secara pribadi dapat merekomendasikan pelaksanaan nikah siri tersebut atau tidak?

WN menjelaskan:

Kada wani kami merekomendasikan nikah siri ini. Terserah inya ja. Gak boleh, dilarang kami. Kalaunya ada nikah siri kami gak wani hadir, pandangannya KUA yang jelek. Di sini nikah gak banya juga paling 20. Kalau tahun ni ja 8 ja yang nikah. Pada tahun 2016.²¹²

e. Responden Kelima

Nama : AB

Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 05 Juli 1971

Pendidikan Terakhir : S-1

Pekerjaan : Kepala KUA Kec. Bukit Batu

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 21 Desember 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu pada pukul 11.45 WIB sampai dengan 12.03 WIB. Fokus permasalahan tentang pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam mengenai sanksi nikah siri diuraikan sebagai berikut:

- a) Apa penyebab yang memicu terjadinya nikah siri?

AB menjelaskan:

Penyebab terjadinya nikah siri, yang pertama tidak mendapat restu dari kedua orang tua, padahal nikah itu

²¹¹*Ibid.*

²¹²*Ibid.*

harus izin menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, nikah karena lari iyaan? Terus yang kedua penyebab daripada nikah siri karena hamil duluan, nah itu hamil duluan itu juga menyebabkan dia itu cepat-cepat dinikahkan orang tuanya dengan nikah tidak melalui prosedur yang ada.²¹³

- b) Bagaimana dasar hukum yang melarang ataupun yang membolehkan terjadinya nikah siri?

AB menjelaskan:

Yang melarang nikah siri itu tadi kan hadis, hadis itu hadis mutawatir ya kan, Alquran juga mengatakan di situ. Jadi nikah itu keadaan *mitsaqon gholidzhon* itukan sudah nyata ada perjanjian kita kepada Allah SWT. ada perjanjian kita kepada sesama manusia yaitu tadi nikah itu, nikah itu harus dicatatkan nah sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 bahwa nikah itu harus dicatatkan itukan tidak boleh nikah itu maka hukum itu sudah mengeluarkan hukum itu mulai tahun 1974 bahkan sebelum itu sudah ada Undang-Undang yang mengatur NTCR itu PMA itu ada regulasinya itu nanti sampeyan download aja regulasi peraturan itu yang membolehkan itu pun tidak boleh membolehkan secara penuh yang membolehkan itu sekedar contoh tadi itu ya karena apa, dia hamil duluan, persyaratan tidak terpenuhi. Nah kalau ini teranu semakin besar dan itupun sah kalau yang menikahkan walinya orangtuanya kalau wali muhkam gak boleh apalagi wali hakim, wali hakim sudah ada *sulton*, *sulton* itu pemerintahan di KUA yang diangkat dan disumpah oleh apa namanya oleh pemerintah ya atas nama Menteri Agama dan itu juga ada kasus seperti itu waktu itu Abu Bakar itu sebagai Khalifah itu kan Nabi nyuruh Abu Bakar karena dia sebagai Khalifah disitu nah maka di KUA ini "*assulton waliyyun lima waliyyalahu*" artinya orang yang di angkat dan disumpah dan menjadi wali di tempat situ, 1) bila walinya itu tidak ada terputus dengan *tartibul irasihin* tentunya dengan urutan wali itukan adakan urutan wali itu ada 17 itu kalau tidak memenuhi itu walinya salah juga tidak sah nikah siri itu.²¹⁴

²¹³Wawancara dengan AB (Kepala KUA Kec. Bukit Batu) di KUA Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya pada tanggal 21 Desember 2016.

²¹⁴*Ibid.*

- c) Apakah Bapak pernah mengetahui praktik nikah siri di masyarakat?

AB menjelaskan:

Saya tidak mengetahui ya praktik nikah siri ini, karena saya hanya mendengar informasi saja, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kami mendapatkan informasi kalau mereka yang mau nikah di sini kami tolak karena syaratnya tidak terpenuhi, mereka lari ke Kasongan.²¹⁵

- d) Bagaimana kebiasaannya pelaksanaan dari nikah siri tersebut?

AB menjelaskan:

Tidak tau saya itu kebiasaannya, kalau kebiasaannya nikah siri ya itu cuman dinikahkan gitu aja tanpa ada SUSCATIN bagaimana nanti membina rumah tangga yang baik ya kan, tanggungjawab mereka ya tidak ada paling cuman dinikahkan gitu aja dengan mereka mereka tokoh masyarakat mana memberikan pembekalan mereka dengan benar kalau di sini kan ada SUSCATIN ada imunisasi bagaimana nanti tentang kesehatan ibu dalam saat hamil dan sebagainya.²¹⁶

- e) Bagaimana seharusnya ketentuan hukum yang berdampak pada efek jera bagi para pelaku serangkaian nikah siri?

AB menjelaskan:

Nah ini seharusnya sebenarnya Dewan ya ini bekerja sama dengan Kementerian Agama itu untuk melaksanakan ya kita kan cuma mengawasi. Nah KUA itu mengawasi aja mengawasi ya kan dan di situ kan tidak ada untuk jera hukum tentunya harus ada Undang-Undang apa itu melanggar perdata apakah hukum itu melanggar pidana? Nah, itu harus dijerat dengan aturan hukum, nah selama ini kan belum ada nah belum ada yang memayungi ini nah ini seharusnya Pemerintah memberikan aturan biar tidak

²¹⁵*Ibid.*

²¹⁶*Ibid.*

terjadi nikah siri karena apa nikah siri efeknya banya diantaranya keturunan ahli warisnya yang sah tidak bisa ditunjukan ahli waris yang sah itu berdasarkan apa ya Undang-Undang kependudukan dia harus mempunyai apa akta-akta itu adalah dokumen negara sebagai ahli waris itukan.²¹⁷

f) Bagaimana pendapat Bapak tentang hukum nikah siri?

AB menjelaskan:

Ya menurut saya tadi tidak sah, kenapa sesuai Alquran dan hadis dan Undang-Undang hukum positif yang berlaku. Hukum positif yang berlaku tadi sudah saya sampaikan yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-Undang. Di situ Peradilan Agama nomor 7 tahun 1989.²¹⁸

g) Menurut Bapak adakah dasar orang yang nikah siri itu?

AB menjelaskan:

Tidak ada dasarnya, ngga ada dasarnya itu tu ngawur kalau nikah siri itu, terus dinikahkan ini sudah dapat jodoh seumpamanya harus nikah kan wong sekarang pemerintah sudah mengatur kok di situ kok kenapa dia harus nikah siri, nah itu susahnya di situ karena apa? Di sini sekarang itu orang yang gak punya ya gak bayar orang nikah di sini di kantor ya tidak bayar nah kalau di rumah memang ada PP ya nomor 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, tadi setoran itu.²¹⁹

h) Bagaimana dampak dari nikah siri?

AB menjelaskan:

Banya sekali. *Satu*, dia tidak bisa tanggungjawab penuh kepada istrinya iyaan baik pemberian nafkah dan sebagainya itu seumpamanya papan (tempat tinggal) dan sebagainya itu tidak bisa di buktikan. Nah yang *kedua* itu dampaknya adalah ahli warisnya anaknya bahwa anak

²¹⁷*Ibid.*

²¹⁸*Ibid.*

²¹⁹*Ibid.*

yang sah itu menurut Undang-Undang itu harus nikah sesuai dengan aturan perundang-undangan tapi nikah siri tidak diakui oleh Undang-Undang berarti juga keturunan mereka ahli warisnya juga tanggungjawabnya tidak akan dilaksanakan secara penuh oleh yang menikah secara siri, terutama suami tanggungjawabnya tidak penuh karena apa, tidak dicatat tadi itu kewajibannya tidak bisa ditegur oleh *sulton* oleh pemerintah oleh Pengadilan gak bisa mengarahkan itu.²²⁰

- i) Apakah selama ini pernah diambil tindakan terhadap pelaku nikah siri dan penghulu yang menikahkannya?

AB menjelaskan:

Nah ini kami sering, cuman menegurnya manggil jangan dilakukan ini dampaknya seperti ini ya kan itu, cuma ya untuk melakukan efek jera ngga kita melaporkan ke polisi kalau itu memang ada unsur tipuan nah unsur ada tipuan karena kalau secara administrasi aja itu ada yang menyampaikan itu nikah siri sah, nah itu kalau menurut saya memang tidak sah tapi tidak bisa kita memberikan pelanggaran dengan mereka cuma memberikan teguran dan saran apabila itu penghulu kampung saya pecat itu saya ampihin karena dia sudah melanggar daripada sumpah untuk mengawasi pergaulan nikah yang siri tadi itu. Itu kalau penghulu tentunya yang melaksanakan itu di kasih efek teguran itu karena tidak sesuai dengan sumpah mereka jabatan sebagai penghulu gitukan.²²¹

- j) Apakah selama ini pernah diberikan penyuluhan hukum tentang nikah siri?

AB menjelaskan:

Saya sering baik di majelis pengajian itu ibu-ibu imat atau pun muslimat saya sampaikan tentang nikah siri, nikah siri tidak sah ya nikah siri itu banya efeknya itu tadi diantaranya.²²²

²²⁰*Ibid.*

²²¹*Ibid.*

²²²*Ibid.*

- k) Apakah Bapak secara pribadi dapat merekomendasikan pelaksanaan nikah siri tersebut atau tidak?

AB menjelaskan:

Nah kalau saya merekomendasikan nikah siri berarti saya melanggar hukum karena saya mengawasi di dalam pernikahan bahkan pernikahan yang salah pun saya tegur saya suruh mengulang. Nah itu salah satunya masyarakat melaporkan tentang wali apalagi nikah siri saya bersikuat untuk tidak untuk apa namanya memberikan rekomendasi apapun dengan namanya nikah siri itu yang kami sampaikan.²²³

2. Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya

Hasil wawancara tentang studi pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam tentang sanksi nikah siri dimaksud diuraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan (terlampir), sebagai berikut:

a. Responden Pertama

Nama : SN

Tempat, Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 05 Mei 1962

Pendidikan Terakhir : S-1

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 18 Januari 2017 di Pengadilan Agama Palangka Raya pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 09.22 WIB. Fokus permasalahan tentang

²²³*Ibid.*

pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam mengenai sanksi nikah siri diuraikan sebagai berikut:

a) Apa penyebab yang memicu terjadinya nikah siri?

SN menjelaskan:

Kalau dari pengalaman yang kami hadapi lah, yang dari mengajukan isbat itu diantaranya itu ada yang menikahinya masih belum sampai usia batas pernikahan kan kalau perempuan kan 16 tahun, laki-laki 19. Dia malas mengurus dispensasi nikah, sebenarnya kan bisa, bisa tercatat dengan mengajukan dispensasi nikah akhirnya jalan pintas. Kadang-kadang karena kecelakaan duluan lalu akhirnya ambil jalan pintas lalu nikah siri nah berlanjut kemudian rumah tangganya terus punya anak akhirnya tidak bisa untuk mencatatkan akta kelahirannya, mau kada mau meajukan ke Pengadilan untuk isbat, nah itu salah satunya. Kemudian ada juga yang mengajukan ke sini alasannya tidak punya KTP nah jadi sebenarnya dia sudah melengkapi persyaratan semuanya daftar isian sudah ternyata di antara calon mempelai itu kada punya KTP, nah padahal usia sudah memenuhi. Jadi ada beberapa perkara kemarin itu yang sudah memenuhi syarat baik menurut Undang-Undang ada izin orang tua tapi ternyata dia tidak punya KTP, jadi setelah diusut kenapa tidak dicatatkan. Syaratnya katanya ada yang kurang, apa yang kurang? KTP katanya, nah seharusnya kan itu bisa ditanggulangi oleh aparat desa mungkin surat keterangan penduduk kah! Tetap ternyata KUA tidak mau tau kalau tidak ada KTPnya, jadi tidak bisa tercatat. Menurut KUA itu ada aplikasi yang harus diisi, yang nomor NIK nya itu, nah kalau tanpa itu kada bisa *ter-cover* gitu nah. Nah sama jua dengan segala tempat tanggal lahir saat ini harus dicantumkan itu baru bisa. Nah kemudian ada jua nang nikah siri ini yang poligami liar nah. Harusnya kan inya izin poligami, baru kan nikah lagi. Nah tapi untuk mengambil jalan pintas akhirnya nikah siri, nah itu bisa diajukan ke Pengadilan kemarin itu ada yang poligami seperti itu tapi dihadirkan istri pertamanya, inya setuju kah kada kah waktu dilaksanakan akad nikah itu, kalau inya kada setuju kami kada bisa mensahkan, karena kan kami kada bisa mentolerir pernikahan di luar Pengadilan itu kalau misalnya itu tanpa ada persetujuan, kalau misalnya

istri pertamanya setuju nah baru kami isbatkan. Jadi di antaranya itu penyebab kenapa sampai terjadi nikah siri.²²⁴

- b) Bagaimana dasar hukum yang melarang ataupun yang membolehkan terjadinya nikah siri?

SN menjelaskan:

Kalau masalah dasar hukum positif lah itu sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 itu artinya ketika perkawinan itu dilaksanakan hanya bisa dibuktikan dengan buku nikah nah otomatis kalau misalnya itu tidak dilakukan berarti kan itu sudah melanggar aturan perundang-undangan. Nah kalau yang membolehkan itu saya tidak berani berkomentar karena bukan kapasitas saya, itu kapasitasnya ulama.²²⁵

- c) Apakah Ibu pernah mengetahui praktik nikah siri di masyarakat?

SN menjelaskan:

Tidak pernah. Kaitannya dengan yang tadi, yang nomor 2.²²⁶

- d) Bagaimana kebiasaannya pelaksanaan dari nikah siri tersebut?

SN menjelaskan:

Kan masih ada hubungannya dengan nomor 1 tadi praktik yang kebiasaan pelaksanaan nikah siri tadi kan ada kaitannya dengan yang nomor 1 tadi nah itu tadi bisa karena hamil duluan, mau kada mau harus dilaksanakan, bisa umurnya belum sampai tapi malas mengurus dispensasi tadi, nah bisa poligami liar, bisa jua yang kurang administrasi tadi, tapi ada jua yang waktu aku tugas sebelum di sini lah yang di daerah jauh, itu alasannya itu karena akses ke KUA itu jauh, waktu aku tugas di Muara Teweh, terus di Kapuas, itu kan ada yang jauh di pelosok kalau naik kelotok itu sampai setengah hari nah baru nyampai. Nah itu jadi alasan lain mereka

²²⁴Wawancara dengan SN (Hakim) di Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 18 Januari 2017.

²²⁵*Ibid.*

²²⁶*Ibid.*

nikah siri, jadi mau kada mau terbentur dana, dananya harus carter kelotok dulu, nah lalu kan mendatangi KUA itu jauh, nah sementara mereka dananya kurang, akhirnya lalu melakukan nikah siri itu. Nah setelah punya baru menyadari untuk mencatatkan untuk membikin akta itu terhambat.²²⁷

- e) Menurut Ibu adakah dasar orang yang nikah siri itu?

SN menjelaskan:

Masalahnya saya tidak pernah menyasikan langsung apa yang menyebabkan mereka melakukan nikah siri, apakah karena dasar agama atau dasar ingin mencari jalan pintas, cuma yang terungkap di Pengadilan itu rata-rata karena ketidaktahuan mereka yang tidak tahu masalah administrasi. Menurut mereka, bahwa menurut orang di kampung itu sudah benar maka mereka lakukan. Nah jadi kan ketidaktahuan mereka tentang Undang-Undang yang diterapkan di negara kita ini. Kadang-kadang nikah siri itu lebih besar biayanya, kemarin waktu aku tugas di Buntok, itu di daerah Babai itu, nikah siri sampai menghabiskan jutaan. Nah penghulu liar itu yang menikahkan, itu kan kami melaksanakan isbat kerja sama dengan DUKCAPIL, PEMDA nah itu sampai ribuan perkara, jadi sekali berangkat itu sampai 75 perkara. Sekian banya orang yang dirugikan oleh aparat yang tidak bertanggung jawab, nah jadi sekali sidang itu satu majelis itu bisa 25-30 perkara yang disidangkan. Jadi sebenarnya mereka itu dari segi dana sudah, nah tapi yang ini penghulunya yang liar ini pikir mereka itu penghulu resmi, dipikirnya. Nah jadi itu akhirnya tidak menyetorkan dana itu ke KUA akhirnya mereka tidak punya buku nikah sampai sekian lama tidak dapat-dapat, ada program pemerintah yang menertibkan kependudukan lalu akhirnya mereka kerja sama dengan Pengadilan untuk mengisbatkan itu, jadi diantaranya itu.²²⁸

- f) Bagaimana seharusnya ketentuan hukum yang berdampak pada efek jera bagi para pelaku serangkaian nikah siri?

SN menjelaskan:

²²⁷*Ibid.*

²²⁸*Ibid.*

Kalau menurut saya biar ada efek jera baik itu pelaksana atau yang pelakunya itu kalau ada unsur kesengajaan melakukan nikah siri misalnya lah, orang nih tau hukum, misalnya pegawai negeri kan, kalau mau poligami kan kada bisa, akhirnya lalu nikah siri, nah itu lebih bagus diberi efek jeranya itu dengan hukuman, nah begitu juga dengan penghulunya yang melaksanakan itu. Tapi kalau yang resmi selama ini tidak pernah selama ini orang yang berperkara itu yang isbat itu kada pernah penghulunya yang resmi dari KUA, mesti guru agama di kampung yang menikahkan, jadi nda pernah pegawai resmi dari KUA, karena apabila penghulu resmi atau PPN yang diangkat oleh KUA itu ada sanksi ada sanksi hukum dan ada sanksi administrasi, nah jadi untuk penghulu yang ini sebenarnya bisa dikenakan sanksi. Sebenarnya kita harus menyusun yang tadi kan rancangan itu, pelanggaran-pelanggaran itu, minimal ya ada efek jera lah! Jadi harus menghargai aturan perundang-undangan. Makanya kalau di tempat saya kalau misalnya ada yang mau nikah siri mesti ku beri arahan sebaiknya apa salahnya kalau mengisi formulir apalagi dilaksanakannya sekarang kan mudah dilaksanakan di KUA tanpa biaya, paling biaya administrasi, nah ke belakangnya kan akan susah terhadap anak-anak, ini gak pernah ada baik itu lingkungan keluarga atau di lingkungan tempat tinggal gak pernah ada yang melakukan nikah siri itu. Sebaiknya ada aturan yang mengatur, kami pun mengisbatkan itu akan menelusuri apakah dilakukan dengan kesengajaan kah melanggar Undang-Undang ini atau karena ketidaktahuan atau karena keterbatasan fasilitas atau karena keterbatasan kemampuan dana yang mereka miliki itu kami gali waktu di persidangan. Nah kalau ada unsur kesengajaan maka akan kami tolak. Nah isbat itu tidak selalu dikabulkan, ada yang ditolak dan ada yang dikabulkan. Ada juga yang bukan walinya yang menikahkan ya akhirnya kan harus nikah ulang, jadi tidak semua yang mengajukan isbat itu dikabulkan ada juga yang ditolak.²²⁹

g) Bagaimana pendapat Ibu tentang hukum nikah siri?

SN menjelaskan:

²²⁹*Ibid.*

Kalau hukumnya ini kembali ke pertanyaan sebelumnya tadi ini kapasitasnya ulama yang memberikan fatwa, kalau kami kan otomatis berpatokan kepada Undang-Undang.²³⁰

h) Bagaimana dampak dari nikah siri?

SN menjelaskan:

Dampak nikah siri diantaranya masalah pencatatan untuk anaknya atau untuk bikin akta kelahiran, terus bukti untuk buktinya sendiri, kan buku nikah itu apa-apa diperlukan, misalnya kita berhubungan administrasi, mau pergi haji, umrah, terus mau pinjam uang di Bank itu dicari. Nah kemudian untuk bikin akta kelahiran anak, dalam hal kewarisan ada kaitannya. Kalau misalnya di belakang hari ada permasalahan diantara ahli waris, mengaku anaknya si A misalnya nikah siri dari istri ke-2, nah ada anaknya, sementara istri yang ke-2 tadi tidak mempunyai bukti autentik bahwa dia ada ikatan pernikahan dengan suaminya yang ada itu, untuk menjadi ahli waris kan anaknya tidak bisa membuktikan bahwa dia anaknya si almarhum, karena tidak bisa dibuktikan perkawinan ibunya dengan ayahnya. Jadi akhirnya itu masaah kewarisan nanti tidak bisa menuntut, kalau misalnya ahli warisnya tidak ada masalah, ok ok ja kada jadi soal. Ini misalnya istri pertama dan anak istri pertama tidak mengakui, oh abahku kada pernah menikah lagi. Nah akhirnya kan terzalimi anak dari istri kedua ini, nah itu diantara dampaknya itu tadi. Makanya kita menyarankan supaya nikahnya resmi itu tadi.²³¹

i) Apakah selama ini pernah diberikan penyuluhan hukum tentang nikah siri?

SN menjelaskan:

Penyuluhan kalau dulu sering, di awal-awal KHI itu muncul sering diadakan penyuluhan dan terakhir waktu tahun 2014 aku diminta jadi narasumber di Pulang Pisau, disitu kadada kan Pengadilannya, nah itu dikumpulkan penghulunya/PPN se-Kabupaten Pulang Pisau. Jadi diberitahu jangan sampai paling tidak dia memberikan

²³⁰*Ibid.*

²³¹*Ibid.*

arahan ke masyarakatnya supaya nikahnya tu resmi. Nah, jadi dampak-dampaknya nanti seperti apa kalau misalnya nikah siri. Cuma yang akhir-akhir ini program penyuluhan hukum ini sudah jarang, apakah dianggap itu sudah mengetahui masyarakat keseluruhan? Tapi kalau perkotaan mungkin iya, tapi kalau di daerah biasanya penyuluhan tu untuk ke daerah, daerah-daerah terpencil yang kurang memahami. Kalau kemarin di Pulang Pisau itu PPNnya dikumpulkan, jadi semua PPN. Aku kemarin kada mengerti jua kalau penyuluhan itu sebenarnya yang diberi materi itu penghulu semua, penghulunya laki-laki semua, yang jadi narasumber bebinian. Jadi ya karena kemarin itu ya aku bilang minta maaf ini narasumbernya yang dikirim perempuan, kebetulan yang laki-laki lagi sidang, jadi makalah yang dianu ini diminta mereka. Katanya gak papa yang penting ilmunya itu nah buat diterapkan di daerah masing-masing. Jadi kalau penyuluhan itu dulu sering sejak jadi satu atap dengan Mahkamah Agung itu mulai 2003/2004 itu dulu penyuluhan hukum itu selalu sejak aku tugas di Martapura.²³²

- j) Apakah Ibu secara pribadi dapat merekomendasikan pelaksanaan nikah siri tersebut atau tidak?

SN menjelaskan:

Lebih cenderung tidak kalau aku secara pribadi. Nah ya itu tadi dampaknya banya, ke depannya ke anak-anak, ke administrasi dirinya sendiri, banya dampaknya, mau umrah atau daftar haji ja kada bisa, duit banya sudah. Nah, ini yang banya di Kelampangan, petaninya banya berhasil kan. Mau daftar haji, mau daftar umrah gak bisa. Akhirnya kan ngajukan ke sini, kenapa kemarin tidak resmi, dipikir kalau sudah dinikahkan oleh Modim kah istilah mereka, sudah iya sudah. Nah, ternyata pengen daftar haji gak bisa, kan itu keliatan sudah dampaknya untuk dirinya sendiri, belum ke anaknya lagi. Kalau dulu mungkin ya bisa untuk akta kelahiran anak nembak. Saat ini gak bisa lagi, kalau tidak ada nomor induk kependudukannya gak bisa. Jadi semua, mau bikin SIM gak bisa, itu diliat jua Kartu Keluarga. Nah, bikin Kartu Keluarga bikin KTP juga gak bisa tanpa akta nikah. Sekarang ada keterkaitan semua,

²³²*Ibid.*

makanya DUKCAPIL itu menertibkan kependudukan itu. Mudah-mudahan ke depannya kita warga negara Indonesia ini paham hukum dan mengikuti aturan hukum. Sebenarnya kalau diikuti tidak susah, justru ketika kita melanggar berikutnya akan banya dampaknya. Nah misalnya melakukan nikah siri, ya saat itu ya mereka selesai, tapi di belakangnya macam-macam muncul masalah. Masalah anak, mau kemana-mana dicari buku nikah. Apalagi nginap di hotel, meskipun misalnya resmi suami istri nikah siri, tapi tanpa dibuktikan dengan akta autentik kan orang menganggap bukan suami istri. Nah, jadi banya dampaknya.²³³

b. Responden Kedua

Nama : HMN

Tempat, Tanggal Lahir : Hulu Sungai Utara, 28 Agustus 1966

Pendidikan Terakhir : S-2

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 19 Januari 2017 di Pengadilan Agama Palangka Raya pada pukul 10.00 WIB sampai dengan 10.10 WIB. Fokus permasalahan tentang pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam mengenai sanksi nikah siri diuraikan sebagai berikut:

a) Apa penyebab yang memicu terjadinya nikah siri?

HMN menjelaskan:

Penyebab nikah siri lah, ni yang kami pengalaman kami di sini yang di luar kami kada tahu kan, nah jadi pernah ada yang mengajukan isbat nikah gitu kan, jadi isbat nikah ini sewaktu ditanya kenapa jadi sampai kaya gini, padahal kan bisa ja di kampung lagsung ke KUA, ternyata jawabannya apa, waktu itu pak biayanya mahal katanya, sampai 800 ribuan waktu itu kan diminta, nah jadi kami ga

²³³*Ibid.*

bisa melaksanakan nikah di KUA jadi terpaksa nikah di bawah tangan aja, cuma karena memang pernikahannya tidak ada halangan menurut Undang-Undang kita kan artinya mereka memang sama-sama perjaka sama bujangan, sah-sah jadi bisa, cuma karena itu tadi alasannya kan bisa diisbatkan kemarin itu disahkan. Nah itu yang kita tau di sini lah, kalau masalah di luar kita kada tau kan, ya artinya karena yang isbat ke sini.²³⁴

- b) Bagaimana dasar hukum yang melarang ataupun yang membolehkan terjadinya nikah siri?

HMN menjelaskan:

Kalau melarang bisa kita gunakan pakai Undang-Undang seperti itu kan yang tercatat itu kan, kalau yang membolehkan kami *no comment* lah karena Pengadilan kada boleh mengomentari itu kan, kalau yang meanu jelas Undang-Undang kita kan no. 1 tahun 1974 pasal 2, nah ya itu kan kalau yang melarang itu, kalau yang membolehkan *no comment* kami kan sudah di luar anu kita kan, kalau masalah fikih itu urusan ulama, orang Pengadilan kada boleh mengetahui itu kan itu urusan ulama nantinya kan.²³⁵

- c) Apakah Bapak pernah mengetahui praktik nikah siri di masyarakat?

HMN menjelaskan:

Ya kada pernah, ya kada tau yang di luar kan kecuali yang isbat di sini gitu nah, isbat artinya nikahnya memang tidak ada halangan seperti yang saya jelaskan tadi kan.²³⁶

- d) Bagaimana kebiasaannya pelaksanaan dari nikah siri tersebut?

HMN menjelaskan:

²³⁴Wawancara dengan HMN (Hakim) di Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 19 Januari 2017.

²³⁵*Ibid.*

²³⁶*Ibid.*

Tidak tau jua kami kalau itu kan.²³⁷

- e) Menurut Bapak adakah dasar orang yang nikah siri itu?

HMN menjelaskan:

No comment kami lah, karena kada kewenangan kami mengomentari ini kan, nah karena kena benturan kalau kita mengomentari ini benturan kan dengan ulama, nanti dibilang kenapa Pengadilan kaya gitu kan ngomongnya kita *no comment* ja itu lah, itu ke ulama kan, kalau ulama bisa mengomentari masalah kyini kan, kalau kita Pengadilan kada boleh mengomentari itu, nah nanti jadi dasar orang, kenapa orang Pengadilan kaya gitu ngomongnya kan, apakah kurang belajar fikih gitu kan, kita *no comment* ja jadi tidak mengomentari itu.²³⁸

- f) Bagaimana seharusnya ketentuan hukum yang berdampak pada efek jera bagi para pelaku serangkaian nikah siri?

HMN menjelaskan:

Nah ini kan kita kembali kan ada kemarin ada efek denda apa hukuman itu ada kan yang ngatur itu seperti penghulu yang menikahkan ada kan disitu anunya, mestinya itu harus diterapkan, tapi kalau perlu mungkin direvisi Undang-Undangnya itu ditambah lagi hukumannya, nah denda 7.500 kah yang dulu itu, nah artinya itu ditingkatkan, jadi kan orang lebih perhatian gitu nah kada berani sembarangan nikah siri artinya disitu yang kita tekankan kan, hendaknya sanksinya diperberat itu yang jelas kan ada pasalnya itu tentang sanksi kan bagi si penghulunya atau bagi yang melakukan, nah itu lihat kena di PP ya, itu aja nanti anunya ya, mungkin direvisi PPnya diperberat sanksinya kan, ya artinya mereka lebih perhatian dan kada berani sembarangan nikah siri penghulu itu kada boleh menikahkan kan karena ada sanksi yang berat kalau 7.500 ya kaya apa lah, nah memang harus diperlukan seperti PPnya itu kan.²³⁹

²³⁷*Ibid.*

²³⁸*Ibid.*

²³⁹*Ibid.*

- g) Bagaimana pendapat Bapak tentang hukum nikah siri?

HMN menjelaskan:

Sudah tadi lah sudah kita jelaskan tadi.²⁴⁰

- h) Bagaimana dampak dari nikah siri?

HMN menjelaskan:

Nah kalau dampak nih mungkin dari segi warisan, kemudian dari segi pembuatan akta kan biasanya bermasalah, kan harus isbat ke Pengadilan, itu pun kalau tidak ada halangan menurut Undang-Undang kan, kalau ada halangan gak bisa diisbatkan juga, misalnya karena poligami kan gimana lagi. Dari segi warisan kena, kalau misalkan meninggal suaminya kan mungkin udah punya istri juga atau kayapa kaitu nah. Jar ahli waris yang lain, lain bininya itu. Nah, kan bisa kada dapat inya kita kan berdasarkan fakta yang ada di Pengadilan ini. Kalau menuntut ke Pengadilan mungkin bisa kada dapat akhirnya kan kasiannya jua.²⁴¹

- i) Apakah selama ini pernah diberikan penyuluhan hukum tentang nikah siri?

HMN menjelaskan:

Nah ini bukan kewenangan kami, ini KUA mestinya bukan Pengadilan kan.²⁴²

- j) Apakah Bapak secara pribadi dapat merekomendasikan pelaksanaan nikah siri tersebut atau tidak?

HMN menjelaskan:

Bukan kewenangan kami ini kan masalah rekomendasi. Kami tahu yang maju ke Pengadilan aja kan. Karena kami

²⁴⁰*Ibid.*

²⁴¹*Ibid.*

²⁴²*Ibid.*

orang Pengadilan, nah itu aja mungkin sedikit yang bisa kami berikan komentar gitu kan artinya *no comment*.²⁴³

c. Responden Ketiga

Nama : MRA

Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 09 Februari 1979

Pendidikan Terakhir : S-1

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 20 Januari 2017 di Pengadilan Agama Palangka Raya pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 08.15 WIB. Fokus permasalahan tentang pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam mengenai sanksi nikah siri diuraikan sebagai berikut:

a) Apa penyebab yang memicu terjadinya nikah siri?

MRA menjelaskan:

Nah, salah satunya kemarin ya ini terakhir saya oh minggu lalu minggu lalu ada ini yang saya terkejut memang jadi si perempuan ini pernah bercerai terus dia kenal dengan laki-laki, dia janda berarti ya kenal dengan laki-laki. Si laki-laki sebetulnya pengen nikah resmi di KUA ini alasan waktu di persidangan tapi tidak muncul memang dalam permohonannya setelah si laki-laki pengen ke KUA si perempuan ah jangan dulu malah perempuannya yang gak mau, jadi nikah siri saja dulu kalau nanti kita cocok jadi setelah ketahuan cocok baru disahkan oh ada yang berpikir begitu ya di masyarakat ada yang pola pikirnya seperti itu memandang pernikahan itu dia pengennya jalanin dulu tapi dia nikah siri memang entah motivasinya apa trauma mungkin ya dengan pernikahan sebelumnya ribetnya mau bercerai mungkin kan akhirnya dia punya kesimpulan sendiri seperti itu padahal kan membahayakan dia ya merugikan dia kalau sudah hamil terus laki-laknya bilang

²⁴³*Ibid.*

oh kita gak cocok mati dia sudah kan. Nah dia yang dirugikan cuman alhamdulillah laki-lakinya baik jadi sama-sama ke sini itu yang tapi secara umumnya ya kalau secara umum yang saya tau kalau di wilayah perkotaan sebetulnya sudah mulai jarang karena pengetahuan masyarakat mulai memahami mulai merasakan pentingnya dokumen penting itu ya, sudah mulai sadar hukum, kalau yang di pedesaan itu mungkin faktor pengetahuan mereka, mereka juga kan tidak terlalu membutuhkan dokumen cenderungnya orang masyarakat desa itu kan percaya saling percaya, jadi kaya jual beli apa transaksi apa gak perlu pakai kuitansi. Nah bahkan mungkin pernikahan juga gak perlu ke KUA yang penting sah secara agama nah itu secara umum mungkin seperti itu yang banya terjadi.²⁴⁴

- b) Bagaimana dasar hukum yang melarang ataupun yang membolehkan terjadinya nikah siri?

MRA menjelaskan:

Kalau di Undang-Undangnya itu kan perkawinan harus dicatat nah berarti kan makna kontrarionya kebalikan dari itu kan berarti tidak boleh ya harus itu kan Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) jadi harus dicatatkan jadi maknanya tidak boleh tidak dicatat. Kalau yang membolehkan kalau aturan tidak ada ya kalau aturan pasti arahnya kan untuk keteraturan ya biar tidak serampangan orang-orang kan pasti namanya peraturan ya biar teratur semua kehidupan pasti disuruh bahkan kan di RUU hukum materiel peradilan agama itu kan sudah lebih ditegaskan lagi tapi masih RUU belum bisa diterapkan karena masih RUU.²⁴⁵

- c) Apakah Bapak pernah mengetahui praktik nikah siri di masyarakat?

MRA menjelaskan:

²⁴⁴Wawancara dengan MRA (Hakim) di Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 20 Januari 2017.

²⁴⁵*Ibid.*

Kalau peristiwa waktu nikahnya tidak, mungkin orang di kalangan saya yang saya tau oh dia nikah siri kaya gitu bukan saya yang melihat dia sedang akad nikah begitu.²⁴⁶

- d) Bagaimana kebiasaannya pelaksanaan dari nikah siri tersebut?

MRA menjelaskan:

Saya tidak mengetahui kebiasaan nikah siri tersebut.²⁴⁷

- e) Menurut Bapak adakah dasar orang yang nikah siri itu?

MRA menjelaskan:

Dasarnya apa ya, kalau pernikahan yang kedua mungkin dasarnya mau sembunyi-sembunyi memang kan karena kalau yang itu tapi juga ada yang tadi saya ceritakan ada trauma mungkin ya bisa jadi juga karena faktor dia terikat kontrak kerja yang mengharuskan dilarang menikah kan ada ya jadi mungkin ya dia sudah terima kontrak kerja dengan perusahaan kah atau pabrik atau apa yang salah satu item syaratnya begitu tidak boleh menikah dulu nah tapi dia sudah punya pasangan. Akhirnya kalau dia nikah resmi berarti kan bisa dibatalkan nanti pekerjaannya bisa jadi dia nikah siri.²⁴⁸

- f) Bagaimana seharusnya ketentuan hukum yang berdampak pada efek jera bagi para pelaku serangkaian nikah siri?

MRA menjelaskan:

Kalau menurut saya seharusnya ya diberi efek jera tadi itu harus ada hukuman. Hukuman itu harus ada baik untuk yang melakukan atau yang menikahkan juga menurut saya harus tegas. Kalau tidak ya selalu akan terjadi dan terjadi gak usah nikah siri yang pencurian apa yang kriminal saja sudah jelas ada hukumannya masih banya orang yang melakukan apalagi yang tidak. Kalau tidak memaksa ya sudah, disepelekan aja. Ya saya sangat mendukung RUU tadi ya untuk keteraturan itu sebetulnya kan untuk

²⁴⁶*Ibid.*

²⁴⁷*Ibid.*

²⁴⁸*Ibid.*

manusianya sendiri kan, untuk perempuan itu sendiri, untuk anak-anak mereka, kalau yang laki-laki bisa bebas saja dia kawin sana lari, kawin sini lari selesai gak punya kekuatan apa-apa si perempuan.²⁴⁹

- g) Bagaimana pendapat Bapak tentang hukum nikah siri?

MRA menjelaskan:

Kalau dari kacamata agama sudah sah saja asalkan rukun nikah semua syarat nikah terpenuhi tapi dari sudut pandang hukum positif ya begitu gak boleh.²⁵⁰

- h) Bagaimana dampak dari nikah siri?

MRA menjelaskan:

Dampaknya pasti yang dirugikan perempuan, anaknya itu yang dampaknya karena di mata hukum ya di mata hukum positif dia tidak punya legitimasi sama sekali kan sampai yang terparah mungkin waris juga kan. Nah seandainya dibantah sama orang oh dia bukan anaknya dia harus buktikan berarti harus buktikan bahwa dia anaknya kalau dibantah ya, kalau diakui gak masalah, kalau diakui oh ya memang anaknya dia, mungkin masih bisa, tapi kalau ada bantahan dari pihak keluarga besar ini bukan anaknya berarti dia harus membuktikan bahwa dia anaknya bagaimana kalau kan bukti simpelnya enak ada buku nikah tapi kalau tes DNA apa semua itu kan ya memang itu bisa, cuman kan lebih memberatkan dia. Nah mungkin itu dampak yang paling beratnya kepada anak, tapi kalau dalam apa terhadap istri mungkin terhadap harta gono-gini dia tidak berhak dan banya lainnya, banya lainnya juga merugikan sekali untuk perempuan kalau perempuan yang menguasai hartanya gak masalah. Tapi, mana mungkin kan? Pasti laki-lakinya yang menguasai.²⁵¹

- i) Apakah selama ini pernah diberikan penyuluhan hukum tentang nikah siri?

²⁴⁹*Ibid.*

²⁵⁰*Ibid.*

²⁵¹*Ibid.*

MRA menjelaskan:

Kalau Pengadilan kan tidak bersifat aktif tapi pasif artinya memang PEMDA mungkin kerja sama dengan Pengadilan baru kita bisa jadi narasumber menjadi pembicara di situ bisa seperti di tempat saya dulu sempat saya ada beberapa tempat itu memang dari tapi tetap inisiatif dari PEMDA, penyuluhan hukum lah gitu ya. Jadi ada unsur dari Pengadilan ada Kejaksaan sekaligus tentang tema yang akan disosialisasikan sekaligus di situ apa tentang pertanahan kah, tentang apa dan lain-lain. Jadi ikut di situ juga penyuluhan hukum tadi itu bekerja sama tapi bukan dari PA yang aktif.²⁵²

- j) Apakah Bapak secara pribadi dapat merekomendasikan pelaksanaan nikah siri tersebut atau tidak?

MRA menjelaskan:

Merekomendasikan pelaksanaan nikah siri sudah jelas tadi tidak, karena melihat dampak negatif yang diakibatkan dari nikah siri tersebut.²⁵³

3. Akademisi Hukum Islam

Hasil wawancara tentang studi pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam tentang sanksi nikah siri dimaksud diuraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan (terlampir), sebagai berikut:

a. Responden Pertama

Nama : AS

Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 22 Oktober 1978

Pendidikan Terakhir : S-3

Pekerjaan : Dosen UMP

²⁵²*Ibid.*

²⁵³*Ibid.*

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 01 April 2017 di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 08.20 WIB. Fokus permasalahan tentang pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam mengenai sanksi nikah siri diuraikan sebagai berikut:

a) Apa penyebab yang memicu terjadinya nikah siri?

AS menjelaskan:

Nikah siri itu terjadi karena orang gak mau jujur aja sama istrinya, yain saya itu. Jadi nikah siri itu dalam pandangan saya, saya praktisi agama, terjadi itu karena adanya ketidakjujuran seorang suami terhadap istri. Ini yang dimaknai salah, saya dudukkan dulu makna ya, sir itu artinya tersembunyi. Jadi nikah siri itu artinya nikah yang diam-diam. Aslinya gak apa-apa, tetapi menjadi salah dimaknai, nikah siri dalam perspektif bahasa Indonesia dan nikah siri dalam perspektif bahasa Arab. Nikah siri dalam perspektif bahasa Indonesia dan budaya Indonesia itu nikah yang dilakukan secara diam-diam agar tidak ketahuan istrinya. Padahal nikah siri itu boleh boleh saja. Nikah sir itu perbedaannya dengan nikah yang ada di KUA, aslinya harus jelas juga, bolehkah orang nikah siri Pak? Boleh, karena nikah agama boleh, tetapi menjadi salah perspektif. Nikah siri itu boleh, tidak ada dalil yang mengatakan tidak boleh. Nah, nikah siri dalam perspektif orang Indonesia nikah yang terjadi karena diam-diam. Penyebabnya adalah seorang suami yang ingin cari istri lagi tanpa ketahuan istri yang pertama, itu penyebab yang memicu terjadinya nikah siri. Jadi yang gak benar adalah suaminya, ingat suami itu bukan jenis kelamin, suami itu status. Apakah suami boleh perempuan? Boleh, karena ada orang statusnya ganda, sebagai ibu ia juga sebagai suami, nikah sesama jenis, dan itu haram/tidak boleh. Kemudian nikah siri itu terjadi karena ketidakberanian seorang suami. Sir dan tidak sir atau zahir, itu bukan masalah kata-kata sir atau zahirnya, tetapi perspektif istri terhadap suami dan suami terhadap istri. Sir di Indonesia dijadikan

sebagai alat untuk pelegalan proses terjadinya pernikahan yang disahkan. Itu latar belakangnya, saya pikir begitu.²⁵⁴

- b) Bagaimana dasar hukum yang melarang ataupun yang membolehkan terjadinya nikah siri?

AS menjelaskan:

Kalau saya nikah itu baik siri maupun zahir semuanya boleh. Ada dalil yang mengatakan “*Tazawwaju al-wadūd al-walūda: nikahilah oleh kalian orang yang sangat kalian cintai dan bisa melahirkan banyak anak*” itu dalil itu, hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini sering saya pakai baik dalam nikah zahir maupun nikah siri. Saya membolehkan nikah siri, bahkan dalam dalil Alquran dikatakan “*Fankihū mā ṭābalakum min an-nisā: nikahilah oleh kalian, mašnā: sekaligus dua, wa aš-šulāsa: atau tiga, warubā’: atau empat*”. Di sana ada gak *Faktubū: dan catatlah*? Gak ada ayat itu mengatakan. Dalam Alquran tegas, *Fankihū: nikahilah* bahasanya bukan *catatlah pernikahannya*, itu dalil. Jadi saya membolehkan nikah siri, yang gak boleh itu zina siri atau zina zahir.²⁵⁵

- c) Apakah Bapak sering mengetahui terjadinya nikah siri?

AS menjelaskan:

Sering, bahkan saya sering menjadi saksi nikah siri. Emang dosa? Enggak. Tidak dicatat dalam catatan sipil KUA itu yang disebut nikah siri. Nikah siri dalam perspektif agama itu adalah nikah yang tidak dalam wilayah catatan KUA, itu saja, itu yang disebut nikah siri. Bukan dalam perspektif bahasa Indonesia ya, nikah diam-diam atau nikah di balik tangan istilahnya itu. Dalam lagu ada judulnya “Bubur Abang Bubur Putih” itu nikah Kiyai, sehingga melegalkan, itu yang salah. Jadi sering, saya sering menjadi saksi nikah siri di Palangka Raya. Kemarin di jalan Karakatau, boleh gak Pak saya nikah siri? Boleh, tidak ada melakukan nikah siri. Yang tidak boleh itu zina siri apalagi zina zahir. Lingkaran luar/lokalisasi itu namanya

²⁵⁴Wawancara dengan AS (Dosen) di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya pada tanggal 01 April 2017.

²⁵⁵*Ibid.*

zina zahir, zina siri yaitu zina melalui online, lalu terjadi transaksi di situ.²⁵⁶

d) Dimana tempat pelaksanaan nikah siri?

AS menjelaskan:

Tidak ada bedanya antara tempat pelaksanaan nikah siri dengan nikah zahir aslinya. Tetapi terjadi mal praktik dalam pelaksanaan nikah siri, orang nikah siri itu tempat yang tersembunyi yang tidak diketahui banya orang, rukunnya aja mulai kacau, saksinya ngaco, walinya ngaco kadang-kadang itu. Jadi dimana tempat pelaksanaan nikah siri? Kita bicara pespektif Indonesia ini ya yang ngaco, nikah siri itu dilakukan di tempat yang tidak banya diketahui orang, itu masalahnya. Jadi pelaksanaan nikah siri di tempat yang tidak banya dilakukan orang dan sepi publikasi. Makanya kenapa nikah itu harus diwalimahi, biar orang tau. Emang jeleknya nikah siri di Indonesia itu begitu.²⁵⁷

e) Siapa biasanya yang menikahkan orang yang nikah siri?

AS menjelaskan:

Ada tiga golongan biasanya, pertama Kiyai, yang kedua Wali yang mau jalan pintas, maksudnya cewenya udah ok aja lah, yang penting walinya sendiri mau, Bapaknya atau Pamannya. Yang ketiga yang paling parah oknum KUA. Tapi yang paling sering itu yang pertama, guru atau Kiyainya. Siapa? Termasuk saya Kiyainya, saya sering menikahkan orang nikah siri, terus itu masalah? Enggak, gak ada masalah, tinggal catat, bawa catatannya ke KUA, selesai.²⁵⁸

f) Siapa yang mencatat terjadinya peristiwa nikah siri?

AS menjelaskan:

²⁵⁶*Ibid.*

²⁵⁷*Ibid.*

²⁵⁸*Ibid.*

Yang namanya nikah siri ya gak ada catatan, dia dicatat tidak resmi, catat aja. Jadi yang mencatat itu adalah ya orang yang menikah itu. Yang namanya nikah siri itu sepi dari catatan, gak ada catatan. Tapi kalau ada hanya orang-orang tersebut saja, laki-laki perempuannya dengan saksinya aja, dan itu formalitas yang gak jelas juga. Saya gak pernah tuh punya catatan.²⁵⁹

- g) Bagaimana bentuk redaksi dalam surat pernikahan siri?

AS menjelaskan:

Redaksinya: Pada hari ini, tanggal berapa? Tahun berapa? Saya Icikiwir misalnya namanya bin Icikiwur menikahi Ickewer binti Icikiwiri dengan mas kawin 3,2 gram emas. Udah, pakai materai. Kadang-kadang hanya begitu nikah siri yang saya amati, itu redaksinya begitu. Gak kaya di KUA kan bagus gitu, tapi catatan buat anda nikah siri itu justru nikah yang tanpa catatan biar tidak terekam, padahal nikah siri itu sejatinya nikah agama. Tapi mengalami kerusakan makna, ya rusak maknanya.²⁶⁰

- h) Bagaimana pandangan Bapak terkait sanksi nikah siri?

AS menjelaskan:

Gak bisa dong, anda enak aja mensanksi orang. Nikah siri itu tidak masuk dalam pidana, buktikan pada saya kalau nikah siri itu masuk dalam pidana pasal berapa ayat berapa? Gak boleh mensanksi orang yang nikah siri.²⁶¹

- i) Bagaimana akibat hukum dari nikah siri?

AS menjelaskan:

Ya gak ada akibatnya, kalau dalam hukum agama gak ada, cuma satu akibatnya dalam perspektif hukum positif orang yang nikah siri itu secara kekuatan hukum dia tidak mendapatkan bagian karena tidak legal, dia tidak kebagian warisan gitu aja.²⁶²

²⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁰ *Ibid.*

²⁶¹ *Ibid.*

²⁶² *Ibid.*

- j) Bagaimana seharusnya ketentuan hukum yang berdampak pada efek jera bagi para pelaku serangkaian nikah siri?

AS menjelaskan:

Sanksi sosial aja, orang yang nikah siri itu sanksi sosial. Jadi sanksi efek jeranya itu hanya sanksi sosial.²⁶³

- k) Apakah Bapak secara pribadi dapat merekomendasikan pelaksanaan nikah siri tersebut atau tidak?

AS menjelaskan:

Enggak, saya selaku akademisi hukum Islam tidak merekomendasikan nikah siri, karena nikah siri itu kalau orang yang berjiwa agama baik, orang akan meninggalkan nikah siri, tapi akan mengatakan nikah zahiri dengan walimah agar semua orang tau. Ngapain sih nikah siri? Nikah zahir aja biar tau orang, nanti kalau nikah siri saat jalan, siapa itu? Ini pembantuku, padahal istrinya. Alasan saya adalah orang yang nikah siri itu perspektif orang Indonesia adalah penuh kepalsuan. Zahir saja, gak apa-apa. Gitu ya.²⁶⁴

b. Responden Kedua

Nama : ESS

Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 01 September 1964

Pendidikan Terakhir : S-2

Pekerjaan : Dosen UMP

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 01 April 2017 di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya pada pukul 08.25 WIB sampai dengan 08.45 WIB. Fokus permasalahan tentang

²⁶³*Ibid.*

²⁶⁴*Ibid.*

pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam mengenai sanksi nikah siri diuraikan sebagai berikut:

a) Apa penyebab yang memicu terjadinya nikah siri?

ESS menjelaskan:

Penyebabnya pada umumnya itu biasanya seseorang melakukan nikah siri itu: *Pertama*, adanya ketidakcocokan, 50% tidak ada kecocokan sama keluarga, *Kedua*, takut kalau hartanya nanti mau terbagi setelah dia melakukan misalkan nikah beneran, misalkan nih biasanya kan kalau misalkan harta bersama itu harta yang didapat setelah A dan B itu menikah. Kalau misalkan setelah menikah itu menghasilkan harta, itu namanya harta bersama. Tapi kalau misalkan sebelum menikah sudah punya rumah, sudah punya mobil, habis itu nikah, itu misalkan nanti bercerai itu tidak dinamakan harta gono gini atau bukan harta bersama ya harta milik pribadi. Jadi nikah siri itu dilakukan biasanya itu takut kalau harta terbagi.²⁶⁵

b) Bagaimana dasar hukum yang melarang ataupun yang membolehkan terjadinya nikah siri?

ESS menjelaskan:

Kalau dasar hukum yang melarang kayanya gak ada. Kalau yang membolehkan adalah ya seseorang yang mau melakukan. Sebenarnya kan tidak dianjurkan. Nikah siri dinilai masyarakat sah menurut agama, tetapi kalau misalkan menurut Undang-Undang sendiri orang menikah itu kan harus ada hitam di atas putih atau pengesahan dari yang ditunjuk.²⁶⁶

c) Apakah Ibu sering mengetahui terjadinya nikah siri?

ESS menjelaskan:

²⁶⁵Wawancara dengan ESS (Dosen) di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya pada tanggal 01 April 2017.

²⁶⁶*Ibid.*

Tidak sering tapi ada beberapa yang saya ketahui, sekedar tau aja. Sebenarnya nikah siri itu ya gak salah yang penting sah kan? Sah menurut agama. Tetapi tidak sah menurut pemerintah. Tuntutan seorang istri yang baik, biasanya kalau istri yang baik, dia minta dinikahi yang sah karena 99% itu kalau nikah siri yang dirugikan adalah seorang perempuan.²⁶⁷

- d) Dimana tempat pelaksanaan nikah siri?

ESS menjelaskan:

Tempatnya tergantung, ada di rumah, ada di musala, di masjid, dan di suatu tempat yang mungkin sudah memang dia ingin melakukan itu, kadang-kadang kan pengen tanpa diketahui orang banya. Yang penting pokoknya kita tahu bahwa kita dan Allah yang tahu kita melaksanakan nikah siri. Kan tidak ada pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan sebagainya.²⁶⁸

- e) Siapa biasanya yang menikahkan orang yang nikah siri?

ESS menjelaskan:

Tokoh agama, dan mungkin orang yang ditunjuk yang bersangkutan mau melakukan nikah sebagai yang berhak atau yang sudah mempunyai pakar ke-Islaman bisa juga menurut yang mau melakukan itu.²⁶⁹

- f) Siapa yang mencatat terjadinya peristiwa nikah siri?

ESS menjelaskan:

Yang mencatat biasanya adalah orang yang ada dalam pelaksanaan nikah siri itu.²⁷⁰

- g) Bagaimana bentuk redaksi dalam surat pernikahan siri?

ESS menjelaskan:

²⁶⁷ *Ibid.*

²⁶⁸ *Ibid.*

²⁶⁹ *Ibid.*

²⁷⁰ *Ibid.*

Redaksinya saya tidak tahu, karena saya tidak pernah melihat secara langsung pernikahan siri itu.²⁷¹

h) Bagaimana pandangan Ibu terkait sanksi nikah siri?

ESS menjelaskan:

Kalau misalkan sanksinya kan tergantung yang bersangkutan. Sebetulnya nikah siri itu seorang laki-laki biasanya melaksanakan itu belum ada izin dari seorang perempuan. Itu kan sebetulnya untuk menghindari zina, tetapi dia mengklaim menurut agama sudah sah. Untuk menghindari fitnah dari lingkungan aja itu sebetulnya. Tapi kalau saya pribadi tidak setuju dengan adanya nikah siri itu, akan bermunculan nikah siri yang tanpa sepengetahuan istrinya, dan benar-benar yang dirugikan adalah istri. Kadang-kadang memang, ya namanya orang nikah itu kan katanya berlandaskan suka sama suka, tapi tidak harus suka sama suka, kadang-kadang karena materi itu juga dia melakukan seperti itu. Pandangan saya ya itu saya benar-benar tidak setuju.²⁷²

i) Bagaimana akibat hukum dari nikah siri?

ESS menjelaskan:

Akibat hukumnya itu di lingkungan masyarakat akan mesti kurang baik. Kemudian terhadap mental anak, biasanya itu adalah mental, pertumbuhan mental anak. Istri juga seperti itu. Kemudian kalau misalkan nikah siri, si istri yang dinikahi siri itu tidak berhak meminta waris kecuali kalau memang dikasih sama suami. Kalau suaminya dituntut gak bisa juga karena gak ada dasarnya, kecuali ada hitam di atas putih.²⁷³

j) Bagaimana seharusnya ketentuan hukum yang berdampak pada efek jera bagi para pelaku serangkaian nikah siri?

ESS menjelaskan:

²⁷¹*Ibid.*

²⁷²*Ibid.*

²⁷³*Ibid.*

Undang-Undang perkawinan tahun 1974 itu mengatakan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan. Kalau tidak dilaksanakan itu melanggar Undang-Undang. Kalau ketentuan hukumnya misalnya denda kaya yang di RUU nikah siri itu, nah ini misalkan orang mampu untuk membayarnya, nanti kan tetap banya yang melakukan nikah siri. Kecuali di hukum mati, tidak mungkin ada yang melakukan. Tapi kalau hanya di denda misalnya 10 juta, bagi orang yang mampu, dia akan melakukan nikah siri. Jadi sebaiknya dipidana yang memberatkan pelaku supaya tidak akan terjadi nikah siri.²⁷⁴

- k) Apakah Ibu secara pribadi dapat merekomendasikan pelaksanaan nikah siri tersebut atau tidak?

ESS menjelaskan:

Tidak, alasannya seperti yang saya uraikan tadi, banya dampaknya, baik itu untuk pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan untuk lingkungan.²⁷⁵

c. Responden Ketiga

Nama : AD

Tempat, Tanggal Lahir : Terusan Tengah, 07 Juli 1982

Pendidikan Terakhir : S-3

Pekerjaan : Dosen IAIN Palangka Raya

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 10 April 2017 di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada pukul 09.27 WIB sampai dengan 09.53 WIB. Fokus permasalahan tentang pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam mengenai sanksi nikah siri diuraikan sebagai berikut:

²⁷⁴*Ibid.*

²⁷⁵*Ibid.*

a) Apa penyebab yang memicu terjadinya nikah siri?

AD menjelaskan:

Saya sebut langsung: 1) Karena memang selingkuh, 2) Ada *marry by accident*, kalau bahasa kita itu GBHN (Gawi Bedahulu Hanyar Nikah). Nikahnya tu kada di KUA tapi nikahnya melalui tokoh-tokoh agama atau semi tokoh agama, nah ini yang berbahaya. Sekarang semua tokoh tidak boleh menikahkan, harus ada penghulu yang menyasikan, yang melihat dan langsung menikahkan. Ini salah satu salah dua dari pemicu terjadinya nikah siri. 3) Kalau dilihat dari sisi pihak perempuan ya boleh jadi karena terhentinya poligami, nah ini bagi yang sudah menikah, karena si suami tidak boleh poligami maka siri itu lah solusi yang paling nikmat, murah dan tidak ada konsekuensi hukumnya. Dan adalah kenapa ini bisa terjadi? Karena regulasi kita memang belum mematok harga mati apa sanksi nikah siri. Nah ini yang menarik, sehingga orang bebas melakukan nikah siri. Ini tentu nikah siri yang nakal ya, bukan nikah siri yang positif. Saya itu mengkalkulasi ada nikah siri yang negatif dan ada yang positif, ada nikah siri yang baik ada nikah siri yang tidak baik. Nikah siri dalam konteks Indonesia sebenarnya pernikahan yang tidak tercatat saja, tapi syarat dan rukunnya tetap terpenuhi.²⁷⁶

b) Bagaimana dasar hukum yang melarang ataupun yang membolehkan terjadinya nikah siri?

AD menjelaskan:

Nikah siri itu kita kembali ke ontologi dari nikah siri. Nikah siri itu kalau dari sisi hukum tidak diperkenankan karena pernikahan di Indonesia ini harus tercatat, nah nikah siri itu tidak tercatat, artinya sah secara agama namun tidak sah secara hukum yang ada terutama di Indonesia. Jadi kalau mencek dasar hukum secara normatif Undang-Undang hukum positifnya saya pikir sudah jelas di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kalau berkaitan dengan hukum fikihnya saya pikir banya hadis yang berbicara tentang pentingnya *walimatul ursy*,

²⁷⁶Wawancara dengan AD (Dosen) di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada tanggal 10 April 2017.

pentingnya walimah. Jadi pernikahan itu harus disebarluaskan, diumumkan, jangan disirikan, siri itu artinya disembunyikan. Ya menikah siri terminologi siri itu sebenarnya dalam Imam Malik, menurut Imam Malik itu adalah pernikahan yang sebenarnya tidak cukup syarat dan rukun gitu. Nah, ini mengalami perluasan makna dalam konteks kekinian, kalau kekinian itu yang namanya siri itu hanya terbatas karena tidak dicatat, kalau sesuai syarat dan rukunnya maka gak apa-apa gitu. Karena yang terpenting itu justru rukun dan syaratnya bukan dicatatnya, dicatatnya itu hanya sebagai bentuk menertibkan. Bukan berarti yang tidak dicatat itu kemudian tidak tertib, sebenarnya memang berpeluang tidak tertib, tapi itu tidak melanggar ajaran agama. Ini yang paling penting, ini dulu. Coba, bagaimana mungkin pernikahan itu yang syarat dan rukunnya sudah diatur oleh agama kemudian bisa direduksi oleh peraturan perundang-undangan. Sekarang syarat rukunnya tidak tepat, tapi dicatat apakah itu juga bagus? Kan juga gak sah pernikahan itu. Nah sekarang dalam konteks sahnya ini dulu yang perlu dikaji yang perlu dipertegas. Nah, bagaimana perkawinan yang sah itu? Ya perkawinan yang mengikuti syarat dan rukun perkawinan, saya berprinsip gitu. Gak mungkin hukum agama bisa direduksi oleh hukum negara itu gak mungkin, gak ada ceritanya. Kalau hukum negara direduksi oleh hukum agama itu boleh karena hukum agama lebih duluan. Jadi beda semangatnya ya, semangat dalam Undang-Undang perkawinan tentang pencatatan nikah itu hanya dalam rangka mencoba menata. Jadi sahnya dalam konteks menata bukan sah secara agama sesuai dengan syarat dan rukunnya.²⁷⁷

c) Apakah Bapak sering mengetahui terjadinya nikah siri?

AD menjelaskan:

Ya sering, saya di Surabaya di Kapuas sering. Di Surabaya bahkan banya sekali nikah siri, saya menemukan 59 kasus nikah siri dari pernikahan 120 pelaku, saya menemukan 59 pernikahan siri di Kota Surabaya. Jadi ini adalah tren budaya struktur masyarakat migran atau masyarakat perkotaan yang berbagai motif ya, kemudian melakukan itu, termasuk merekayasa hukum supaya terkesan halal. Saya tidak menyasikan secara langsung, tapi saya melalui

²⁷⁷*Ibid.*

hasil review cek langsung dengan orangnya, bertanya langsung dengan pengamal dari nikah siri, 59 itu saya dapat dan memang mereka mengakui “Ya saya nikah siri”, kemudian saya melihat foto-fotonya. Tapi kalau melihat secara langsung itu tidak.²⁷⁸

d) Dimana tempat pelaksanaan nikah siri?

AD menjelaskan:

Ya, pelaksanaan nikah siri sebenarnya juga sama seperti pernikahan pada umumnya, tapi yang jelas tidak di KUA. Di pondok, ya di rumah, di kos-kosan, di tokoh-tokoh agama, di masjid ada saja. Tapi yang membedakan bukan tempatnya yang paling krusial tapi syarat dan rukunnya tadi.²⁷⁹

e) Siapa biasanya yang menikahkan orang yang nikah siri?

AD menjelaskan:

Biasanya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan kadang orang tuanya juga. Bahkan yang paling parah itu Kiyai-Kiyaian, nah itu apa namanya tokoh-tokohan, orang-orang tertentu.²⁸⁰

f) Siapa yang mencatat terjadinya peristiwa nikah siri?

AD menjelaskan:

Biasanya ada saksi-saksi, saksi atau keluarga, bahkan penghulunya tadi. Sebetulnya penghulu sudah gak boleh, oknum penghulu saya sebutkan, atau oknum tokoh. Ya ada catatan sih, tapi tidak teregister di dalam berita acara pemeriksaan perkawinan tidak tercatat di buku register.²⁸¹

g) Bagaimana bentuk redaksi dalam surat pernikahan siri?

AD menjelaskan:

²⁷⁸*Ibid.*

²⁷⁹*Ibid.*

²⁸⁰*Ibid.*

²⁸¹*Ibid.*

Ini yang saya tidak tahu. Setahu saya mungkin di situ dicatat seperti berita acara gitu, Pada hari ini telah menikah antara si pihak-pihak gitu saja. Dia tidak mengikuti formulir resmi, tidak mengikuti formulir resmi seperti yang ada di negara, hanya sebagai bukti bahwa sudah ada pernikahan gitu aja, dan itu tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat oleh petugas yang berwenang tidak di stempel dan tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.²⁸²

h) Bagaimana pandangan Bapak terkait sanksi nikah siri?

AD menjelaskan:

Sanksi perdata berupa sanksi administratif, yang kedua sanksi pidana bahkan bisa sampai dikurung. Oke saya sepakat saja itu, kenapa tidak? Karena pernikahan siri ini memang berpotensi untuk terjadinya kriminalitas, hilangnya tanggung jawab, bahkan lari dari tanggung jawab. Nah, kalau sudah lari dari tanggung jawab, maka pihak yang paling dirugikan itu adalah pihak perempuan. Nah, ini kalau tidak ada sanksinya, maka pihak perempuan akan menjadi rugi, banya hal itu, rugi ekonomi, rugi awak, rugi zahir, rugi batin, dan nambah beban, anak misalnya nah ini mau dikemanakan. Pertanyaannya si ibu gimana? Yang gimana lagi ini? Padahal kalau si anak tidak memiliki orang tua, apalagi sekarang sudah terkoneksi kemana-mana, sekolah misalnya harus punya akta kelahiran, nah bikin akta kelahiran itu harus ada akta nikah, nah sekarang gimana mau akta nikah orang ini pernikahannya secara siri, maka banya sekali yang dirugikan. Saya pikir sanksi dengan denda dengan 12 juta dan kriminal saya pikir cocok itu dalam rangka membantu pemerintah agar orang-orang bisa tertib. Kalau dia melanggar syarat dan rukun agamanya ini yang harus jauh lebih berat hukumannya karena ini sudah dihukumi zina. Kalau ini sudah dihukumi zina, apa hukuman zina? Ini orang tua bisa melaporkan, yang bersangkutan juga bisa melaporkan. Jadi zina ini, berat ini, kan syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sah pernikahan itu, kalau pernikahan itu tidak sah berarti pernikahan apa? Bukan pernikahan, berarti itu perzinahan. Nah ini banya dikamufase oleh orang-orang dengan nikah siri ini sebagai *back up* gitu ya, bahwa agama membolehkan.

²⁸²*Ibid.*

Padahal ajaran Islam membolehkan siri dalam konteks yang boleh itu adalah benar-benar pernikahan yang dilakukan atas syarat sah dan rukun yang benar-benar tepat dilakukan, hanya karena keterbatasan itu tidak tercatat saja. Nah itu, bukan untuk direkayasa kemudian dijadikan alasan untuk siri itu boleh, padahal itu hanya untuk menutup-nutupi, nah ini yang tidak diperbolehkan.²⁸³

Kemudian penulis bertanya, biasanya ada orang yang membantah apa dasarnya orang nikah disanksi? Nah itu bagaimana?

AD menjelaskan:

Ya, memang agak unik, perkawinan malah dihukum. Alasannya adalah akibat hukum dari pernikahan yang tidak jelas ini yang menjadi ilatnya kenapa kita harus memberikan sanksi kepada mereka. Jadi ingat, bukan kepada perkawinannya, tapi akibat efek yang dihasilkan dari pernikahan yang siri yang tidak sesuai syarat dan rukun, kemudian tidak ada akibat hukum. Nah ini yang kemudian perlu disanksi. Tidak harus kriminal memang, tidak harus pidana, sanksi-sanksi sosial boleh lah, tapi harus disanksi, entah itu denda atau sanksi-sanksi sosial suruh lari keliling lapangan misalnya kaya gitu kan, itu sekarang jauh lebih efektif, ditulis saya nikah siri tidak tanggung jawab, terus keliling lapangan, masyarakat dan lurahnya ngawal. Itu jauh lebih malu daripada disanksi duit, habis tu besoknya siri lagi. Kalau duitnya banya, ah emang gue pikirin 12 juta mah untuk *long time* sudah selesai. Kalau sudah seperti itu ya kenapa tidak ke PSK saja menikahnya gitu.²⁸⁴

i) Bagaimana akibat hukum dari nikah siri?

AD menjelaskan:

Itu tadi yang saya sampaikan, nikah siri akibat hukumnya tidak memiliki kekuatan hukum kepada siapapun. Jadi kalau suami meninggalkan dari sisi normatif dia tidak ada tanggung jawab hukum, tidak ada konsekuensi hukum. Tapi kalau dari sisi agama dia syarat dan rukunnya

²⁸³ *Ibid.*

²⁸⁴ *Ibid.*

terpenuhi, sebenarnya tetap memiliki akibat hukum. Tapi karena tidak ada alat dan bukti bahwa dia sudah menikah, dan bukti yang sah itu adalah akta autentik yang namanya akta nikah, maka ini juga tidak memiliki kekuatan hukum juga, sehingga terjadi ya itulah yang saya katakan bisa diantara dua pihak itu saling mendapatkan kerugian, intinya sangat mudarat sekali. Dampaknya juga pada hak perdata lainnya, hak waris, hak asuh, akta kelahiran dan lain-lain, bahkan nanti hak perwalian, hak perwalian juga akan bermasalah. Kalau laki-laki gak perlu wali, kalau perempuan? Tuh, dipikir anak zina, nah itu yang repot.²⁸⁵

- j) Bagaimana seharusnya ketentuan hukum yang berdampak pada efek jera bagi para pelaku serangkaian nikah siri?

AD menjelaskan:

Sanksi sosial seperti yang saya jelaskan tadi. Sekarang sanksi sosial itu jangan diremehkan, itu menarik itu sanksi sosial itu, dan itu jauh lebih malu loh.²⁸⁶

- k) Apakah Bapak secara pribadi dapat merekomendasikan pelaksanaan nikah siri tersebut atau tidak? Dengan alasan...

AD menjelaskan:

Ok, sekarang apa-apa memang perlu diatur perlu ditata, saya sebagai melihat peran pemerintah memang harus diatur. Tapi saya pribadi menilai, kita kembali ke personal orang itu, karena dengan dicatatpun kadang-kadang orang juga bisa gak tanggung jawab, kembali ke perform orangnya. Menikah itu memiliki syarat orang itu harus kompetibel, harus memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan spiritual, kekuatan emosional sehingga bisa mengontrol perjalanan bahtera perkawinan nanti sampai ke kakek nenek. Dicatat atau tidak dicatat ini tergantung individu. Ya, memang dengan dicatat kemudian sakinah? Belum tentu, apalagi tidak dicatat. Memang iya, tapi tidak semuanya yang tidak dicatat itu tidak sakinah. Ada saja yang sakinah, makanya kembali ke orangnya. Sekarang

²⁸⁵*Ibid.*

²⁸⁶*Ibid.*

substansinya adalah bagaimana pernikahan itu dilakukan oleh orang yang benar-benar baik, amanah, bertanggung jawab terhadap keluarga, ya inilah kembali kepada tujuan dari pernikahan itu membentuk pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah. Kriteria yang sakinah, mawadah, warahmah itu hanya bisa dituju oleh kriteria manusia-manusia yang memang berniat menikah secara serius. Orang kalau menikah secara serius, dicatat atau tidak dicatat dia tetap akan bertanggung jawab, dan orang yang bertanggung jawab dengan baik biasanya melaporkan perkawinannya kepada KUA, saya kira itu.²⁸⁷

d. Responden Keempat

Nama : HKA
 Tempat, Tanggal Lahir : Martapura, 18 Januari 1963
 Pendidikan Terakhir : S-3
 Pekerjaan : Dosen IAIN Palangka Raya

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 10 April 2017 di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada pukul 18.10 WIB sampai dengan 18.30 WIB. Fokus permasalahan tentang pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam mengenai sanksi nikah siri diuraikan sebagai berikut:

a) Apa penyebab yang memicu terjadinya nikah siri?

HKA menjelaskan:

Pengalaman di masyarakat itu, *pertama* itu biasanya karena MBA (*Married By Accident*) itu biasanya kan, udah hamil duluan dia malu kan itu yang biasa pengalaman yang saya tau. Nah terus lalu dia nikah siri, biasanya itu ada Ustaz-Ustaz yang mau menikahkan, datanglah, mungkin dia minta informasi kepada beberapa orang, itu tu ada Ustaz biasanya mau menikahkan katanya

²⁸⁷*Ibid.*

kan, nikahlah dia di situ, ya ada saksi-saksinya, betul aja pang memang ada saksi itu dari pihak lakian maupun pihak perempuan, terus ada juga walinya. Jadi ya itulah antara lain *Married By Accident*, yang *kedua* juga ada yang karena mau menambah, tapi takut dengan istri, itu kan banya kasus kan takut dengan istri, lalu dia nikah. Memang ada yang spesialis seperti itu, nikahlah dia *Married By Accident*, dengan daripada dituduh selingkuh katanya kan, tapi kada tahu pang jangan-jangan ada jua selingkuh duluan, nah itu tidak tahu *Wallahu a'lam* lah, itu biasanya yang mau menambah itu nah, menambah dua menambah tiga tapi tidak diberitahu istrinya kan. Nah, saya kira itu mungkin yang faktor banya terjadi di masyarakat itu yang nikah siri. Kan siri itu artinya tidak mau diketahui karena malu dia. Kalau yang diumumkan itu kan memang tidak malu dia. Saya kira dua itu faktor utamanya.²⁸⁸

- b) Bagaimana dasar hukum yang melarang ataupun yang membolehkan terjadinya nikah siri?

HKA menjelaskan:

Kalau yang membolehkan itu karena dia cukup syarat dan rukunnya, ya boleh ai sudah, itu kan dalam hukum itu sah. Nah itu hukum Islam, hukum Islam itu adalah bagaimana kejujuran kita terhadap Allah, itu sebenarnya. Jadi kan Ahwalusyahshiyah itu artinya hukum pribadi kita dengan Allah jadi kita harus jujur dengan Allah, ini boleh ini tidak boleh, itu kan namanya Al-Ahwal Al-Syahshiyah hubungan kita dengan Allah, bukan hubungan kita itu dengan manusia /dengan negara. Nah lalu sekarang, ada penambahan mungkin administrasi gitu, ada namanya surat nikah, ya kan. Nah itu bukti administrasi yang memang manfaatnya luar biasa, kalau umpanya kita membuat KTP atau membuat Akta, mau berangkat haji atau mungkin yang lain itu sangat-sangat diperlukan dalam hukum negara/hukum positif. Nah, sebagian ada yang berpendapat, jadi ada yang membolehkan ada yang mengharapkan seperti umpamanya Profesor Khairudin Nasution itu mengatakan ya kalau bisa ditambah lah dengan syaratnya itu adalah harus tercatat, dalilnya tu

²⁸⁸Wawancara dengan HKA (Dosen) di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada tanggal 10 April 2017.

adalah yang dua orang saksi *wasyahiday* 'adlin itu kan, itu diikiyaskannya sama dengan hukum jual beli itu harus dicatat macam-macam gitu kan. Jadi dia mengkiyaskan ke situ, karena ini *mitsaqon gholidzon* artinya suatu perjanjian yang sangat teguh sangat kuat dan itu harusnya tercatat harus ada buktinya, itu memang dalilnya, saya kira itu boleh untuk ke depannya lah nanti harapannya, tapi itu harus ada sosialisasi dulu ke masyarakat, Cuma kalau tadi apakah sah? Sah saja yang nikah siri sepanjang dia memenuhi syarat dan rukunnya. Kalau syarat rukun sah, hanya mungkin apakah mencatat itu dijadikan rukun? Nah ini yang jadi perdebatan sekarang kan, mencatat itu. Orang jual beli aja di atas 5 juta harus ada kan, nukar tanah aja harus tercatat, iya kan? Nah, apalagi menukari anak orang, ya kalau? Mau diberi makan apa anak orang itu kan, jadi itulah kalau aku melihatnya ya ini sah, tapi lebih baik itu tercatat, tapi mungkin kalau saya itu memang cenderung harus, mungkin harusnya ini dalam positif ya tercatat, jadi lebih baik arahkan tercatat. Makanya mungkin ini perlu sosialisasi ke masyarakat tentang pernikahan, itu yang harusnya di masyarakat itu jangan nikah siri, harus tercatat harus ada hitam di atas putih. Gara-gara GBHN kadang-kadang itu Gawir Bedahulu Hanyar Nikah, itu kan. Kalau yang melarang nikah siri itu ya tadi karena ini *mitsaqon gholidzon* harusnya itu dia betul-betul dicatat, ini kan dampaknya besar, jadi ya maunya arahnya memang ke sana makanya dilarang, cuma itulah tadi halal tapi dilarang, ya kan? Dia sah tapi terlarang, ya itu kan nikah siri itu sah tapi terlarang, terlarang dari sisi hukum positif, harusnya memang maunya ke depan itu, ini coba lah kita aja contoh umpamanya bagaimana menyatukan, kaya lampu lalu lintas, kalau kita mau betul-betul mengikuti lampu lalu lintas diatur negara kan, itu diatur oleh publik. Nah, coba kalau umpamanya kita melihat lampu merah, harusnya kan berhenti, kalau umpamanya dia menabrak lampu merah itu berdosa maunya, masalahnya dosa kada kan, nah ini sah tidaknya karena hubungan dosa itu kan. Sekarang kalau umpamanya apakah dia tidak tercatat itu berdosa? Nah, itu jadi masalah, dosa tidak? Kalau tidak berdosa itu lah tadi bagaimana kita mau melarang dia kalau gak berdosa, sah saja kan. Coba aja di kitab-kitab umpamanya di berbagai kitab kan sepanjang syarat dan rukunnya sah dia, Cuma tadi kita maunya menyatukan hukum Islam dengan hukum positif itu tadi kan, ayo coba mau gak menabrak itu kita yaini menabrak lampu merah itu berdosa, membuang sampah itu dosa, itu maunya kan.

Terus kalau dia nikah siri dosa, memang dalil yang nyantol betul-betul itu memang tidak ada, hanya di sini kan kiyas-kiyas itu, tapi dari sisi maslahatnya itu sangat bagus, maslahat lah kajian maslahatnya itu, saya kira itu.²⁸⁹

- c) Apakah Bapak sering mengetahui terjadinya nikah siri?

HKA menjelaskan:

Saya kalau sering gak sih, kalau dengar informasi iya. Tapi kalau saya sebagai PK 3 (Pembantu Ketua 3) STAIN Palangka Raya dulu itu ada mahasiswa yang nikah siri dia, diusut-usut itu kan ya mungkin dulu dia ada sudah hubungan terus menikah dia kan, memang ada nikahnya, nah terus ada Ustaznya, gak tau juga Ustaznya kan, terus ada memang bukti-buktinya, saya gak tau mahasiswa sekarang gak kedengaran nikah siri itu kan, tapi nikah betulan ya. Nah itu, saya tidak sering tau itu ya, tapi kalau mendengar umpanya artis ada nikah siri kan, kemudian ada pejabat juga nikah siri, ada kan? Terus ada beberapa tokoh-tokoh nikah siri, ya nikah siri ada kita mendengar, tapi kalau yang saya tau persis mengetahui itu, nah itu hanya sekali itu saja saya tau itu.²⁹⁰

- d) Dimana tempat pelaksanaan nikah siri?

HKA menjelaskan:

Yang saya tau itu tadi kan mahasiswa itu, di puntun itu. Mungkin tempatnya ya di rumah atau di masjid itu. Tapi yang menikahkan bukan dari KUA.²⁹¹

- e) Siapa biasanya yang menikahkan orang yang nikah siri?

HKA menjelaskan:

Ustaz yang menikahkan, memang Ustaz, Ustaz informal, ya tokoh agama. Orang Ustaz-Ustaz itu kan sepanjang syarat dan rukunnya memenuhi sah secara hukum.²⁹²

²⁸⁹*Ibid.*

²⁹⁰*Ibid.*

²⁹¹*Ibid.*

²⁹²*Ibid.*

- f) Siapa yang mencatat terjadinya peristiwa nikah siri?

HKA menjelaskan:

Mungkin para pihak yang melakukan itu, ya di selembaran kertas macam-macam itu, nanti dia beritahu, ada ja nanti selembarannya itu, tapi saya dengar itu kan ada isbat nikah, nah udah yang nikah-nikah siri itu isbat nikahkan aja, itu kan nanti solusinya. Kalau ai nanti kan dia sulit mau berangkat haji atau mau apa kan.²⁹³

- g) Bagaimana bentuk redaksi dalam surat pernikahan siri?

HKA menjelaskan:

Nah, redaksinya itu kada tahu lagi, kaya apa redaksinya itu kada tahu lagi aku kada memperhatikan itu.²⁹⁴

- h) Bagaimana pandangan Bapak terkait sanksi nikah siri?

HKA menjelaskan:

Saya sependapat dengan RUU nikah siri itu, diberi sanksi orang yang nikah siri. Dan itu harus disosialisasikan kepada masyarakat sanksi itu, nah itu bagus.²⁹⁵

- i) Bagaimana akibat hukum dari nikah siri?

HKA menjelaskan:

Akibat hukumnya ya kesulitan dalam membuat akta, dan membuat yang lain-lain, jadi itu. Akibat hukum kan kalau dari sisi hukum sah tidaknya itu sah ya, itu hukumnya sah. Tapi mereka itu akan mendapatkan kesulitan-kesulitan nanti kalau terjadi perceraian, nanti kalau bercerai di Pengadilan susah, termasuk juga kalau nanti dia mau berangkat umrah atau haji, orang akan mencari akta nikahnya. Jadi itu akibatnya bagi dia sendiri akan rugi, termasuk juga nanti kalau ada waris mawaris dan lainnya

²⁹³*Ibid.*

²⁹⁴*Ibid.*

²⁹⁵*Ibid.*

nanti kalau ke Pengadilan kan susah, maka lebih baik kalau dia nikah siri umpamanya kan itu diisbatkan itu dengan nikah kembali, lalu diberi akta nikahnya itu, lebih baik begitu.²⁹⁶

- j) Bagaimana seharusnya ketentuan hukum yang berdampak pada efek jera bagi para pelaku serangkaian nikah siri?

HKA menjelaskan:

Nikah siri ini kan akibatnya begini-begini ya itu harus sosialisasi, ada penyuluhan hukum ke masyarakat terutama masyarakat-masyarakat yang masih belum mengetahui secara baik tentang nikah siri seperti itu kan, akibat-akibat nikah siri, kemudian nikah yang baik itu bagaimana, itu yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat, umpamanya di masyarakat mana yang kemungkinan ada nikah siri dan sebagainya, maka di sana perlulah disampaikan akibat-akibat hukum bagi nikah siri itu. Memang baiknya itu harus ada dikumpulkan remaja-remaja itu, jadi di KUA itu setiap KUA itu harus mendata remaja-remaja yang ada di wilayahnya, kemudian di saat itu diberikan sosialisasi termasuk juga penyuluhan tentang pernikahan, jadi nikah yang baik itu bagaimana, kemudian cara mencari pasangan yang baik bagaimana, terus kalau perlu ada yang namanya penataran kira-kira dua bulan atau tiga bulan, diberi sertifikat. Kalaupun nanti tidak dapat sertifikat, maka dianjurkan untuk terus belajar lagi, belum bisa nikah lagi dia. Jadi sertifikatnya itu nanti sebagai syarat nikah. Jadi dia dididik dulu selama tiga bulan, bagaimana tentang apa hukum nikah dan sebagainya, jadi anak-anak muda itu diajarkan lah dikumpulkan, berikan sosialisasi kepada mereka lewat penyuluh-penyuluh yang banya di KUA itu, kan sekarang banya penyuluh, nah itu menyampaikan ke anak-anak muda itu, ini akibat nikah siri begini-begini dengan itu juga disampaikan pergaulan-pergaulan yang di luar batas itu, itu jangan sampai terjadi pergaulan bebas. Akibatnya kan nanti ada yang *married by accident* ya hubungan bedahulu baru nikah, nah ini yang kadang bisa malu lalu nikah siri, itu lebih baik nikahnya nikah yang resmi formal. Jadi lebih baik kita preventif saja lah daripada koratif gitu. Jadi lebih baik mungkin sosialisasi itu

²⁹⁶*Ibid.*

kemasyarakat, saya kira itu. Jadi termasuk juga disampaikan syaratnya itu *pertama* dia punya sertifikat penataran selama tiga bulan, nah kalau kaya gitu jadi habis SMA diadakan itulah sebelum menikah mereka adakan penataran, jadi orang tuanya juga harus mendukung kaya gitu, adakan penataran dibina dan di KUA itu difasilitasi itu betul-betul, jadi dididik mereka oleh masyarakat yang ahli hukum, ahli Undang-Undang, ahli dalam hal nikah termasuk dia membina mereka jangan sampai nanti nikah ini main-main, ni kan kejadian sampai 6 ribu setiap tahun di Kalimantan Tengah itu perceraian itu kan akibat tidak memahami betul bagaimana membina rumah tangga yang baik itu lah akibat karena kurang sadarnya mereka tentang arti pernikahan itu. Jadi lebih baik menurut saya langkah preventif itu, nah yang sertifikat itu sebagai syaratnya termasuk juga nanti membuat pencatatan itu juga syarat nikah, iya dicatat di KUA itu syarat nikahnya nah itu terus disosialisasikan kepada masyarakat, jadi masyarakat itu disadarkanlah, bukan dibiarkan gitu, diberi sanksi, masyarakatnya aja belum banya tau nanti malah akibatnya hukumnya tidak jalan, hukum itu tidak disadari oleh masyarakat.²⁹⁷

- k) Apakah Bapak secara pribadi dapat merekomendasikan pelaksanaan nikah siri tersebut atau tidak?

HKA menjelaskan:

Saya tidak merekomendasikan nikah siri itu, ya baiknya nikah formal, tapi kalau mau Undang-Undang tu, itu dijadikan syarat aja tidak rukun, nah termasuk juga ada sertifikat tadi itu sebagai syarat nikah, disitulah pentingnya KUA di tengah masyarakat dan itu peran AHS itu nanti penting di tengah masyarakat itu, jadi di sana didata betul, nah orang tuanya punya kewajiban untuk mengirim anaknya yang remaja itu untuk pelatihan, dan pelatihannya dibiayai atau mungkin *sharing* kah atau gimana? Yang jelas ada lah upaya, nanti BP4 itu diberdayaan juga. Nah BP4 itu betul-betul diberdayaan dan itu dimanfaatkan, BP4 itu tidak hanya tingkat provinsi, tingkat kabupaten bahkan tingkat kecamatan juga.²⁹⁸

²⁹⁷*Ibid.*

²⁹⁸*Ibid.*

Berdasarkan paparan di atas untuk mempermudah pemahaman pembaca maka laporan penelitian ini peneliti rangkum dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Ringkasan Hasil Wawancara dengan Pegawai KUA Se-Kota Palangka Raya

No.	Pertanyaan	Jawaban Pegawai KUA				
		Phdt	Jky	Sbgu	Rkpt	Bbt
1.	Apa penyebab yang memicu terjadinya nikah siri?	Tidak memiliki akta cerai, tidak ada persetujuan wali, dan perempuan hamil di luar nikah.	Tidak mau berurusan ke KUA, adanya calo, dan suami tidak mendapat persetujuan istri untuk menikah lagi.	Persyaratan administrasi tidak lengkap, ingin cepat menikah dan tidak mau repot.	Tidak mau repot berurusan ke KUA, dan suami tidak mendapat persetujuan istri untuk menikah lagi.	Tidak mendapat restu orang tua, dan perempuan hamil di luar nikah.
2.	Bagaimana dasar hukum yang melarang ataupun yang membolehkan terjadinya nikah siri?	Undang-Undang tidak mengakui nikah siri. Secara hukum agama nikahnya sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi.	Dalam agama Islam boleh saja, namun sebagian ulama ada yang tidak membolehkan karena melihat mudaratnya.	Dalam Islam segala sesuatu itu dicatat dan dalam Alquran dijelaskan bahwa taatilah Allah, Rasul dan Uliil Amri.	Secara agama boleh selama syarat dan rukunnya terpenuhi, namun dilarang secara hukum negara.	Yang melarang karena nikah itu ada perjanjian dengan Allah dan juga dengan manusia. Yang membolehkan karena sebab hamil duluan.
3.	Apakah Bapak pernah mengetahui praktik nikah siri di masyarakat?	Belum pernah.	Pernah.	Tidak pernah.	Belum pernah.	Tidak pernah.
4.	Bagaimana kebiasaannya pelaksanaan dari nikah siri tersebut?	Tidak tahu.	Tokoh agama atau ustaz yang menikahkan.	Tidak tahu.	Tidak tahu.	Tidak tahu.
5.	Menurut Bapak adakah dasar orang yang nikah siri itu?	Dasar mereka adalah agama, jika syarat dan rukun nikah terpenuhi maka sah nikahnya.	Dasarnya adalah nikah siri tidak ada larangan dalam Alquran dan hadis.	Mereka tidak peduli dengan Undang-Undang, yang penting sah secara Islam.	Tidak ada dasarnya.	Tidak ada dasarnya.

Lanjutan Tabel 4.2

Ringkasan Hasil Wawancara dengan Pegawai KUA Se-Kota Palangka Raya

No.	Pertanyaan	Jawaban Pegawai KUA				
		Phdt	Jky	Sbgu	Rkpt	Bbt
6.	Bagaimana pendapat Bapak tentang hukum nikah siri?	Nikah siri 80% tidak sah menurut hukum agama.	Nikah siri boleh jika syarat dan rukunnya terpenuhi.	Secara agama sah asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi. Secara Undang-Undang belum sah.	Secara agama sah asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi. Secara hukum negara tidak sah karena tidak tercatat di KUA.	Tidak sah sesuai dengan Alquran, hadis dan Undang-Undang.
7.	Bagaimana dampak dari nikah siri?	Status anak, waris, susah mendapatkan asuransi jika terjadi kecelakaan, dan jadi pembicaraan masyarakat.	Istri terlantar dan anak terlantar.	Tidak bisa membuat BPJS, anak tidak punya akta kelahiran dan tidak bisa naik haji dan umrah.	Tidak punya buku nikah, anak tidak diakui negara, akta kelahiran hanya tercantum nama ibunya dan masalah waris.	Tidak bisa tanggung jawab penuh terhadap istri dan masalah waris.
8.	Bagaimana seharusnya ketentuan hukum yang berdampak pada efek jera bagi para pelaku serangkaian nikah siri?	Diatur dalam Undang-Undang, bagi yang tidak berwenang menikahkan dapat dituntut 6 bulan penjara.	Hukuman kurungan. Sangat setuju jika nikah siri diberikan sanksi karena akan mengacaukan administrasi.	Harus ada aturan yang jelas, baik dalam PP, KMA maupun Undang-Undang.	Setuju jika ada Undang-Undang yang mengatur tentang denda nikah siri.	Seharusnya Pemerintah membuat aturan agar tidak terjadi nikah siri.
9.	Apakah selama ini pernah diambil tindakan terhadap pelaku nikah siri dan penghulu yang menikahkannya?	Pernah, tindakan berupa teguran terhadap yang menikahkan.	Belum pernah.	Tidak ada, hanya diberikan arahan saat penasihatan pra nikah, khutbah jumat, dan ceramah.	Di KUA Rakumpit belum pernah.	Pernah menegur.
10.	Apakah selama ini pernah diberikan penyuluhan hukum tentang larangan nikah siri?	Pernah, pada saat dilaksanan akad nikah.	Pernah, pada saat dilaksanan akad nikah dan saat ceramah.	Pernah, pada saat prosesi pernikahan.	Pernah, pada saat dilaksanan akad nikah.	Sering pada saat pengajian ibu-ibu.
11.	Apakah bapak secara pribadi dapat merekomendasikan pelaksanaan nikah siri tersebut atau tidak?	Tidak.	Tidak.	Tidak.	Tidak.	Tidak.

Tabel 4.3
Ringkasan Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama
Palangka Raya

No.	Pertanyaan	Jawaban Hakim		
		SN	HMN	MRA
1.	Apa penyebab yang memicu terjadinya nikah siri?	Belum cukup umur untuk menikah, hamil di luar nikah, kurang persyaratan administrasi dan poligami liar.	Karena alasan dulu nikah biayanya mahal.	Ada masyarakat yang berpikir nikah siri saja dulu untuk melihat kecocokan, jika cocok maka diisbatkan, kalau di daerah pedesaan itu faktor pengetahuan.
2.	Bagaimana dasar hukum yang melarang ataupun yang membolehkan terjadinya nikah siri?	Yang melarang Undang-Undang Perkawinan. Kalau yang membolehkan bukan kapasitas hakim menjawabnya.	Yang melarang Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2. Kalau yang membolehkan hakim <i>no comment</i> .	Yang melarang Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2. Kalau yang membolehkan tidak ada.
3.	Apakah Bapak/Ibu pernah mengetahui praktik nikah siri di masyarakat?	Tidak pernah.	Tidak pernah.	Tidak pernah.
4.	Bagaimana kebiasaannya pelaksanaan dari nikah siri tersebut?	Tidak tahu.	Tidak tahu.	Tidak tahu.
5.	Menurut Bapak/Ibu adakah dasar orang yang nikah siri itu?	Yang terungkap di Pengadilan rata-rata karena ketidaktahuan masyarakat tentang administrasi.	Bukan kewenangan hakim untuk mengomentari.	Dasarnya karena mau sembunyi-sembunyi, trauma dan terikat kontrak tidak boleh menikah.
6.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang hukum nikah siri?	Bukan kapasitas hakim menjawabnya.	Undang-Undang tidak membolehkan.	Sudut pandang agama sah asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi. Sudut pandang hukum positif tidak boleh.

Lanjutan Tabel 4.3
Ringkasan Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama
Palangka Raya

No.	Pertanyaan	Jawaban Hakim		
		SN	HMN	MRA
7.	Bagaimana dampak dari nikah siri?	Akta kelahiran anak, berangkat haji dan umrah, minjam uang di Bank, dan masalah waris.	Warisan dan pembuatan akta.	Waris dan harta gono-gini.
8.	Bagaimana seharusnya ketentuan hukum yang berdampak pada efek jera bagi para pelaku serangkaian nikah siri?	Jika ada unsur kesengajaan seharusnya ada aturan yang mengatur tentang hukumannya.	Direvisi Undang-Undang dan PPnya untuk menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku serangkaian nikah siri.	Harus ada hukuman yang tegas. Sangat mendukung RUU hukum materiel peradilan agama.
9.	Apakah selama ini pernah diberikan penyuluhan hukum tentang larangan nikah siri?	Dulu sering saat awal-awal KHI diterbitkan, namun akhir-akhir ini program penyuluhan hukum jarang dilakukan.	Bukan kewenangan Pengadilan, seharusnya KUA.	Pengadilan bersifat pasif.
10.	Apakah Bapak/Ibu secara pribadi dapat merekomendasikan pelaksanaan nikah siri tersebut atau tidak?	Tidak.	Bukan kewenangan hakim (<i>no comment</i>)	Tidak.

Tabel 4.4
Ringkasan Hasil Wawancara dengan Akademisi Hukum Islam

No.	Pertanyaan	Jawaban Akademisi Hukum Islam			
		AS	ESS	AD	HKA
1.	Apa penyebab yang memicu terjadinya nikah siri?	Ketidakjujuran suami terhadap istri dan ketidakberanian suami terhadap istri.	Adanya ketidakcocokan dan takut kalau hartanya nanti terbagi jika nikah secara resmi.	Selingkuh, hamil di luar nikah dan poligami.	Hamil di luar nikah dan suami ingin menambah istri tapi takut dengan istri pertama.
2.	Bagaimana dasar hukum yang melarang ataupun yang membolehkan terjadinya nikah siri?	Yang melarang tidak ada. Yang membolehkan karena tidak ada dalil Alquran tentang perintah untuk mencatat pernikahan.	Yang melarang tidak ada. Yang membolehkan nikah siri dinilai sah menurut agama.	Dasar hukum secara normatif: Undang-Undang no. 1 tahun 1974 dan dalam fikih terdapat hadis tentang walimah. Nikah sah tanpa dicatat jika syarat dan rukunnya terpenuhi.	Yang membolehkan karena cukup syarat dan rukunnya. Yang melarang karena nikah itu suatu ikatan yang kuat sehingga nikah harus dicatatkan.
3.	Apakah Bapak/Ibu sering mengetahui terjadinya nikah siri?	Sering.	Tidak sering.	Sering.	Tidak sering.
4.	Dimana tempat pelaksanaan nikah siri?	Di tempat yang tidak banyak diketahui orang.	Sama seperti nikah pada umumnya, kecuali di KUA.	Sama seperti nikah pada umumnya, kecuali di KUA.	Sama seperti nikah pada umumnya, kecuali di KUA.
5.	Siapa biasanya yang menikahkan orang yang nikah siri?	Kiyai, Wali yang mau jalan pintas dan oknum KUA.	Tokoh agama.	Tokoh agama, tokoh masyarakat dan orang tuanya.	Ustaz atau tokoh agama.
6.	Siapa yang mencatat terjadinya peristiwa nikah siri?	Orang yang melaksanakan nikah siri.	Orang yang ada dalam pelaksanaan nikah siri.	Pelaku serangkaian nikah siri.	Pelaku serangkaian nikah siri.
7.	Bagaimana bentuk redaksi dalam surat pernikahan siri?	Redaksinya: Pada hari ini, tanggal, tahun, A bin B menikahi C binti D dengan mas kawin 3,2 gram emas. Pakai materai.	Tidak tahu.	Tidak tahu, mungkin seperti berita acara dan tidak mengikuti formulir resmi.	Tidak tahu.

Lanjutan Tabel 4.4
Ringkasan Hasil Wawancara dengan Akademisi Hukum Islam

No.	Pertanyaan	Jawaban Akademisi Hukum Islam			
		AS	ESS	AD	HKA
8.	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait sanksi nikah siri?	Tidak bisa, karena nikah siri itu tidak masuk dalam pidana.	Sanksinya tergantung yang bersangkutan.	Setuju dengan RUU hukum materiel peradilan agama.	Sependapat dengan RUU hukum materiel peradilan agama, namun harus disosialisasikan.
9.	Bagaimana akibat hukum dari nikah siri?	Perspektif hukum positif secara kekuatan hukum dia tidak mendapatkan bagian warisan.	Mental anak dan istri, waris dan tidak bisa menuntut suami.	Tidak memiliki kekuatan hukum kepada siapapun, hak waris, hak asuh, akta kelahiran, bahkan hak perwalian.	Kesulitan dalam membuat akta, susah mengurus perceraian, berangkat haji dan umrah serta waris mawaris.
10.	Bagaimana seharusnya ketentuan hukum yang berdampak pada efek jera bagi para pelaku serangkaian nikah siri?	Sanksi sosial saja.	Dipidana yang memberatkan pelaku supaya tidak akan terjadi nikah siri.	Sanksi sosial.	Lakukan langkah preventif.
11.	Apakah Bapak/Ibu secara pribadi dapat merekomendasikan pelaksanaan nikah siri tersebut atau tidak?	Tidak.	Tidak.	Kembali kepada personal. Orang kalau menikah secara serius dan bertanggung jawab dengan baik biasanya melaporkan perkawinannya kepada KUA.	Tidak.

C. Hasil Analisis

Pada poin ini peneliti memaparkan hasil analisis dari data yang digali dan didapat sebagaimana permasalahan yang terdapat pada bab I. Analisis ini membahas secara berurutan pada 3 fokus masalah yaitu latar belakang terjadinya nikah siri menurut praktisi dan akademisi hukum Islam, pelaksanaan nikah siri di masyarakat menurut praktisi dan akademisi hukum Islam dan sanksi nikah siri menurut praktisi dan akademisi hukum Islam. Adapun uraian analisis dimaksud sebagai berikut:

1. Latar Belakang Terjadinya Nikah Siri Menurut Praktisi dan Akademisi Hukum Islam

Sebelum peneliti menganalisis data, terlebih dahulu peneliti mencermati para praktisi hukum yang terdiri dari dua kata yakni praktisi bermakna pelaksana sedangkan hukum bermakna peraturan yang secara resmi dianggap mengikat serta dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah sehingga menjadi Undang-Undang untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat sebagai patokan atau ketentuan/keputusan hakim,²⁹⁹ dalam ranah hukum Islam sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa hukum berpedoman pada kitab suci Alquran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.³⁰⁰ Sedangkan akademisi berarti orang yang berpendidikan tinggi/anggota akademi,³⁰¹ jadi akademisi hukum Islam berarti orang yang berpendidikan tinggi dan memahami hukum Islam secara mendalam. Dengan demikian maka praktisi adalah mereka yang sering

²⁹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 410.

³⁰⁰*Ibid.*, h. 444.

³⁰¹*Ibid.*, h. 18.

berpraktik baik di Kantor Urusan Agama dalam hal menikahkan orang-orang yang akan kawin dan juga para hakim yang berpraktik di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga dan persoalan hukum keluarga lainnya, sedangkan akademisi yang dikaji dalam penelitian ini adalah mereka yang berprofesi sebagai tenaga pengajar/dosen dan juga memahami teori-teori hukum yang berkaitan dengan ranah hukum keluarga.

Adapun yang dimaksud dengan sanksi di sini yaitu akibat dari tindakan hukum yang memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang, jika tidak ditaati maka ada akibat (sanksi) sebagai hukuman berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum.³⁰² Kemudian nikah siri dapat diartikan sebagai pernikahan yang dirahasiakan. Makna rahasia dari istilah nikah siri tidak mengacu kepada pihak lain kecuali pihak pemerintah sehingga nikah siri yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sengaja tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Nikah siri dapat dibedakan kepada dua jenis, *pertama*, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan. *Kedua*, adalah akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu pernikahan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.³⁰³

³⁰²*Ibid.*, h. 996-997.

³⁰³H. M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, h. 25.

Pada dasarnya suatu perkawinan itu jika ingin mengetahui terdapat unsur siri atau tidaknya dapat dilihat dari tiga indikator, *pertama*, subjek hukum akad nikah, *kedua*, kepastian hukum dari pernikahan tersebut, dan *ketiga*, *walimatul 'arusy*, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami istri tadi telah resmi menjadi suami istri.³⁰⁴ Jadi pada konteks zaman sekarang khususnya di negara Indonesia, nikah siri diartikan sebagai pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi secara agama namun dilakukan secara rahasia dan umumnya tanpa dicatat oleh badan pencatatan yang berwenang.

Berdasarkan gambaran di atas, peneliti mencermati pada 3 pandangan tentang latar belakang terjadinya nikah siri oleh para praktisi dan akademisi antara lain penyebab terjadinya nikah siri menurut petugas KUA se-Kota Palangka Raya seperti HH (KUA Phdt) adalah karena adanya masyarakat yang mengaku sudah cerai namun tidak memiliki akta cerai, tidak ada persetujuan wali, dan perempuan hamil di luar nikah. Menurut AN (KUA Jky) adalah karena masyarakat tidak mau berurusan ke KUA, adanya calo, dan suami tidak mendapat persetujuan istri untuk menikah lagi. Menurut LH (KUA Sbg) karena persyaratan administrasi tidak lengkap, ingin cepat menikah dan tidak mau repot. Menurut WN (KUA Rkpt) karena masyarakat tidak mau repot berurusan ke KUA dan juga karena suami tidak mendapat persetujuan istri untuk menikah lagi. Sedangkan menurut AB (KUA Bbt)

³⁰⁴*Ibid.*, h. 26.

adalah karena pasangan tidak mendapat restu dari orang tua dan juga perempuan hamil di luar nikah.

Adapun perspektif dari pihak hakim tentang penyebab terjadinya pernikahan siri menurut SN adalah karena adanya pasangan yang belum cukup umur untuk menikah, perempuan hamil di luar nikah, kurang persyaratan administrasi dan poligami liar. Menurut HMN masyarakat beralasan bahwa pada zaman dulu biaya nikah mahal, sedangkan menurut MRA karena ada masyarakat yang berpikir nikah siri saja dulu untuk melihat kecocokan, jika cocok maka diisbatkan, kemudian jika dilihat di daerah pedesaan itu karena faktor pengetahuan.

Kemudian dalam permasalahan yang sama menurut perspektif akademisi dalam hal ini AS menjelaskan bahwa penyebab nikah siri adalah karena ketidakjujuran suami terhadap istri dan ketidakberanian suami terhadap istri. Menurut ESS karena adanya ketidakcocokan dan takut kalau hartanya nanti terbagi jika nikah secara resmi. Kemudian menurut AD adalah karena selingkuh, hamil di luar nikah dan poligami, sedangkan menurut HKA karena hamil di luar nikah dan suami ingin menambah istri tapi takut dengan istri pertama.

Mengacu pandangan para praktisi dan akademisi hukum Islam di atas maka dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya nikah siri antara lain sebagai berikut.

1. Masyarakat yang tidak memiliki akta cerai (cerainya secara tidak resmi) yang ingin menikah lagi.

2. Pasangan tidak mendapat restu dari orang tua/wali.
3. Perempuan hamil di luar nikah.
4. Masyarakat ingin cepat menikah dan tidak mau repot berurusan ke KUA.
5. Adanya calo nikah siri.
6. Suami tidak mendapatkan persetujuan istri untuk menikah lagi sehingga suami melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri.
7. Persyaratan administrasi tidak lengkap.
8. Calon pengantin belum cukup umur untuk menikah.
9. Adanya masyarakat yang berpikir bahwa nikah siri itu untuk melihat kecocokan dengan pasangan.
10. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang administrasi pernikahan.
11. Ketidakjujuran suami terhadap istri.
12. Masyarakat takut hartanya terbagi jika menikah secara resmi.
13. Adanya perselingkuhan.

Menurut peneliti, dari penjelasan para praktisi dan akademisi tentang latar belakang terjadinya nikah siri yang telah disebutkan di atas substansi sebenarnya adalah:

- a. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat³⁰⁵

Masih banyak di antara masyarakat yang belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Walaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka, menganggapnya sebagai

³⁰⁵Ifrod Maksum, 4 *Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Siri*, [Http://www.nomifrod.com/2016/06/4-faktor-penyebab-terjadinya-nikah-siri.html](http://www.nomifrod.com/2016/06/4-faktor-penyebab-terjadinya-nikah-siri.html) (diakses 23 Juni 2017).

tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat atau pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi, belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut.

Permasalahannya ialah, mengapa begitu rendah kesadaran hukum sebagian masyarakat, dan bagaimana upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka, semua itu tentu merupakan tanggung jawab bersama. Kalau suatu kelompok masyarakat dalam suatu wilayah hukum di Indonesia belum mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, hal ini tentu bukan semata-mata kesalahan masyarakat itu sendiri melainkan juga disebabkan kurang maksimalnya peran dan upaya lembaga pemerintahan yang ada, dalam hal ini Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah setempat kurang intensif memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang betapa pentingnya mencatatkan perkawinan mereka.

Ada beberapa masyarakat di daerah pedalaman yang rendah pemahaman dan kesadaran hukum akan pentingnya pencatatan perkawinan, hal tersebut dapat dilihat di beberapa desa yang mayoritas penduduknya muslim, ternyata ada banyak masyarakat yang perkawinannya tidak dicatat oleh KUA setempat. Hal ini dapat diketahui dengan jelas, dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan pengesahan perkawinan mereka secara hukum negara.

Banyaknya perkara permohonan isbat nikah tersebut tidak terlepas dari usaha pimpinan Pengadilan Agama setempat yang telah berupaya mengadakan penyuluhan hukum terutama di daerah Kecamatan tertentu yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Melihat antusiasme masyarakat untuk mendapatkan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama setelah memperoleh pemahaman hukum tersebut, menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat justru mulai bangkit.

Diharapkan dimulai dari meningkatnya kesadaran tersebut merupakan awal yang baik bagi terciptanya kesadaran masyarakat secara keseluruhan di kawasan daerah tersebut. Karena dengan kesadaran ini setidaknya kalau mereka menikahkan anak-anaknya nanti tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama yang pernah mereka lakukan.

Dengan demikian, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat seperti itu perlu ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan hukum baik secara formal yang dilakukan oleh lembaga instansi terkait maupun secara informal melalui para penceramah di forum pengajian majelis taklim dan lain sebagainya.

b. Sikap Apatis Sebagian Masyarakat Terhadap Hukum³⁰⁶

Sebagian masyarakat ada yang bersikap masa bodoh terhadap ketentuan peraturan yang menyangkut perkawinan. Kasus pernikahan Syekh Puji dengan perempuan di bawah umur bernama Ulfah sebagaimana terkuak di media massa merupakan contoh nyata sikap

³⁰⁶*Ibid.*

apatitis terhadap keberlakuan hukum negara. Dari pemberitaan yang ada, dapat dipahami terdapat dua hal yang diabaikan oleh Syekh Puji yaitu, *pertama*, pernikahan tersebut merupakan poligami yang tidak melalui izin dari Pengadilan, dan *kedua*, dia tidak mau mengajukan permohonan dispensasi kawin meskipun sudah jelas calon istri tersebut masih di bawah umur.

Sikap apatisme semacam itu, terutama yang dilakukan oleh seorang publik figur, sungguh merupakan hambatan besar bagi terlaksananya keberlakuan hukum. Karena apa yang dilakukan oleh seorang tokoh biasanya akan dicontoh oleh mereka yang mengidolakannya.

c. Ketentuan Pencatatan Perkawinan yang Tidak Tegas³⁰⁷

Sebagaimana diketahui, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan asas pokok dari sahnyanya perkawinan. Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam Pasal tersebut harus dipahami sebagai syarat kumulatif, bukan syarat alternatif sahnyanya suatu perkawinan. Dari fakta hukum dan/atau norma hukum tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi dasar bagi umat Islam terhadap wajibnya mencatatkan perkawinan mereka. Akan tetapi ketentuan tersebut mengandung kelemahan karena Pasal tersebut multi tafsir dan juga tidak disertai sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Dengan kata lain ketentuan pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang tersebut bersifat kurang tegas.

³⁰⁷*Ibid.*

d. Ketatnya Izin Poligami³⁰⁸

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, akan tetapi masih memberikan kelonggaran bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk melakukan poligami (salah satunya agama Islam) dengan persyaratan yang sangat ketat. Seseorang yang hendak melakukan poligami harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif yang ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang, yaitu:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan (Pasal 4 ayat (2) UU 1/1974).

Sebaliknya Pengadilan akan mempertimbangkan dan akan memberikan izin poligami bagi seseorang yang memohonnya apabila terpenuhi syarat kumulatif sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istrinya.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka;

Adapun yang dimaksud mampu menjamin keperluan hidup bagi istri-istri dan anak-anaknya adalah sangat relatif sifatnya. Demikian pula suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya adalah

³⁰⁸*Ibid.*

sangat subjektif sifatnya, sehingga penilaian terhadap dua persyaratan tersebut terakhir akan bergantung pada rasa keadilan hakim sendiri. Ketatnya izin poligami juga menyebabkan yang bersangkutan lebih memilih nikah di bawah tangan atau nikah siri karena pelangsungan (tata cara) pernikahan di bawah tangan lebih sederhana dan lebih cepat mencapai tujuan yaitu kawin itu sendiri.

Khusus bagi pegawai negeri baik sipil maupun militer, untuk dapat poligami kecuali harus memenuhi syarat tersebut di atas juga harus memperoleh izin atasan yang berwenang, sesuai dengan PP No.10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS *juncto* PP No. 45/1990. Demikian pula bagi TNI harus memperoleh izin dari atasannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga bagi yang bersangkutan wajib menempuh panjang.

Sulit dan lamanya serta hambatan berupa birokrasi dalam pemberian izin memang bertujuan untuk memperkuat secara selektif akan perkenan poligami bagi PNS serta menghindari kesewenang-wenangan dalam hal kawin lebih dari satu, sehingga PNS diharapkan jadi contoh dan teladan yang baik sesuai dengan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Akibat larangan berpoligami atau sulitnya memperoleh izin poligami justru membuka pintu pelacuran, hidup bersama dan poligami ilegal.

Menurut peneliti, dengan berlakunya UU No. 1/1974 angka kawin lebih dari satu akan menurun namun poligami ilegal dengan segala bentuknya semakin banyak, yang disebabkan oleh:

- 1) Tidak adanya kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat.
- 2) Bagi mereka yang terikat oleh pengetatan tertentu karena kedinasannya dibayangi oleh rasa takut kepada atasan di samping prosedurnya yang terlalu lama dan sulit.
- 3) Tidak adanya tindakan yang tegas terhadap poligami ilegal. Bentuk poligami ilegal yang banyak dijumpai dalam masyarakat ialah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dan sering dikenal dengan sebutan hidup bersama wanita simpanan.
- 4) Bagi mereka yang beragama Islam, melakukan poligami tanpa pencatatan nikah.

Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa ketatnya izin poligami merupakan salah satu faktor timbulnya pernikahan di bawah tangan atau pernikahan yang tidak dicatat alias nikah siri.

Adapun dasar hukum nikah siri menurut petugas KUA se-Kota Palangka Raya seperti HH (KUA Phdt) menurutnya Undang-Undang tidak mengakui nikah siri, namun secara hukum agama nikahnya sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi. AN (KUA Jky) menjelaskan bahwa dalam agama Islam boleh saja, namun sebagian ulama ada yang tidak membolehkan karena melihat mudaratnya. Menurut LH (KUA Sbg) dalam Islam segala sesuatu itu dicatat dan dalam Alquran dijelaskan bahwa taatilah Allah, Rasul dan *ulil*

amri. Menurut WN (KUA Rkpt) nikah siri secara agama boleh selama syarat dan rukunnya terpenuhi, namun dilarang secara hukum negara. Adapun menurut AB (KUA Bbt) dasar hukum yang melarang yaitu karena nikah itu ada perjanjian dengan Allah dan juga dengan manusia, dan yang membolehkan karena sebab hamil duluan. Sedangkan menurut hakim yakni SN menyatakan bahwa yang melarang adalah Undang-Undang Perkawinan, adapun yang membolehkan bukan kapasitas hakim menjawabnya. Menurut HMN yang melarang adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2, kalau yang membolehkan hakim *no comment*. Sedangkan menurut MRA yang melarang adalah sama seperti yang dijelaskan oleh HMN yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2, dan yang membolehkan tidak ada.

Kemudian menurut para akademisi yakni AS menjelaskan bahwa yang melarang tidak ada, dan yang membolehkan karena tidak ada dalil Alquran tentang perintah untuk mencatat pernikahan. Menurut ESS yang melarang tidak ada, sedangkan yang membolehkan adalah karena nikah siri dinilai sah menurut agama. Menurut AD dasar hukum yang melarang secara normatif adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dalam fikih terdapat hadis tentang walimah dan menurutnya nikah itu sah tanpa dicatat jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Adapun menurut HKA yang membolehkan karena cukup syarat dan rukunnya, sedangkan yang melarang karena nikah itu suatu ikatan yang kuat sehingga nikah harus dicatatkan. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dasar hukum yang melarang nikah siri menurut para praktisi dan akademisi secara umum antara lain Pasal 2 Undang-Undang No.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Alquran surah an-Nisā ayat 59, dan hadis tentang walimah.

Hemat peneliti, dasar hukum yang telah disebutkan di atas memang di dalamnya tidak disebutkan secara jelas kalau nikah siri itu dilarang, namun terdapat makna lain yang tersirat yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang mengandung makna dilarangnya nikah siri. Contohnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam Pasal tersebut tidak disebutkan bahwa nikah siri dilarang, namun mengutip perkataan salah satu hakim MRA “Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan harus dicatat, sehingga makna kontrarionya adalah kebalikan dari itu, artinya tidak boleh tidak mencatatkan perkawinan.” Jadi, menurut peneliti maksud dari Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah tidak boleh nikah siri atau nikah di bawah tangan.

Kemudian dalam surah an-Nisā ayat 59 dijelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝³⁰⁹

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³¹⁰

³⁰⁹QS. an-Nisā [3]: 59.

³¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 114.

Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum. Secara berurut dinyatakan-Nya; *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah* dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam Alquran *dan taatilah Rasul-Nya*, yakni Muhammad SAW dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sah, *dan perkenankan juga perintah ulil amri*, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian *di antara kamu*, wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. *Kemudian jika kamu berlainan pendapat*, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam Alquran dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang sah, *maka kembalikanlah ia kepada* nilai-nilai dan jiwa firman Allah yang tercantum dalam Alquran, serta nilai-nilai *dan* jiwa tuntunan Rasul yang kamu temukan dalam sunnahnya, *jika kamu benar-benar beriman* secara mantap dan bersinambung *kepada Allah dan hari kemudian*. Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini, adalah *lebih utama* lagi sempurna, sedang selainnya adalah buruk dan memiliki kekurangan *dan*, di samping itu, ia juga *lebih baik akibatnya*, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.³¹¹

³¹¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2009, h. 583-584.

Pendapat ulama berbeda-beda tentang makna kata *ulī al-amr*. Dari segi bahasa, *ulī* adalah bentuk jamak dari *walī* yang berarti *pemilik* atau *yang mengurus* dan *menguasai*. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu tidak banyak, sedang kata *al-amr* adalah *perintah* atau *urusan*. Dengan demikian *ulī al-amr* adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Ada yang berpendapat bahwa kata *mereka* bermakna para penguasa/pemerintah. Ada juga yang menyatakan bahwa mereka adalah ulama, dan pendapat ketiga menyatakan bahwa *mereka* adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya. Di sisi lain, bentuk jamak pada kata *ulī* dipahami oleh sementara ulama dalam arti mereka adalah kelompok tertentu, yakni suatu badan atau lembaga yang berwenang menetapkan dan membatalkan sesuatu. Misalnya dalam hal pengangkatan kepala negara, pembentukan Undang-Undang dan hukum. Mereka terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat, para ulama, petani, buruh, wartawan, dan kalangan profesi lainnya serta angkatan bersenjata. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh pengarang tafsir *al-Manār*, yakni Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan al-Maraghi.³¹²

Dalam ayat ini ditetapkan kewajiban atas masyarakat untuk taat kepada *ulil amri*. Tetapi, apabila ketaatan kepada *ulil amri* tidak mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan, mereka wajib ditaati walaupun perintah

³¹²*Ibid.*, h. 585-586.

tersebut tidak berkenan di hati yang diperintah. Dalam konteks ini Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكْرِيَّا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.³¹³

Artinya: Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yahya dari Ubaidullah berkata: Nafi' menyampaikan kepada kami dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Muhammad bin Subbah menyampaikan kepada kami dari Ismail bin Zakaria dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda: Mendengar dan taat adalah hak (kebenaran) selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Apabila diperintahkan untuk melakukan maksiat maka tidak ada (kewajiban) mendengar dan taat. (HR. Bukhari)³¹⁴

Taat dalam bahasa Alquran berarti *tunduk, menerima secara tulus* dan atau *menemani*. Ini berarti ketaatan dimaksud bukan sekedar *melaksanakan apa yang diperintahkan*, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk mendukung usaha-usaha pengabdian kepada masyarakat.³¹⁵ Surah an-Nisā ayat 59 juga mengisyaratkan berbagai lembaga yang hendaknya diwujudkan umat Islam untuk menangani urusan mereka, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif.³¹⁶

³¹³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid 3*, Libanon: Darul Fikri, 2006, h. 191.

³¹⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Penerjemah Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 352.

³¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah...*, h. 587.

³¹⁶ *Ibid.*, h. 588.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jika dikaitkan dengan pencatatan perkawinan yang merupakan perintah dari *ulil amri* atau pemerintah, yang mana dalam perintah tersebut tidak mengandung kedurhakaan terhadap Allah dan Rasul-Nya, dan tujuan dari pemerintah adalah agar tertib administrasi. Pencatatan perkawinan itu bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, melainkan juga untuk masyarakat itu sendiri sehingga pencatatan perkawinan wajib dilaksanakan oleh masyarakat dalam artian tidak boleh melakukan nikah siri.

Selanjutnya dalam hadis Nabi SAW disebutkan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ لَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.³¹⁷

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Hammād bin Zaid dari Šābit dari Anas bahwa Rasulullah SAW melihat ke muka ‘Abdurrahman bin ‘Auf yang masih ada bekas kekuning-kuningan. Berkata Rasulullah, ‘Ada apa ini?’ ‘Abdurrahman berkata, ‘Saya baru mengawini seorang perempuan dengan mahar seberat biji kurma dari emas.’ Rasulullah bersabda, ‘Semoga Allah memberkatimu. Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing. (HR. Tirmizi)³¹⁸

Perintah Rasul SAW untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup di kalangan

³¹⁷ Abi ‘Isa bin Muhammad bin Surah at-Tirmizi, *al-Jami’u aṣ-Ṣaḥih wa huwa Sunan at-Tirmizi Juz Šālīs*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 1934, h. 402.

³¹⁸ *Ibid.*

masyarakat Arab sebelum Islam datang. Sebagian ulama yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama adalah ulama Zahiriyah yang mewajibkan walimah atas setiap orang yang melangsungkan pernikahan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya pada hadis di atas dengan memahami amar atau perintah dalam hadis tersebut sebagai perintah wajib. Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang hukum walimah, pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa pengumuman adalah suatu hal yang sangat penting dalam pernikahan.³¹⁹

Adapun dasar hukum yang membolehkan nikah siri menurut para praktisi dan akademisi secara umum adalah nikah sah secara hukum agama jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam hal ini 2 hakim yakni SN dan HMN tidak menjawab dengan dalih bukan kapasitas hakim untuk menjawabnya, namun 1 hakim yakni MRA menjawab tidak ada dasar atau aturan yang membolehkan nikah siri. Sedangkan dari kalangan akademisi yang memiliki jawaban berbeda adalah AS. Dia membolehkan nikah siri berlandaskan dengan dalil Alquran surah an-Nisā ayat 3 sebagai berikut:

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ...³²⁰

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.³²¹

Menurut AS pada ayat tersebut tidak ada perintah untuk mencatatkan pernikahan, tidak ada kalimat *Faktubū: Catatlah!* Dalam ayat tersebut tegas:

³¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 156-157.

³²⁰ QS. an-Nisā [3]: 3.

³²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 99.

Fankihū: nikahilah, bahasanya bukan *catatlah pernikahannya*. Berdasarkan dalil tersebut AS membolehkan nikah siri namun tidak membolehkan zina siri atau zina zahir. Selain itu AS juga menggunakan dalil berupa hadis sebagai berikut:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ.³²²

Artinya: Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, 'Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Nabi SAW, 'Saya telah bertemu dengan seorang wanita yang cantik dan bernasab baik, akan tetapi wanita tersebut tidak dapat melahirkan, apakah saya menikahnya?' Nabi menjawab: 'Jangan.' Kemudian laki-laki tersebut datang lagi untuk kedua kalinya, dan Nabi juga melarangnya. Kemudian laki-laki tersebut datang lagi untuk yang ketiga kalinya, dan Nabi SAW menjawab: 'Nikahilah wanita yang banyak anak, karena aku akan bangga dengan banyaknya umatku. (HR. Abu Daud)³²³

Hemat peneliti, memang secara eksplisit perintah untuk mencatatkan pernikahan tidak diatur baik dalam Alquran maupun hadis, namun pernikahan yang tidak dicatatkan pada konteks zaman sekarang dapat menimbulkan mudarat bagi pasangan suami-istri dan juga anak. Menurut peneliti, seandainya Rasulullah SAW hidup pada zaman sekarang yang mana kultur catat-mencatatnya sangat kuat dan hal tersebut menimbulkan kemudahan/kemaslahatan bagi masyarakat maka pencatatan perkawinan bisa saja diwajibkan oleh Rasulullah SAW.

³²² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud (1)*, Penerjemah Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak dan Ahmad Rifa'i Utsman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 796.

³²³ *Ibid.*

Kemudian hemat peneliti, mengenai pentingnya pencatatan nikah dapat diikaskan pada Alquran yang menjelaskan tentang pentingnya pencatatan utang-piutang (muamalah) yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

324



وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia

³²⁴QS. al-Baqarah [2]: 282.

tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki (di antara kamu). Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, baik (utang itu) kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³²⁵

Pada ayat di atas terdapat kata *tadāyantum* yang diterjemahkan dengan bermuamalah, yang berasal dari kata *dain*. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata *dain* itu (yakni *dal*, *ya* dan *nun*) selalu menggambarkan hubungan antar dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari pihak yang lain. Kata ini antara lain bermakna utang, pembalasan, ketaatan dan agama. Semuanya menggambarkan hubungan timbal-balik, atau dengan kata lain bermuamalah. Muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang tidak secara tunai, yakni utang-piutang.³²⁶ Kata selanjutnya yang tertulis *ilā ajalin musammān faktuḇūh* adalah apabila transaksi yang disebutkan memiliki tempo sampai

³²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 59-60.

³²⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah...*, h. 563-564.

jangka waktu tertentu, maka merupakan suatu kewajiban untuk mencatatkan transaksi tersebut.³²⁷

Potongan ayat *faktubūh* adalah berbentuk kata kerja perintah (*fi'il amar*) yang berasal dari kata *kataba-yaktubu*, yakni mencatat dengan *isim masdar*-nya *katban-kitāban-kitābatan* yakni pencatatan. Kata ini terdapat penambahan huruf *fa'* sebagai jawaban dari *izā*. Kata kerja ini bermakna perintah atau tuntutan dari Allah SWT kepada manusia untuk melaksanakan pencatatan dalam hubungan muamalah.³²⁸

Perintah untuk menuliskan segala transaksi muamalah ini jika dikaitkan dengan kaidah kebahasaan dalam *uṣūl al-fiqh* termasuk kategori *amar* dengan kaidah (الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْأَوْجُوبِ) yakni menurut aslinya perintah itu adalah untuk mewajibkan. Adakalanya perintah (*amar*) bersifat wajib, anjuran, petunjuk, ancaman, boleh, permohonan, melemahkan dan lain-lain, jika ada keterangan (*qarinah*) yang menunjukkan tidak wajib.³²⁹ Oleh sebab itu, perintah untuk mencatatkan transaksi muamalah (utang-piutang) merupakan anjuran (*sunah*) untuk dilakukan.³³⁰ Hal ini dikarenakan perintah pencatatan tersebut merupakan jawaban dari syarat bermuamalah secara tidak tunai.

³²⁷M. Quraish Shihab, *Al-Lubab*, Tangerang: Lentera Hati, 2012, h. 732.

³²⁸Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian: Hukum Acara di Peradilan Agama Islam*, Malang: Setara Press, 2015, h. 76.

³²⁹Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam istinbāṭ Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999, h. 17-18.

³³⁰Syaikh Ahmad Mustafa al-Farran, *Tafsir al-Imām asy-Syāfi'i*, penerjemah Ali Sultan dan Fedrian Hasmand dengan judul "Tafsir Imam Syafi'i Jilid: 1 Surah al-Fatihah – Surah Ali 'Imran, Jakarta: Al-Mahira, 2008, h. 502.

Berdasarkan ketentuan hukum pencatatan utang-piutang yang disunnahkan (anjaran), apabila dikaitkan dengan pencatatan nikah yang begitu luhur dan sakral mestinya lebih utama lagi untuk dicatatkan. Karena pencatatan nikah merupakan hukum yang tidak diatur secara langsung dalam nas maka untuk menetapkan suatu hukum yang tidak terdapat di dalam nas diperlukan suatu metode. Metode tersebut adalah *qiyas*, metode *qiyas* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukunnya sebagai berikut:

- 1) *Al-Aşl* adalah kejadian (pokok) yang hukumnya disebutkan dalam nas. Anjaran untuk melakukan pencatatan dalam transaksi muamalah tidak secara tunai dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 282.
- 2) *Al-Far'u* merupakan (cabang) kejadian yang hukumnya tidak disebutkan dalam nas. Adapun cabang yang ingin dicari hukumnya adalah pencatatan nikah.
- 3) *Al-Hukm al-Aşl* merupakan hukum syara' yang dibawa oleh nas dalam masalah asal dan menjadi hukum dasar bagi masalah baru. Adapun hukum pencatatan transaksi utang-piutang pada surah al-Baqarah ayat 282 adalah sunah.
- 4) *Al-'Illah* merupakan alasan yang dijadikan dasar oleh hukum asal. Adapun pencatatan nikah dengan pencatatan dalam transaksi muamalah memiliki kesamaan *'illah*, yakni transaksi (akad). Jika muamalah tidak secara tunai merupakan transaksi antara pemberi utang dan yang berutang. Begitu pula dengan akad nikah yang mesti dicatat karena

adanya transaksi akad antara orang tua atau wali perempuan dengan laki-laki yang menikahi anaknya.³³¹

Berdasarkan ketentuan *qiyas* di atas maka pencatatan nikah memiliki kesamaan '*illah*' dengan pencatatan utang-piutang yakni transaksi. Dengan demikian, pencatatan nikah hukumnya sunah berdasarkan pada hukum *asl* surah al-Baqarah ayat 282. Walaupun memiliki kesamaan '*illah*' sebagai transaksi sosial, tetapi akad nikah merupakan perjanjian yang kuat dan memiliki akibat hukum yang luas yang menyangkut hak nafkah, hak waris, hak harta gono-gini dan status nasab.

Pencatatan dalam transaksi utang-piutang berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahkan menjadi alat bukti primer karena penyebutannya dalam surah al-Baqarah ayat 282 didahulukan daripada persaksian. Pencatatan diterangkan sebagai alat bukti tertulis yang adil di sisi Allah dan dapat menguatkan persaksian serta menghilangkan keragu-raguan. Utang-piutang yang tidak dicatatkan, tidak sekalipun berpengaruh dalam keabsahan muamalah. Begitu juga dalam perkawinan, pencatatan nikah memiliki fungsi sebagai alat bukti keabsahan suatu peristiwa perkawinan. Sekalipun pernikahan itu tidak dicatat dan selama masih memenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan tersebut sah. Akan tetapi pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Apabila terjadi permasalahan (misalnya perceraian) maka istri tidak bisa menggugat ke Pengadilan untuk mendapatkan hak-haknya karena Pengadilan hanya mengakui perkawinan yang memiliki akta nikah (alat bukti) sebagai dokumen

³³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqin dengan judul "Ilmu Uṣūl Fikih: Kaidah Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. 9, 1977, h. 77.

resmi yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama bagi pernikahan orang muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi pernikahan non-muslim.

2. Pelaksanaan Nikah Siri di Masyarakat Menurut Praktisi dan Akademisi Hukum Islam

Ada beberapa bentuk dari nikah siri, yakni *pertama*, pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi yang tidak tercatat secara resmi, namun pernikahan ini disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan berdasarkan persetujuan serta kehadiran wali namun para saksi diminta untuk merahasiakan kesaksian mereka, *kedua*, pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi yang dicatat secara resmi pada badan berwenang di suatu negara berikut para saksi dan persetujuan wali namun para saksi diminta untuk merahasiakan kesaksiannya, *ketiga*, pernikahan yang tidak tercatat secara resmi namun disetujui oleh wali tanpa ada saksi, dan *keempat*, pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di badan yang berwenang dan tanpa diketahui wali serta tanpa ada saksi.³³²

Mengenai praktik dan kebiasaan pelaksanaan dari nikah siri para petugas KUA se-Kota Palangka Raya seperti HH (KUA Phdt), LH (KUA Sbgg), WN (KUA Rkpt), dan AB (KUA Bbt), mereka tidak pernah mengetahuinya, hanya AN (KUA Jky) yang pernah mengetahuinya, namun AN (KUA Jky) hanya sekedar mengetahui orang yang biasanya menikahkan nikah siri, sedangkan mengenai praktiknya di lapangan dia tidak mengetahuinya. Menurut AN (KUA Jky) biasanya orang yang menikahkan

³³²M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi R, *Nikah sirri...*, h. 49-50.

nikah siri adalah tokoh agama atau Ustaz. Kemudian 3 orang hakim SN, HMN, dan MRA tidak pernah mengetahui praktik dan pelaksanaan nikah siri tersebut. Adapun menurut para akademisi dalam permasalahan yang sama menurut AS tempat pelaksanaan nikah siri adalah di tempat yang tidak banyak diketahui orang, sedangkan menurut ESS, AD dan HKA sama seperti nikah pada umumnya, kecuali di KUA. Yang mencatat pernikahan siri menurut AS, ESS, AD dan HKA adalah orang yang ada dalam pelaksanaan nikah siri tersebut (pelaku serangkaian nikah siri). Kemudian mengenai bentuk redaksi dalam surat pernikahan siri ESS, AD dan HKA tidak mengetahuinya, hanya AS yang mengetahuinya. Bentuk redaksinya menurut AS yaitu misalnya “*Pada hari ini, tanggal, Tahun, A bin B menikahi C binti D dengan mas kawin 3,2 gram emas*”, dan dalam surat tersebut ada materainya.

Jadi, hanya dari akademisi yakni AS yang mengetahui secara langsung praktik nikah siri, dia sering menjadi saksi nikah siri sehingga dia mengetahui redaksi pencatatan nikah siri. Sedangkan dari praktisi tidak ada yang mengetahui praktik nikah siri. Menurut peneliti hal yang wajar jika para praktisi tidak mengetahui praktik nikah siri, karena waktu mereka lebih banyak di kantor sehingga mereka jarang dan bahkan tidak pernah mengetahui praktik nikah siri di masyarakat.

Adapun mengenai redaksi pencatatan nikah siri yang disebutkan oleh AS menurut peneliti tidak ada gunanya dan tidak diakui di mata hukum. Hal ini sesuai dengan peraturan yang memerintahkan untuk mencatatkan

perkawinan kepada badan yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”,³³³ dan juga dalam KHI Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, dalam ayat (2) ditegaskan “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang No. 32 Tahun 1954”.³³⁴

Terkait tentang dasar orang yang nikah siri menurut petugas KUA se-Kota Palangka Raya seperti HH (KUA Phdt) dasar mereka adalah agama, jika syarat dan rukun nikah terpenuhi maka sah nikahnya, AN (KUA Jky) dasarnya adalah nikah siri tidak ada larangan dalam Alquran dan hadis, LH (KUA Sbg) mereka tidak peduli dengan Undang-Undang, yang penting sah secara Islam. Menurut WN (KUA Rkpt) dan AB (KUA Bbt) tidak ada dasarnya orang yang nikah siri. Sedangkan menurut hakim SN yang terungkap di Pengadilan rata-rata karena ketidaktahuan masyarakat tentang administrasi, sedangkan HMN tidak mengemukakan pendapat karena menurutnya bukan kewenangan hakim untuk mengomentari itu, adapun menurut MRA dasarnya karena mau sembunyi-sembunyi, trauma dan terikat kontrak tidak boleh menikah.

³³³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2).

³³⁴Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) Pasal 5 ayat (1) dan (2).

Secara umum orang yang melakukan nikah siri itu berlandaskan bahwa nikah secara agama (nikah yang tidak dicatatkan) itu adalah sah asalkan syarat dan rukun nikah secara fikih terpenuhi. Namun menurut peneliti pencatatan perkawinan pada konteks zaman sekarang khususnya di Indonesia sangat penting dilakukan, karena akta nikah pada zaman sekarang sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan. Contohnya jika ingin pergi haji maka akta nikah diperlukan, kemudian jika ingin membuat akta kelahiran anak juga diperlukan akta nikah. Jadi masyarakat tidak bisa terlepas dari akta nikah. Jika masyarakat tidak mempunyai akta nikah maka akan mempersulit dan menimbulkan mudarat bagi diri mereka sendiri.

Hemat peneliti, pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Sebagaimana dalam kaidah fikih sebagai berikut:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ.

Artinya: Menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan.³³⁵

Pencatatan perkawinan menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan karena akan membawa kepada banyak kemanfaatan, dan jika pencatatan perkawinan tidak dilaksanakan maka akan membawa kepada kemudharatan. Dalam kaidah fikih yang lain disebutkan:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: Menolak mudarat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.³³⁶

³³⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2007, h. 27.

Pada kaidah tersebut jelas disebutkan bahwa menolak mudarat itu lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan. Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti mencegah terjadinya pengingkaran dari pihak suami maupun istri terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam perspektif *maṣlaḥah* dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah mursalah*, karena tidak secara tegas diperintahkan oleh syara akan tetapi keberadaannya tidak pula dilarang oleh syara.³³⁷ Jadi dalam hal ini pencatatan perkawinan mengandung banyak kemaslahatan.

3. Sanksi Nikah Siri Menurut Praktisi dan Akademisi Hukum Islam

Sebelum membahas tentang sanksi nikah siri, terlebih dahulu peneliti jelaskan tentang hukum nikah siri. Para petugas KUA se-Kota Palangka Raya seperti HH (KUA Phdt) berpendapat bahwa nikah siri 80% tidak sah menurut hukum agama, menurut AN (KUA Jky) nikah siri boleh jika syarat dan rukunnya terpenuhi, LH (KUA Sbg) berpendapat secara agama sah asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi, namun secara Undang-Undang belum sah, WN (KUA Rkpt) secara agama sah asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi, sedangkan secara hukum negara tidak sah karena tidak tercatat di KUA, dan AB (KUA Bbt) berpendapat nikah siri tidak sah sesuai dengan Alquran, hadis dan Undang-Undang. Adapun menurut hakim SN bahwa bukan kapasitas hakim untuk menjawabnya, menurut HMN Undang-Undang tidak membolehkan, dan menurut MRA dari sudut pandang agama nikah siri sah

³³⁶*Ibid.*, h. 29.

³³⁷Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2008, h. 150.

asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi, sedangkan dari sudut pandang hukum positif tidak boleh.

Berdasarkan penjelasan di atas, hukum nikah siri adalah sah secara hukum agama jika syarat dan rukunnya terpenuhi, namun pernikahan tersebut tidak diakui di mata hukum karena pernikahan tersebut tidak dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi dari pencatatan perkawinan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab salah satu bukti yang dianggap sah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa dijadikan sebagai alat bukti di hadapan majelis peradilan ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh, perceraian, nafkah dan lain sebagainya.

Pada ushul fikih terdapat *sadd az-zarī'ah*³³⁸ yang bermakna menutup jalan perbuatan dosa. Kaitannya dengan pernikahan adalah pada dasarnya nikah itu boleh bahkan wajib jika sudah memenuhi syarat, tapi jika dilakukan dengan cara siri pada masa sekarang ini bisa menjadi haram karena akan sangat merugikan pihak wanita. Selain itu juga melanggar Undang-Undang yang telah jelas mengharuskan pencatatan perkawinan (artinya melarang

³³⁸*Sadd az zarī'ah* merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Metode ini bersifat preventif atau usaha pencegahan. Artinya, segala sesuatu yang hukum asalnya mubah, tetapi akan membawa kepada kemudharatan maka hukumnya menjadi haram. Lihat Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 104.

nikah siri). Sikap melanggar hukum negara adalah sikap tidak mencintai tanah air, padahal mencintai tanah air adalah sebagian dari iman.

Adapun dampak atau akibat hukum dari nikah siri menurut para petugas KUA se-Kota Palangka Raya seperti HH (KUA Phdt) mengemukakan bahwa dampak nikah siri antara lain berpengaruh terhadap status anak, waris, susah mendapatkan asuransi jika terjadi kecelakaan, dan jadi pembicaraan masyarakat, menurut AN (KUA Jky) istri dan anak menjadi terlantar, LH (KUA Sbg) tidak bisa membuat BPJS, anak tidak punya akta kelahiran dan tidak bisa naik haji dan umrah, WN (KUA Rkpt) tidak punya buku nikah, anak tidak diakui negara, akta kelahiran hanya tercantum nama ibunya dan juga masalah waris, dan AB (KUA Bbt) tidak bisa tanggung jawab penuh terhadap istri dan masalah waris. Sedangkan menurut hakim SN dampak nikah siri yaitu bermasalah dalam akta kelahiran anak, berangkat haji dan umrah, minjam uang di Bank dan masalah waris, menurut HMN bermasalah dalam hal warisan dan pembuatan akta, dan menurut MRA bermasalah dalam waris dan harta gono-gini. Adapun menurut para akademisi dalam permasalahan yang sama menurut AS dampak nikah siri yaitu dalam perspektif hukum positif secara kekuatan hukum tidak mendapatkan bagian warisan. Menurut ESS nikah siri berpengaruh terhadap mental anak dan istri, waris dan istri tidak bisa menuntut suami. Adapun menurut AD nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum kepada siapapun, hak waris, hak asuh, akta kelahiran, bahkan hak perwalian. Sedangkan menurut HKA orang yang nikah

siri kesulitan dalam membuat akta, susah mengurus perceraian, berangkat haji dan umrah serta waris mawaris.

Menurut Dodi Ahmad Fauzi dalam bukunya yang berjudul *Nikah Siri Yes or No* dijelaskan bahwa:

Dampak nikah siri antara lain jika dikemudian hari pihak laki-laki tidak bertanggung jawab baik lahir maupun batin atau melakukan kekerasan dan lainnya, maka pihak perempuan tidak mempunyai hak-hak keperdataannya, antara lain tidak dapat mengajukan gugatan cerai. Selain itu, tidak dapat bercerai selama pihak laki-laki tidak menceraikannya. Selanjutnya, anak yang lahir akibat hubungan mereka tidak mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama orang tua laki-laki. Ini nantinya dapat menimbulkan dampak psikologis bagi anak tersebut. Masalah lainnya, jika pihak laki-laki menceraikannya maka pihak perempuan tidak dapat menggugat harta gono-gini. Kemudian jika laki-laki meninggal maka pihak perempuan dan anaknya tidak dapat mengajukan gugatan harta peninggalannya.³³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari nikah siri. Sedangkan dalam Islam menghendaki pernikahan yang aman, tentram dan damai, tidak seperti nikah siri yang dapat menimbulkan mudarat. Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan *rahmah*. Menurut peneliti tujuan pernikahan Islam dapat diraih dengan dilakukannya pencatatan perkawinan. Sebab jika pernikahan itu dicatatkan maka akan menimbulkan rasa aman, nyaman dan damai bagi pasangan suami istri.

Pentingnya pencatatan perkawinan tidak lain adalah untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya bagi perempuan dan anak dalam pernikahan. Pada dasarnya tujuan syariat adalah untuk meraih kemaslahatan

³³⁹Dodi Ahmad Fauzi, *Nikah Siri Yes or No*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2008, h. 21-22.

dan menolak segala bentuk kemudharatan. Ungkapan tersebut adalah bahwa syariat Islam sesungguhnya dibangun untuk kemaslahatan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal, seperti keadilan, kerahmatan dan kebijaksanaan. Hal ini sejalan dengan teori maslahat, menurut at-Tufi maslahat adalah sarana yang menyebabkan adanya maslahat dan manfaat. Misalnya, perdagangan adalah sarana untuk mencapai keuntungan.

Maslahat terbagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang memang merupakan kehendak syar'i, yakni ibadah dan apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti adat istiadat.³⁴⁰ Pencatatan perkawinan termasuk dalam maslahat yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan. Pencatatan perkawinan memang tidak ditemukan dalam kitab fikih klasik, karena pada masa itu kehidupan manusia masih sangat sederhana dan pencatatan belum menjadi kebutuhan pokok. Namun seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan yang begitu pesat akibat kemajuan teknologi dan dinamika masyarakat yang berpengaruh terhadap pola kehidupan keluarga sesuai dengan tuntutan zaman. Kehidupan manusia pada zaman sekarang semakin rumit maka pencatatan menjadi suatu hal yang sangat penting dan harus dilakukan demi tercapainya kemaslahatan manusia. Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

³⁴⁰Yusdani, *Teori Maslahat*, [Http://makalahlaporanterbaru1.blogspot.co.id/2012/05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html](http://makalahlaporanterbaru1.blogspot.co.id/2012/05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html) (diakses 17 Oktober 2016).

Artinya: Kebijakan pemimpin (pemerintah) kepada rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan.³⁴¹

Kaidah di atas dapat dijadikan sebagai dasar bagi masyarakat untuk mengikuti dan menaati peraturan pemerintah Indonesia, dalam hal ini tentang diharuskannya melakukan pencatatan perkawinan. Dalam pencatatan perkawinan terdapat banyak kegunaan (manfaat) khususnya bagi istri dan anak. Bagi istri manfaat pencatatan perkawinan adalah hak nafkah, hak waris dan hak harta gono-gini lebih terlindungi. Bagi anak manfaat pencatatan perkawinan adalah status anak menjadi lebih jelas, yang berkaitan dengan harta seperti hak nafkah, hak waris dan juga hak perwalian menjadi lebih terjamin. Selain itu, dengan pencatatan perkawinan maka akan diterbitkan sebuah buku nikah sebagai bukti autentik bahwa pernikahan tersebut telah didaftarkan secara resmi di hadapan pegawai pencatat nikah. Dengan memiliki buku nikah, hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta Kelahiran, atau bahkan yang berkaitan dengan politik yaitu berhaknyanya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum akan lebih mudah dilayani daripada yang tidak memiliki buku nikah. Semua itu karena adanya bukti pernikahan berupa buku nikah yang akhirnya dapat membuat KTP dan KK, sementara untuk membuat akta kelahiran anak, atau pasport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah. Begitu pentingnya buku nikah yang didapat melalui pencatatan nikah ini diibaratkan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengendara

³⁴¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, h. 15.

kendaraan bermotor. Bagi pengendara yang memiliki SIM akan merasa aman berkendara di jalan tanpa ada perasaan khawatir ditilang oleh Polisi lalu lintas. Demikian halnya bagi pasangan suami istri yang memiliki buku nikah akan merasa aman dan tentram tanpa ada perasaan khawatir dalam menjalani bahtera rumah tangganya.

Pentingnya akta nikah sebagai alat bukti adanya sebuah perkawinan sejalan dengan kaidah fikih sebagai berikut:

الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَيَّنَةِ.

Artinya: Apa yang ditetapkan dengan bukti-bukti yang adil seperti yang ditetapkan berdasarkan kenyataan.³⁴²

Berdasarkan kaidah fikih di atas, akta nikah merupakan sebuah bukti tertulis yang dibuat oleh KUA sebagai dalil kenyataan bahwa perkawinan itu memang benar-benar ada dan sah secara hukum. Dengan demikian, pernikahan yang telah dicatat menjadi pernikahan yang legal di hadapan hukum. Sehingga pasangan suami istri akan merasa aman dalam pernikahannya.

Adapun pandangan praktisi dan akademisi tentang ketentuan hukum atau sanksi nikah siri yaitu para petugas KUA se-Kota Palangka Raya seperti HH (KUA Phdt) berpendapat bahwa seharusnya diatur dalam Undang-Undang, bagi yang tidak berwenang menikahkan dapat dituntut 6 bulan penjara, menurut AN (KUA Jky) sebaiknya ada hukuman kurungan. Dia sangat setuju jika nikah siri diberikan sanksi karena nikah siri akan

³⁴²*Ibid.*, h. 161.

mengacaukan administrasi, LH (KUA Sbg) berpendapat seharusnya ada aturan yang jelas, baik dalam PP, KMA maupun Undang-Undang, WN (KUA Rkpt) setuju jika ada Undang-Undang yang mengatur tentang denda nikah siri, dan AB (KUA Bbt) seharusnya pemerintah membuat aturan agar tidak terjadi nikah siri. Sedangkan hakim SN berpendapat bahwa jika ada unsur kesengajaan seharusnya ada aturan yang mengatur tentang hukumannya, menurut HMN direvisi Undang-Undang dan PPnya untuk menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku serangkaian nikah siri, dan MRA harus ada hukuman yang tegas. MRA sangat mendukung RUU hukum materiel peradilan agama tentang sanksi nikah siri. Adapun menurut para akademisi dalam permasalahan yang sama menurut AS nikah siri tidak bisa diberikan sanksi karena nikah siri tidak termasuk dalam tindak pidana, namun dia berpendapat nikah siri itu diberikan sanksi sosial saja. Menurut ESS sanksinya tergantung yang bersangkutan, dia berpendapat sebaiknya dipidana yang memberatkan pelaku supaya tidak akan terjadi lagi nikah siri. Adapun AD setuju dengan RUU hukum materiel peradilan agama yang mengatur tentang sanksi nikah siri, menurutnya sanksi sosial juga bagus. Sedangkan HKA sependapat dengan RUU hukum materiel peradilan agama tentang sanksi nikah siri dan RUU tersebut harus disosialisasikan, namun dia berpandangan sebaiknya terlebih dahulu dilakukan langkah preventif agar orang tidak melakukan nikah siri.

Hemat peneliti, hampir semua responden setuju jika nikah siri diberikan sanksi. Mereka berlandaskan karena nikah siri menimbulkan akibat

hukum yang tidak baik seperti berpotensi untuk terjadinya kriminalitas, hilangnya tanggung jawab, bahkan lari dari tanggung jawab sehingga merugikan istri dan anak serta mengacaukan administrasi. Para praktisi ada yang berpendapat bahwa sanksinya berupa pidana dan ada juga yang berpendapat bahwa sanksinya berupa sanksi sosial. Para praktisi banyak yang lebih cenderung memilih sanksi pidana bagi pelaku serangkaian nikah siri. Menurut para praktisi sanksi pidananya dapat berupa hukuman kurungan atau denda. Dari kalangan akademisi yaitu AD setuju jika nikah siri diberikan sanksi pidana, namun dia menyatakan bahwa sanksi sosial lebih memberikan efek jera kepada para pelaku serangkaian nikah siri. Sanksi sosial yang ditawarkan oleh AD adalah para pelaku nikah siri itu disuruh lari keliling lapangan dan dikawal oleh Lurah dan masyarakat.

Menurut peneliti sanksi sosial yang ditawarkan oleh AD tersebut kurang efektif untuk zaman sekarang. Karena zaman sekarang setiap orang mempunyai kesibukan masing-masing, apalagi seorang Lurah yang mempunyai banyak pekerjaan di kantornya. Jadi kemungkinan besar masyarakat tidak mempunyai waktu untuk mengawal keliling lapangan para pelaku nikah siri, dan pada zaman sekarang khususnya masyarakat perkotaan itu banyak orang yang bersikap apatis, artinya tidak tahu menahu atau tidak peduli terhadap apa yang terjadi dengan orang yang berada di sekitarnya.

Kemudian ada satu responden yakni AS yang menyatakan bahwa nikah siri tidak dapat diberi sanksi dengan alasan nikah siri bukan tindak pidana, AS berpendapat dalam nikah siri itu hanya sanksi sosial saja. Menurut

peneliti, sanksi sosial yang dimaksud oleh AS adalah hanya berupa pergunjungan atau pembicaraan negatif dari masyarakat terhadap orang yang nikah siri tersebut. Jadi orang yang nikah siri tersebut menjadi bahan pembicaraan negatif oleh masyarakat sekitar.

Para praktisi menghendaki adanya peraturan yang jelas dan tegas mengenai sanksi nikah siri. Karena sampai sekarang belum ada peraturan yang jelas dan tegas yang menjelaskan tentang sanksi yang diberikan terhadap pelaku serangkaian nikah siri. Dalam hal ini peneliti setuju dengan para praktisi, seharusnya ada peraturan yang pasti tentang sanksi nikah siri tersebut. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1-2) hanya dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan berlaku.³⁴³ Pada pasal tersebut digariskan bahwa pada intinya perkawinan itu harus tercatat oleh lembaga yang berwenang, namun dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak disebutkan apa sanksi yang diberikan kepada pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya dan kepada orang yang tidak berwenang untuk menikahkan seseorang (pelaku serangkaian nikah siri).

Larangan nikah siri perlu diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan agar ada kepastian hukum dalam pernikahan dan kepastian hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan. Larangan tersebut tiada lain adalah

³⁴³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

untuk menjadikan kewibawaan perkawinan terjaga karena dalam Islam perkawinan adalah hal yang suci, selain itu tidak ada keuntungan dalam pernikahan siri. Nikah siri lebih banyak merugikan anak-anak dan kaum perempuan. Dari hal tersebut maka perlu ada kepastian hukum terkait dengan sanksi bagi pelaku serangkaian nikah siri. Hal ini sesuai dengan teori kepastian hukum. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh.³⁴⁴ Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya.³⁴⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁴⁶ Adapun menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu

³⁴⁴Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum...*, h. 140.

³⁴⁵*Ibid.*

³⁴⁶[Http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/](http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/) (diakses 17 Oktober 2016).

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Dengan adanya kepastian hukum maka ketertiban dalam masyarakat akan tercapai.³⁴⁷ Jadi, dari teori kepastian hukum ini maka perlu ditetapkan aturan larangan nikah siri dan sanksi bagi pelaku serangkaian nikah siri agar adanya kepastian hukum sehingga aturannya jelas dan dapat ditaati oleh masyarakat.

Terkait sanksi nikah siri dalam Islam dapat dilihat dari ucapan ‘Umar bin Khaṭṭāb pada saat diberitahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang lelaki dan seorang perempuan. Sebagaimana yang terdapat pada *aṣar* sebagai berikut:

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِتَى بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ: هَذَا نِكَاحُ السَّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ.

Artinya: Dari Abu Zubair al-Makkī, sesungguhnya ‘Umar bin Khaṭṭāb pernah dilaporkan mengenai suatu kasus pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita. Kata ‘Umar bin Khaṭṭāb, Ini pernikahan siri dan aku tidak memperbolehkannya. Sekiranya aku hadir dalam pernikahan itu niscaya aku rajam.³⁴⁸

Menurut peneliti, dari *aṣar* di atas dapat diketahui bahwa pada zaman ‘Umar bin Khaṭṭāb telah ada yang melakukan nikah siri dan seandainya ‘Umar bin Khaṭṭāb melihat pernikahan siri tersebut maka pelaku nikah siri tersebut akan dirajam olehnya. Ini menandakan bahwa Islam tidak memperbolehkan nikah siri. Dari *aṣar* tersebut juga dapat dipahami bahwa maksud dari teks tersebut adalah pernikahan siri itu dapat diberikan sanksi.

³⁴⁷Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum...*, h. 227.

³⁴⁸Adib Bisri dkk, *Tarjamah Muwaṭṭa‘ al-Imam Malik r.a.*, Semarang: CV Asy-Syifa’, 1992, h. 23.

Mengenai sanksi nikah siri di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 disebutkan:

Pasal 3

- (1) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksud pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah).
- (2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya R 100,- (Seratus rupiah).³⁴⁹

Adapun isi dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 adalah *“Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya”*.³⁵⁰

Selain itu aturan tentang sanksi nikah siri juga terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut terdapat pada Bab IX Ketentuan Pidana Pasal 45 sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

³⁴⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Pasal 3 ayat (1) dan (2).

³⁵⁰*Ibid.*, Pasal 1 ayat (2).

- b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.³⁵¹

Menurut peneliti peraturan tersebut di atas kurang disosialisasikan, karena sampai sekarang masih ada yang melakukan nikah siri. Para pelaku serangkaian nikah siri belum mengetahui adanya peraturan tersebut, yang penting bagi mereka adalah nikah secara agama (tanpa dicatat) itu sah. Kemudian mengenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 itu perlu diperbarui karena peraturan tersebut tidak sesuai dengan zaman sekarang.

Pada saat ini telah ada Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur tentang sanksi nikah siri yakni Rancangan Undang-Undang Hukum Materiel Peradilan Agama Bidang Perkawinan (RUU-HM-PA-Bperkwn) Tahun 2007, pada RUU tersebut dalam Pasal 143 dinyatakan bahwa *“setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan pejabat pencatat nikah, dipidana dengan denda paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 bulan”*.

Pada Pasal 151 RUU-HM-PA-BPerkwn Tahun 2007 disebutkan bahwa *“setiap orang yang melakukan perkawinan tidak di hadapan PPN merupakan*

³⁵¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan (2).

tindak pidana pelanggaran”. Hemat peneliti, saat ini tidak ada lagi perbedaan antara tindak pidana pelanggaran dengan tindak pidana kejahatan, keduanya disebut tindak pidana. Dengan adanya ketentuan pidana denda dan kurungan ini, implisit di mata hukum “seseorang yang melangsungkan nikah siri” dinilai oleh RUU tersebut melanggar 2 ketentuan, yaitu melanggar pidana dan hukum administrasi negara.

Menurut peneliti, ketentuan hukuman kurungan hendaknya dihapus, cukup hukuman denda saja karena nikah siri adalah wilayah pelanggaran administrasi, di samping denda juga disertai ketentuan kewajiban memberikan restitusi dari pelaku kepada anggota keluarga yang dirugikan. Hukuman denda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143, kata “*paling banyak*” perlu mendapat perhatian hakim, artinya pelanggaran pencatatan perkawinan sangat perlu dipertimbangan kondisi ekonomi pelaku nikah siri. Di sisi lain ketentuan hukuman denda ini masih dapat diterima karena tidak berakibat buruk terhadap anak yang dilahirkan akibat perkawinan siri. Mereka tetap mendapatkan perlindungan secara ekonomi, psikis, maupun sosiologis dari ayahnya. Berbeda apabila ayahnya dijatuhi hukuman penjara maka akibatnya terhadap kehidupan sosial ekonomi dan psikologi anak dan keluarga adalah sangat tidak nyaman dan merugikan.

Hukuman penjara adalah bukan penyelesaian bagi masa depan pernikahan siri yang lantas orang tidak berani melakukan nikah siri, lebih-lebih bagi masyarakat pedesaan yang tidak mampu dan belum melek hukum di mana nikah siri dilakukan karena alasan biaya dan kesulitan teknis lainnya

seperti Kantor KUA yang cukup jauh. Di sisi lain, untuk menentukan denda bagi pelaku nikah siri perlu kriteria yang jelas unsur tindak pidana dan jenis deliknya seperti:

- a. Perkawinan dengan sengaja bertujuan untuk menyembunyikan perkawinan agar tidak diketahui oleh orang lain atau masyarakat pada umumnya.
- b. Perkawinan yang disembunyikan tersebut menyebabkan terjadinya penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi istri/suami dan anak-anak yang dilahirkan.
- c. Jenis deliknya harus delik aduan. Dengan delik aduan ini, maka untuk menentukan seseorang melakukan pelanggaran ketentuan pencatatan perkawinan (perkawinan siri) yang dapat dipidana denda adalah masuknya paling tidak memenuhi 5 unsur:
 - 1) Perkawinan dengan sengaja ditujukan untuk disembunyikan.
 - 2) Terbukti atau minimal ada bukti awal bahwa perkawinan itu merugikan kaum perempuan dan anak-anak.
 - 3) Terbukti perkawinan poligami yang dilakukan suami menyengsarakan kaum perempuan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan terdahulu hingga perkawinan selanjutnya.
 - 4) Orang yang dapat melakukan pengaduan kepada pihak berwenang ditentukan hanya: Istri, suami, anak-anak yang lahir dari hasil seluruh perkawinan yang bersangkutan, anggota keluarga sedarah lainnya, atau pihak lain yang dirugikan oleh perkawinan yang

dengan sengaja disembunyikan tersebut.

- 5) Hukuman hanya hukuman denda disertai dengan kewajiban pembayaran restitusi dari pelaku kepada istri/suami dan anak-anak yang dirugikan.

Jadi sebaiknya sanksi bagi pelaku serangkaian nikah siri itu adalah hanya berupa denda atau sanksi administratif saja. Hal ini sesuai dengan teori sanksi yakni pada jenis sanksi administratif. Hukum administrasi memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Jadi masyarakat harus mencatatkan perkawinannya agar tertib administrasi. Jika tidak dicatat maka dapat dikenakan sanksi administratif. Adapun jenis sanksi administratif yang dapat diterapkan kepada masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya adalah berupa sanksi *punitif*, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif.

Terkait dengan pernah atau tidaknya diambil tindakan terhadap pelaku serangkaian nikah siri oleh pihak KUA se-Kota Palangka Raya maka HH (KUA Phdt) dan AB (KUA Bbt) menjawab pernah, tindakan berupa teguran terhadap yang menikahkan, adapun AN (KUA Jky) dan WN (KUA Rkpt)

belum pernah, dan LH (KUA Sbg) menjawab tidak ada, hanya diberikan arahan saat penasihat pra nikah, khutbah jumat, dan ceramah.

Berdasarkan jawaban dari lima orang responden di atas, dapat diketahui hanya dua orang yang pernah mengambil tindakan terhadap pelaku serangkaian nikah siri, tindakannya hanya berupa teguran. Menurut peneliti, para responden tidak melakukan tindakan yang lebih berat terhadap pelaku serangkaian nikah siri karena tidak adanya aturan yang jelas dan tegas yang mengatur tentang sanksi nikah siri. Sebenarnya jika Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 itu direvisi atau dibuat Undang-Undang baru yang pasti, jelas dan tegas yang mengatur tentang sanksi nikah siri, kemudian Undang-Undang tersebut disosialisasikan dan dijalankan (berjalan secara efektif dan efisien), maka para pelaku serangkaian nikah siri dapat ditindak lanjuti dan diberikan sanksi.

Mengenai pernah atau tidaknya dilaksanakan penyuluhan hukum tentang larangan nikah siri oleh para praktisi, dari petugas KUA se-Kota Palangka Raya HH (KUA Phdt), AN (KUA Jky), LH (KUA Sbg), WN (KUA Rkpt) dan AB (KUA Bbt), mereka menjawab pernah, yakni pada saat dilaksanakannya akad nikah dan saat ceramah. Sedangkan hakim SN menjawab dulu sering dilaksanakan penyuluhan saat awal-awal KHI diterbitkan, namun akhir-akhir ini program penyuluhan hukum jarang dilakukan. Hakim HMN menjawab bukan kewenangan Pengadilan, seharusnya KUA yang melaksanakannya. Adapun hakim MRA menjawab bahwa tidak dilaksanakan penyuluhan karena pengadilan itu bersifat pasif.

Menurut peneliti apa yang dilakukan oleh para responden dari KUA se-Kota Palangka Raya sudah bagus. Mereka tidak melakukan penyuluhan larangan nikah siri secara terprogram karena tidak adanya dana untuk kegiatan penyuluhan tersebut. Akan tetapi mereka melakukan penyuluhan larangan nikah siri pada saat akad nikah dilaksanakan dan pada saat ceramah. Jadi mereka berinisiatif sendiri untuk menyampaikan tentang larangan nikah siri. Sedangkan dari Pengadilan, penyuluhan hukum sering dilakukan pada waktu KHI baru diterbitkan, namun untuk sekarang sudah jarang dilakukan penyuluhan, dan karena Pengadilan itu bersifat pasif maka pihak Pengadilan tidak akan melakukan penyuluhan jika tidak diminta oleh pemerintah. Menurut peneliti, karena banyaknya orang yang melakukan nikah siri maka seharusnya pemerintah bekerjasama dengan Pengadilan Agama dan KUA untuk melakukan penyuluhan hukum tentang larangan nikah siri secara terprogram demi terciptanya masyarakat yang tertib administrasi.

Adapun terkait merekomendasikan atau tidaknya para praktisi dan akademisi terhadap pelaksanaan nikah siri, para petugas KUA se-Kota Palangka Raya HH (KUA Phdt), AN (KUA Jky), LH (KUA Sbg), WN (KUA Rkpt) dan AB (KUA Bbt), mereka menjawab tidak merekomendasikan nikah siri. Hakim SN dan MRA juga menjawab tidak, karena melihat dampak yang ditimbulkan akibat nikah siri. Sedangkan hakim HMN mengatakan bahwa itu bukan kewenangan hakim untuk menjawabnya. Kemudian para akademisi dalam permasalahan yang sama AS, ESS, HKA dan AD menjawab tidak merekomendasikan nikah siri. Menurut AD nikah itu kembali kepada

personal, orang yang menikah secara serius dan bertanggung jawab dengan baik biasanya melaporkan perkawinannya kepada KUA.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa hampir semua responden tidak merekomendasikan pelaksanaan nikah siri karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan akibat pernikahan siri. Hemat peneliti, jika semua orang tidak merekomendasikan nikah siri maka sudah seharusnya sanksi nikah siri diterapkan di Indonesia. Sanksi nikah siri dimaksudkan agar masyarakat tidak lagi melakukan nikah siri, dan sanksi nikah siri dapat dijadikan sebagai sarana pencegahan terjadinya nikah siri. Jika semua orang mencatatkan pernikahannya di hadapan pegawai pencatat nikah maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan *rahmah* akan tercapai dan juga akan menertibkan administrasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai studi pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam tentang sanksi nikah siri maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya nikah siri yaitu adanya masyarakat yang tidak memiliki akta cerai/talak bawah tangan dan ingin menikah lagi, pasangan tidak direstui orang tua/wali, hamil di luar nikah, masyarakat ingin cepat menikah dan tidak mau repot berurusan ke KUA, adanya calo nikah siri, suami tidak diizinkan istri berpoligami, persyaratan administrasi tidak lengkap dan calon pengantin belum cukup usia menikah, kurangnya pengetahuan tentang fungsi administrasi pernikahan, suami/istri takut hartanya terbagi jika menikah secara resmi dan karena perselingkuhan.
2. Pelaksanaan nikah siri sama halnya seperti peristiwa pernikahan pada umumnya, hanya saja tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Tempatnya di rumah calon pengantin dan yang menikahkan adalah tokoh agama. Pada pernikahan siri ada yang mencatatkan pernikahannya hanya pada selebaran kertas.
3. Pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam tentang sanksi nikah siri yaitu para praktisi hukum Islam sepakat pelaku nikah siri diberikan sanksi karena mengacaukan administrasi negara dan berdampak negatif

bagi istri dan anak. Sedangkan para akademisi hukum Islam ada yang setuju dan ada yang tidak setuju jika nikah siri diberikan sanksi, mereka yang setuju berlandaskan karena nikah siri menimbulkan akibat hukum yang tidak baik, terjadinya kriminalitas, hilangnya tanggung jawab, bahkan lari dari tanggung jawab sehingga merugikan istri dan anaknya di kemudian hari. Pihak yang tidak setuju nikah siri diberikan sanksi berlandaskan bahwa nikah siri itu tidak termasuk dalam tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak KUA seharusnya bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan penyuluhan yang lebih ekstra kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan, tidak hanya masyarakat yang berada di perkotaan namun juga yang berada di pedesaan, baik itu melalui penyuluhan yang terprogram maupun melalui ceramah/khutbah dengan tujuan agar masyarakat tidak lagi melakukan nikah siri.
2. Bagi masyarakat khususnya setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya mencatatkan pernikahannya kepada badan yang berwenang, meskipun sekarang belum ada sanksi yang tegas bagi pelaku nikah siri namun tetap catatkanlah pernikahan karena dengan dilakukannya pencatatan perkawinan maka hak dan kewajiban dalam keluarga menjadi terjamin dan pernikahannya pun diakui di mata hukum.

3. Bagi pihak eksekutif dan legislatif hendaknya segera mengesahkan sanksi bagi pelaku nikah siri yang telah dirancang dalam Undang-Undang Hukum Materiel Peradilan Agama agar segera diberlakukan guna mencegah terjadinya nikah siri di kalangan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdillah, Abu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid 3*, Libanon: Darul Fikri, 2006.
- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Dodi Fauzi, *Nikah Siri Yes or No*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2008.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud (1)*, Penerjemah Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak dan Ahmad Rifa'i Utsman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Penerjemah Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Azizy, Taufiqurrahman, *Jangan Sirri-Kan Nikahmu*, Jakarta Selatan: Himmah Media, 2010.
- Al-Farran, Syaikh Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Imām asy-Syāfi'i*, penerjemah Ali Sultan dan Fedrian Hasmand dengan judul "Tafsir Imam Syafi'i Jilid: 1 Surah al-Fatihah – Surah Ali 'Imran, Jakarta: Al-Mahira, 2008.
- Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Jauziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyub ibn Sa'ad ibn Hariz az-Zar'i ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamīn*, Jilid II, Juz III, Kairo: Dār al-Hadis, 2002.
- Anshary, H. M., *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- At-Tirmizi, Abi 'Isa bin Muhammad bin Surah, *al-Jami'u aṣ-Ṣahih wa huwa Sunan at-Tirmizi Juz Šālīs*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1934.
- Bisri, Adib dkk, *Tarjamah Muwaṭṭa al-Imam Malik r.a.*, Semarang: CV Asy-Syifa', 1992.

- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Bungin, Burhan, *Analaisis Data Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2007.
- Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2008.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Idris, Mohd. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Uşūl al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqin dengan judul "Ilmu Uşul Fikih: Kaidah Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. 9, 1977.
- Kusumaatmadja, Mochta dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: PT Alumni, 2000.
- Luthfi, M. Musthafa dan Mulyadi Luthfi R, *Nikah Sirri (Membahas Tuntas Definisi Awal, Asal Usul Hukum, serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf)*, Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010.
- Milles, Mathew B dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992.
- Moeleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 18, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- MZ, Labib, *Risalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.
- Pelu, Ibnu Elmi AS dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian: Hukum Acara di Peradilan Agama Islam*, Malang: Setara Press, 2015.
- Sadiani, *Nikah Via Telepon: Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: Intimedia dan STAIN Palangka Raya, 2008.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Al-Lubab*, Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- _____, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- _____, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Palangka Raya, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2013.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam istinbāt Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Warson, Ahmad Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i (Mengupas Masalah Fiqihyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 2)*, Penterjemah Muhammad Afifi, Abdul Hafiz Jakarta Timur: Almahira, 2008.

B. Karya Ilmiah

Lalata, Yuyanti, *Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi), Gorontalo: Universitas Ichsan Gorontalo, 2013, t.d. <http://yuyantilalata.blogspot.com/2013/02/akibat-hukum-nikah-siri-terhadap.html> (diakses 12 Oktober 2016).

Lindawati, Iis, *Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri di Kelurahan Menteng dan Pahandut Kota Palangka Raya)*, (skripsi), Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2002, t.d. (Perpustakaan IAIN Palangka Raya).

Miftahurrohman, *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya (Studi Pendapat Mahasiswa FAI UNISSULA Semarang Angkatan 2006-2009)*, (skripsi), Semarang: UNISSULA Semarang, 2010, t.d. <https://www.scribd.com/doc/86982380/Skripsi-Nikah-Siri-Dan-Akibat-Hukumnya-Miftahurrohman-SHI> (diakses 12 Oktober 2016).

Mujiati, *Nikah Siri dan Implikasinya dalam Kehidupan Sosial di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus*, (skripsi), Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011, t.d. <http://lib.unnes.ac.id/6817/1/7882.pdf> (diakses 12 Oktober 2016).

Rahman, Taupik, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Nikah Sirri di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya*, (Skripsi), Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2014, t.d. (Perpustakaan IAIN Palangka Raya).

Rochayati, Rita, *Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Siri di Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten*, (skripsi), Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, t.d. <http://eprints.uny.ac.id/22541/1/Rita%20Rochayati-08413241019.pdf> (diakses 12 Oktober 2016).

C. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

D. Internet

Alwi, *Maslahat*, [Http://alwi-ushulfiqih.blogspot.co.id/2010/04/maslahat.html](http://alwi-ushulfiqih.blogspot.co.id/2010/04/maslahat.html) (diakses 17 Oktober 2016).

[Http://ilmukita-imam.blogspot.com/2012/04/nikah-siri-dalam-perspektif-hukum_24.html](http://ilmukita-imam.blogspot.com/2012/04/nikah-siri-dalam-perspektif-hukum_24.html) (diakses 12 Mei 2016).

[Http://m.voa-islam.com/news/indonesia/2012/12/06/22169/ruu-nikah-siri-ramerame-mempidanakan-ulama-menolak](http://m.voa-islam.com/news/indonesia/2012/12/06/22169/ruu-nikah-siri-ramerame-mempidanakan-ulama-menolak) (diakses 12 Mei 2016).

[Http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/](http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/) (diakses 17 Oktober 2016).

[Https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/](https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/) (diakses 04 Mei 2017).

[Https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/](https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/) (diakses 04 Mei 2017).

[Https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-ray/](https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-ray/) (diakses 04 Mei 2017).

[Http://erepo.unud.ac.id/11020/3/51c4414c873f2ff89728e66ae524e9c4.pdf](http://erepo.unud.ac.id/11020/3/51c4414c873f2ff89728e66ae524e9c4.pdf) (diakses 21 Agustus 2017).

Krishna, *Teori Kepastian Hukum*, [Http://skripsifakhukum.blogspot.co.id/2015/01/teori-kepastian-hukum.html](http://skripsifakhukum.blogspot.co.id/2015/01/teori-kepastian-hukum.html) (diakses 17 Oktober 2016).

Lestari, Endah Sri, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri*, [Https://endahsrilestari16.wordpress.com/2014/04/17/sanksi-pidana-bagi-pelaku-nikah-siri/](https://endahsrilestari16.wordpress.com/2014/04/17/sanksi-pidana-bagi-pelaku-nikah-siri/) (diakses 10 Oktober 2016).

Nurhasanah, Nidya, *Kejahatan dan Pelanggaran*,
[Http://nidyanurhasanah.blogspot.co.id/2011/10/kejahatan-dan-pelanggaran.html](http://nidyanurhasanah.blogspot.co.id/2011/10/kejahatan-dan-pelanggaran.html) (diakses 18 November 2016).

Stanley Adrian, *Profil Kota Palangkaraya*,
[Http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html](http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html) (diakses 04 Mei 2017).

Yusdani, *Teori Maslahat*,
[Http://makalahlaporanterbaru1.blogspot.co.id/2012/05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html](http://makalahlaporanterbaru1.blogspot.co.id/2012/05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html) (diakses 17 Oktober 2016).